

**PERAN BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
(BNN RI) DALAM MENJALANKAN PROGRAM “*ALTERNATIVE
DEVELOPMENT*” UNITED NATIONS OFFICE ON DRUGS AND CRIME
(UNODC) DI INDONESIA PADA TAHUN 2019-2022**

SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya untuk
memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar Sarjana Sosial (S.Sos.)
dalam bidang Hubungan Internasional



Oleh

WULAN SUCI GURITNO

NIM I72218064

**PROGRAM STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
DESEMBER 2022**

PERTANGGUNGJAWABAN PENULISAN SKRIPSI

Bismillahirrahmanirrahim

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Wulan Suci Guritno
NIM : I72218064
Program Studi : Hubungan Internasional
Yang berjudul : **Peran Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia (BNN RI) dalam Menjalankan Program “Alternative Development” United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC) di Indonesia Pada Tahun 2019-2022.**

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

- 1) Skripsi ini tidak pernah dikumpulkan pada lembaga pendidikan mana pun untuk mendapatkan gelar akademik apapun.
- 2) Skripsi ini adalah benar-benar hasil karya saya secara mandiri dan bukan merupakan plagiasi atas karya orang lain.
- 3) Apabila skripsi ini dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan sebagai hasil plagiasi, saya bersedia menanggung segala konsekuensi hukum yang terjadi.

Surabaya, 23 Desember 2022

Yang menyatakan



Wulan Suci Guritno

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi terhadap penulisan skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Wulan Suci Guritno
NIM : 172218064
Program Studi : Hubungan Internasional

Yang berjudul : **Peran Badan Narkotika Republik Indonesia dalam Menjalankan Program “Alternative Development” United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC) di Indonesia Pada Tahun 2019-2022.** Saya berpendapat bahwa skripsi tersebut sudah diperbaiki dan dapat diujikan dalam rangka memperoleh gelar sarjana Ilmu Sosial dalam bidang Hubungan Internasional.

Surabaya, 21 Desember 2022

Pembimbing



Nur Luthfi-Hidayatullah, S.IP., M.Hub.Int.

NIP. 199104092020121012

PENGESAHAN TIM PENGUJI

Skripsi oleh Wulan Suci Gurito dengan judul: **Peran Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia (BNN RI) dalam Menjalankan Program “Alternative Development” United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC) di Indonesia Pada Tahun 2019-2022.** Telah dipertahankan dan dinyatakan lulus di depan Tim Penguji Skripsi pada tanggal 23 Desember 2022.

TIM PENGUJI SKRIPSI

Penguji I



Rizki Rahmadini Nurika, S.Hub.Int., M.A
NIP.199003252018012001

Penguji II



Nur Luthfi Hidayatullah, S.IP., M.Hub.Int
NIP.199104092020221012

Penguji III



Ridha Amaliyah, S.IP., MBA.
NUP.201409001

Penguji IV



Zaky Ismail, M.S.I
NIP.198212302011011007

Surabaya, 23 Desember 2022

Mengesahkan,
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya
Fakultas Ilmu Sosial

Dekan



Chalik, M.Ag.
NIP.197306272000031002

PERSETUJUAN PUBLIKASI



UIN SUNAN AMPEL
SURABAYA

KEMENTERIAN AGAMA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax. 031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Wulan Suci Guritno
NIM : I72218064
Fakultas/Jurusan : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
E-mail address : suciguritnowulan@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

☒ Sekripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (.....)
yang berjudul :

Peran Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia (BNN RI) dalam Menjalankan Program

« *Alternative Development* » United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC) di Indonesia Pada

Tahun 2019-2022.

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 17 Januari 2023

Penulis

()
Wulan Suci Guritno

ABSTRACT

Wulan Suci Guritno, 2022. *BNN's Role in Implementing the National Narcotics Agency of the Republic of Indonesia in the United Nations Office on Drugs and Crime Alternative Development Program in Indonesia in 2019-2022.* Undergraduate thesis for International Relations Study Program, Faculty of Social and Political Sciences, Sunan Ampel State Islamic University, Surabaya.

Keywords: Role, *Alternative Development*, BNN, UNODC.

This research focuses on the role of National Narcotics Agency of the Republic of Indonesia in running the Alternative Development program by applying the components of the UNODC Alternative Development. This study uses descriptive qualitative methods and analysis of Alternative Development concepts. The data collection technique used by the author is documentation derived from interviews and literature studies. Based on this role, the author found the National Narcotics Agency in preventing drug crime in Indonesia in 2019-2022, is by creating a new program design, namely GDAD which is based on the UNODC Alternative Development components and implemented in Aceh as a pilot project. The program diverts narcotic plant farmers to alternative commodity agriculture. In this case, BNN has implemented all UNODC Alternative Development components such as Agricultural Development, Basic Infrastructure, Community Development, Education, Environmental Protection, Gender Equality, Health, Improved Markets, and Security Role of Law. The program was considered effective that year, because many farmers in Aceh had previously planted narcotic plants and had switched to superior commodity crops that had high selling values.

ABSTRAK

Wulan Suci Guritno, 2022. *Peran Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia (BNN RI) dalam Menjalankan Program Alternative Development United Nations Office on Drugs and Crime di Indonesia Pada Tahun 2019-2022.* Skripsi Prodi Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya.

Kata Kunci: Peran, *Alternative Development*, BNN, UNODC.

Penelitian ini berfokus pada peran BNN dalam menjalankan program *Alternative Development* dengan menerapkan komponen-komponen dari *Alternative Development* UNODC. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif serta analisis konsep *Alternative Development*. Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh penulis adalah dokumentasi yang berasal dari wawancara dan studi kepustakaan. Berdasarkan penelitian ini, penulis menemukan bahwa terdapat peran BNN dalam mencegah kejahatan narkoba di Indonesia pada tahun 2019-2022 yaitu dengan membuat desain program baru, yakni GDAD yang bertarget pada komponen-komponen *Alternative Development* UNODC dan dijalankan di Aceh sebagai *pilot project*. Program tersebut merupakan program pengalihan petani tanaman narkoba ke pertanian komoditi unggulan. Dalam hal ini, BNN telah mengimplementasikan seluruh komponen-komponen *Alternative Development* UNODC seperti *Agricultural Development*, *Basic Infrastructure*, *Community Development*, *Education*, *Environmental Protection*, *Gender Equality*, *Health*, *Improve Markets*, dan *Security Role of Law*. Program tersebut dinilai efektif pada tahun tersebut, karena telah banyak petani-petani di Aceh yang sebelumnya menanam tanaman narkoba dan telah beralih pada tanaman komoditi unggulan yang memiliki nilai jual tinggi.

DAFTAR ISI

PERTANGGUNGJAWABAN PENULISAN SKRIPSI.....	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN TIM PENGUJI.....	iv
PERSETUJUAN PUBLIKASI.....	v
ABSTRACT	vi
ABSTRAK	vii
DAFTAR ISI	viii
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	11
C. Tujuan Penelitian	12
D. Manfaat Penelitian	12
1. Manfaat Akademis	12
2. Manfaat Praktis	12
E. Tinjauan Pustaka	13
F. Argumentasi Utama	25
G. Sistematika Penulisan Laporan Penelitian	25
BAB II.....	31
LANDASAN KONSEPTUAL	31
A. <i>Alternative Development</i>	31
1. <i>Agricultural Development</i>	34
2. <i>Basic Infrastructure</i>	34
3. <i>Community Development</i>	35

4. <i>Education</i>	35
5. <i>Environmental Protection</i>	36
6. <i>Gender Equality</i>	36
7. <i>Health</i>	37
8. <i>Improve Markets</i>	37
9. <i>Security Role of Law</i>	38
B. Konsep Peran	40
C. Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia (BNN RI)	45
D. <i>Grand Design Alternative Development</i> (GDAD)	49
METODE PENELITIAN	54
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian	54
B. Batasan Masalah	55
C. Lokasi dan Waktu Penelitian	56
D. Subjek Penelitian dan Tingkat Analisis	56
E. Teknik Pengumpulan Data	57
F. Teknik Analisis Data	58
G. Reduksi data	59
J. Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data	60
K. Alur Penelitian	60
BAB IV	64
PENYAJIAN DAN ANALISIS DATA	64
A. Peran BNN dalam Menerapkan <i>Agriculture Development</i> SAD UNODC melalui GDAD di Indonesia	65
Penanaman Tanaman Komoditi Unggulan.	66
B. Peran BNN dalam Menerapkan <i>Basic Infrastructure</i> SAD UNODC Melalui GDAD di Indonesia	72

1. Berdirinya pabrik penetasan telur di Seuliemeum, Aceh Besar.	73
2. Pembangunan akses jalan dan sarana prasarana.	75
3. Pembangunan Program Cetak Sawah.	75
4. Pengembangan Kawasan <i>Pilot Project</i> untuk Agrowisata.	75
5. Pembangunan Menara Pandang dan Akses Jalan.	76
C. Peran BNN dalam Menerapkan <i>Community Development</i> SAD UNODC Melalui GDAD di Indonesia	78
Kerjasama BNN dan PT. Japfa Comfeed Indonesia dalam memberdayakan masyarakat.	78
D. Peran BNN dalam Menerapkan <i>Education</i> SAD UNODC Melalui GDAD di Indonesia	82
1. Pelaksanaan <i>Life skill</i> Teknis Keterampilan Hidup.	83
2. Pelaksanaan Pembinaan Kelompok Tani.	85
3. Pemberian pelatihan kewirausahaan bagi KIPAN.	86
E. Peran BNN dalam Menerapkan <i>Environmental Protection</i> SAD UNODC Melalui GDAD di Indonesia	88
1. Pemberian Hutan Produksi.	88
2. Pembinaan Kelompok Guna Peningkatan Kesejahteraan.	89
3. Penanaman Kembali Hutan Pada Wilayah Bantaran Sungai Agusen.	89
4. Pendampingan Penyuluh Pertanian.	89
F. Peran BNN dalam Menerapkan <i>Gender Equality</i> SAD UNODC Melalui GDAD di Indonesia	91
1. Pelatihan <i>Life skill</i> pada wanita.	93
2. Penanaman Komoditi Alternatif.	93
G. Peran BNN dalam Menerapkan <i>Health</i> SAD UNODC Melalui GDAD di Indonesia	95
1. Pelaksanaan Rehabilitasi.	95

2. Pelatihan <i>Life Skill</i> Gerakan Hidup Sehat	96
H. Peran BNN dalam Menerapkan <i>Improve Markets</i> SAD UNODC Melalui GDAD di Indonesia	97
1. Kerja sama BNN Melalui Kementerian Luar Negeri dan KBRI serta Kedubes RI untuk Austria	98
2. Kerja sama BNN melalui Kementerian Luar Negeri, KBRI dan Pemerintah Kabupaten Gayo Lues dalam Promosi Kopi Gayo.	98
3. Pemberian Fasilitas Pemasaran Online.	100
4. Pemberian Pelatihan serta Pembekalan Khusus.	100
5. Investasi dari PT. Kopi Jenderal.	101
I. Peran BNN dalam Menerapkan <i>Security Role of Law</i> SAD UNODC Melalui GDAD di Indonesia	102
1. Pelaksanaan Operasi Eradikasi Ganja.	104
2. Pengungkapan Tersangka Kasus Narkotika.	105
3. Pemenjaraan Pengedar Narkotika.	105
4. Penuntutan Hukuman Mati.	106
BAB V	118
KESIMPULAN DAN SARAN	118
DAFTAR PUSTAKA	121

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Seiring berkembangnya arus globalisasi yang dibuktikan dengan berkembang pesatnya teknologi, kemudahan transportasi, perkembangan ekonomi dunia, serta munculnya tatanan kehidupan baru dalam berbagai dimensi selain membawa dampak positif bagi masyarakat dunia namun juga membawa dampak negatif, salah satu contohnya adalah isu *Transnational Organized Crime* (TOC). Kejahatan transnasional atau *Transnational Organized Crime* (TOC) merupakan kejahatan lintas negara yang terorganisir lintas batas negara dan dapat berdampak besar pada penurunan rasa aman dalam kehidupan bermasyarakat suatu negara. Kejahatan ini juga merongrong keamanan yang berpotensi mengganggu kedaulatan serta mengancam stabilitas pembangunan ekonomi suatu negara.¹ Salah satu bentuk kejahatan lintas batas negara adalah *Drugs Trafficking* atau perdagangan narkoba.

Tingginya angka *Drugs Trafficking* disebabkan oleh faktor perekonomian suatu negara serta strategis kawasan negara seperti contoh pada negara Myanmar, Myanmar menduduki grafik tertinggi pada tahun 2013 sebagai produksi opium. Hal tersebut disebabkan karena negara Myanmar berada pada titik kemiskinan dan instabilitas akibat tingginya kasus korupsi yang dihadapi oleh Myanmar. Kasus tersebut yang menjadikan para petani kembali membudidayakan tanaman opium

¹ Jainah, Z. O. (2013). Kejahatan Narkoba Sebagai Fenomena Dari Transnational Organized Crime. *PRANATA HUKUM Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung*. Diambil kembali dari <https://doi.org/10.19109/nurani.v17i2.1192>

secara ilegal.² Dengan budidaya tanaman opium tersebut, para petani di negara Myanmar memiliki pendapatan yang meningkat dengan penghasilan yang lebih banyak lagi.

Pada tahun 1997, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mendirikan sebuah Organisasi Internasional yang bergerak dalam memerangi kejahatan transnasional seperti terorisme, *Human Trafficking*, *Money Laundering* serta *Drugs Trafficking*. Organisasi Internasional tersebut adalah *United Nations Office on Drugs and Crime* atau UNODC.³ Berfokus pada pembahasan *Drugs Trafficking*, UNODC dibentuk dengan tujuan yang bergerak serta membantu memerangi kejahatan narkoba di beberapa negara di dunia, seperti membentuk kerjasama dengan negara yang bersangkutan, menciptakan suatu program dalam adanya problematika. UNODC berperan sangat penting bagi negara yang memiliki problem *Drugs Trafficking*. Dalam tugasnya bidang *Drugs Trafficking*, UNODC juga memiliki beberapa program yang bertujuan untuk memutus rantai serta mengentaskan suatu negara dari permasalahan narkoba.

Program dari UNODC sendiri adalah yang pertama *Global SMART Programme*, dalam *Global SMART Programme* dibuat dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan melalui peningkatan kapasitas negara-negara anggota serta bertujuan melakukannya dengan membantu negara-negara anggota untuk

² Candra Yanua rizki, Peranan Laos, Myanmar, dan Thailand dalam Menangani Penyalahgunaan Produksi dan Perdagangan Opium di Kawasan Segitiga Emas. *Journal of International Relations, Volume 2, Nomor 2, Tahun 2016, hal. 104-108*. Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Diponegoro.

³ United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC). About the United Nations Office on Drugs and Crime. Diakses melalui <https://www.unodc/en/about-unodc/index.html?ref=menutop> pada 15 februari 2022.

mengelola, menghasilkan, menganalisis serta melaporkan informasi obat-obatan terlarang, serta menerapkan pengetahuan berbasis bukti ilmiah untuk merancang kebijakan program. Pada intinya, *Global SMART Programme* dijalankan agar menjadi suatu wadah penelitian serta analisis terhadap perkembangan narkoba diantara negara-negara anggotanya. Dengan hasil penelitian tersebut nantinya akan menjadi rujukan dalam menyusun strategi untuk membantu negara-negara anggotanya. Program ini sangat membantu negara-negara anggota dalam menganalisis tren perkembangan narkoba di dunia internasional.⁴ *Global SMART Programme* telah memberikan kapasitas 11 negara di Asia Timur dan Tenggara yaitu meliputi Brunei Darussalam, Kamboja, China, Indonesia, Laos, Malaysia, Myanmar, Filipina, Singapura, Thailand serta Vietnam.⁵

Kedua adalah *Country Programme, United Nations Office on Drugs and Crime* (UNODC) telah memberikan kontribusi terhadap pencapaian keamanan dan keadilan bagi semua dengan membuat dunia lebih aman dari masalah narkoba, kejahatan, korupsi maupun terorisme. Hal tersebut menjadi platform UNODC untuk membantu negara yang mempunyai permasalahan narkoba, Salah satunya negara Indonesia. UNODC telah menyetujui program dari Indonesia pada tanggal 31 Januari 2012 yang untuk dilaksanakan pada tahun 2012-2015. Melalui program tersebut UNODC dapat memperluas dukungannya secara berkelanjutan, melembagakan hubungannya dengan mitra pemerintah Indonesia melalui pengaturan tata kelola serta memanfaatkan sistem manajemen berbasis hasil yang

⁴ The Global Synthetics Monitoring: Analyses, Reporting and Trends Programme- (Global SMART Programme), diakses melalui

<http://www.unodc.org/southeastasiaandpacific/en/smart.html> pada 07 Juli 2022.

⁵ Ibid.

efektif. Pada tanggal 28 Mei 2012 *Country Programme* diluncurkan serta ditandatangani oleh Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional (BAPPENAS) dan UNODC di Jakarta.⁶ Program yang diluncurkan oleh UNODC sendiri meliputi *Technical Assistance and Advise, Monitoring and Reporting*, serta *Financing*.

Ketiga adalah *The Pilot Project* dan Rehabilitasi Berbasis Konservasi Alam. Pada Maret 2012, UNODC bersama 11 badan PBB mengeluarkan kebijakan bersama (*joint statement*) dimana kebijakan tersebut menyerukan negara-negara anggota dari UNODC untuk menghapus sistem penahanan bagi pengguna narkoba.⁷ UNODC di Indonesia *Programme Office* meluncurkan program terbaru guna mendukung pemerintah Indonesia dalam mempromosikan inisiatif ini.⁸ Program tersebut dibentuk dengan tujuan agar meningkatkan agenda reformasi peradilan pidana menjadi rehabilitasi.

Keempat, adalah Program *Alternative Development*, Sejak tahun 2000-an Badan Dunia PBB urusan Narkoba dan Kejahatan *United Nations Office on Drug and Crime* atau UNODC telah menerapkan program *Alternative Development* untuk seluruh dunia yang dikira memiliki problematika dengan tanaman narkoba. Program tersebut didesain sebagai program yang terintegrasi, menyeluruh dan berkelanjutan dalam mengatasi problem narkoba langsung ke akar masalahnya, yaitu tanaman narkoba dan pendekatan sosial, budaya,

⁶ UNODC Country Programme for Indonesia 2012-2015, 2.

⁷ Indonesia. "Indonesia Prosecutors urged to send people who use drugs to rehabilitation, not prison." Diakses pada 14 Juli 2022. <http://unodc.org/indonesia/en?2013/10/people-who-use-drugs/story.html>.

⁸ Indonesia. "Promoting Alternative to Imprisonment for Convicted Drug Users in Indonesia." Diakses pada 14 Juli 2022. <http://www.unodc.org/indonesia/en/2015/04/drug-users/story.html>.

ekonomi, ekologi, sinergi dan keamanan yang berguna untuk meningkatkan kesejahteraan dan pendapatan masyarakat. Program ini telah dijalankan di beberapa negara seperti Peru, Colombia, Thailand, Afghanistan dan Laos. Program *Alternative Development* diklaim sukses dalam menurunkan produksi narkoba di negara tersebut.⁹ Program *Alternative Development* dapat diartikan sebagai suatu upaya yang dilakukan oleh organisasi dalam memerangi kejahatan narkoba dengan memberikan pembangunan yang alternatif di tempat penanaman narkoba dengan mempertimbangkan aspek pertumbuhan ekonomi komunitas serta sosial budaya.¹⁰

Kejahatan narkoba di Indonesia saat ini bisa dibilang cukup memprihatinkan, dengan dibuktikan dengan penyalahgunaan narkoba di Indonesia terus mengalami peningkatan dari tahun per tahun, seperti selama periode 2019-2021, angka prevalensi penyalahgunaan narkoba meningkat sebesar 0,15 dari 1,80% di tahun 2019 menjadi 1,95% di tahun 2021, angka kenaikan tersebut cukup besar jika dilihat dari jumlah penduduk, penyalahgunaan narkoba yang diperkirakan sebesar 3.662.646 orang penduduk di usia 15-64 tahun selama setahun terakhir meningkat sebanyak 243.458 orang dibanding tahun 2019. Sementara itu, angka prevalensi penyalahgunaan narkoba pernah pakai meningkat sebanyak 0,17% dari 2,4% di tahun 2019 menjadi 2,75%. Apabila dilihat dari nilainya, pada tahun 2021 diperkirakan naik sebanyak 4.827.616 penduduk usia

⁹ Badan Narkotika Nasional (BNN) Republik Indonesia. Grand Design Alternative Development Dalam Rangka Pengentasan Produksi Ganja dan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat di Provinsi Aceh (Tahun 2016-2025) hlm 8.

¹⁰ Ibid.

15-64 tahun pernah memakai narkoba. Jumlah tersebut lebih banyak dibandingkan jumlah pada tahun 2019.¹¹

Saat ini Indonesia bukan hanya menyanggah negara yang menjadi konsumen dalam kejahatan narkoba yang dimana sebelumnya Indonesia hanyalah negara yang menjadi tempat pemasaran dari kejahatan narkoba, akan tetapi saat ini Indonesia sudah menjadi salah satu negara produksi bentuk kejahatan narkoba seperti memproduksi narkotika dan obat-obatan terlarang lainnya.¹² Indonesia merupakan salah satu negara dari beberapa negara di Asia khususnya pada wilayah ASEAN yang menjadi jalur dari kegiatan kejahatan narkoba, hal ini disebabkan oleh kondisi geografis, dimana Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia dengan wilayah perairan yang terbuka. Dengan kondisi tersebut membuat Indonesia menjadi negara yang sangat rawan terhadap berbagai upaya aksi kejahatan narkoba seperti upaya penyelundupan, termasuk narkoba oleh sindikat internasional. Penyelundupan narkoba terjadi dikarenakan wilayah perbatasan Indonesia paling mudah untuk dimasuki, contohnya dari negara Malaysia ke wilayah Kepulauan Riau, dengan ditambah lagi dengan keterbatasannya jumlah aparat keamanan Indonesia yang bertugas melaksanakan pengawasan di lapangan.

Negara Indonesia telah memasuki fase darurat terkait ancaman non militer yang mengancam pertahanan negara. Bahkan pada kasus Covid-19 juga

¹¹ Badan Narkotika Nasional (BNN), Survei Nasional Penyalahgunaan Narkoba Tahun 2021, Pusat Penelitian, Data, dan Informasi Badan Narkotika Nasional 2022, Hal 67.

¹² Badan Narkotika Nasional (BNN) Republik Indonesia. Grand Design Alternative Development Dalam Rangka Pengentasan Produksi Ganja dan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat di Provinsi Aceh (Tahun 2016-2025) hlm 97.

dijadikan tempat pusat transaksi ekonomi menjadi sepi akan pembeli, disamping terdapat pelaku usaha dengan melakukan strategi pemasaran baru bagi produknya, akan tetapi juga terdapat pelaku usaha yang terpaksa merumahkan tenaga kerjanya sehingga banyak orang yang kehilangan mata pencaharian. Seiring adanya kebijakan pemerintah untuk dilarang berkerumun, pemerintah juga membatasi orang yang ingin keluar masuk wilayah. Dalam kondisi ini, membuat orang tak lagi bebas dalam keluar masuk suatu wilayah. Walaupun sudah diadakanya kebijakan tersebut, ironisnya narkoba tetap menemukan jalur peredaranya sendiri hingga ke tangan pemakainya.¹³ Ancaman kejahatan narkoba atau *Drugs Trafficking* merupakan ancaman nyata yang dihadapi oleh negara Indonesia. Ancaman kejahatan narkoba banyak memberikan dampak negatif, dari segi kesehatan, ekonomi, sosial serta keamanan. Pada era Pandemi Covid-19, *Drugs Trafficking* mengalami peningkatan yang amat pesat, hal ini dibuktikan dengan kasus kejahatan narkoba semakin meningkat dengan berhasil disitanya barang bukti 46 kilogram sabu-sabu dan 65.000 butir ekstasi di tahun 2020 oleh Ditresnarkoba Polda Metro dan Polres Jakarta.¹⁴ Lalu pada tahun 2021 dalam kurun waktu 3 bulan saja, BNN telah menyita sebanyak 808,67 kilogram narkoba jenis sabu dan ganja sebanyak 3.462,75 kilogram.¹⁵

¹³ BNN Contributor. Narkoba di Tengah Pandemi Corona. 2021. Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Selatan. Diakses melalui <https://sumsel.bnn.go.id/narkoba-tengah-pandemi-corona/> pada 7 Juni 2022.

¹⁴ Sheila Natalia, Sahadi Humaedi, 2020, Bahaya Peredaran Napza pada Masa Pandemi Covid-19 di Indonesia, e ISSN: 2581-1126, p ISSN: 2442-448x, Vol 7, No: 2, hal 388.

¹⁵ Kementerian Sosial Republik Indonesia, 2021, Penyalahgunaan Napza Tetap Tinggi Selama Pandemi, Penyuluh Sosial Dituntut Lebih Responsif Edukasi Masyarakat. Diakses melalui <https://kemensos.go.id/penyalahgunaan-napza-tetap-tinggi-selama-pandemi-penyuluh-sosial-dituntut-lebih-responsif-edukasi-masyarakat> pada 03 Januari 2023.

Adanya peningkatan kejahatan narkoba baik dari segi perdagangan, konsumsi maupun peredaran gelap narkoba di Indonesia membuktikan bahwa negara Indonesia merupakan salah satu negara tujuan kejahatan narkoba dengan sindikat Internasional. Jumlah peningkatan tersebut disinyalir karena jumlah narkoba yang semakin meningkat serta pertumbuhan perekonomian Indonesia yang dapat dikategorikan baik. Meskipun begitu, jumlah penduduk terbesar di Asia Tenggara juga memberikan daya tarik tersendiri terhadap Indonesia sebagai negara tujuan akan kejahatan narkoba.¹⁶ Pada umumnya, masalah kejahatan narkoba di Indonesia terdapat dalam tiga kategori yang saling berkaitan. Pertama, jenis narkoba yang beredar, kedua adalah lalu lintas peredaran dan perdagangan dan yang ketiga merupakan penyalahgunaan obat-obatan yang terlarang. Dalam memproduksi narkoba tersebut melalui proses budidaya tanaman dimana tanaman tersebut menjadi bahan baku utama untuk memproduksi obat-obatan terlarang seperti tanaman koka sebagai bahan utama pembuatan *cocain*, *opium poppies* sebagai bahan baku utama *heroin* serta *cannabis* yang dapat diolah menjadi hanhish dan marijuana. Setelah barang baku tersebut diolah menjadi obat-obatan terlarang, selanjutnya akan diperdagangkan serta untuk dikonsumsi.¹⁷

¹⁶ Fatima, M. S. (2021). Sinergitas Badan Narkotika Nasional Dengan Pemerintah Daerah Dalam Menghadapi Ancaman NonMiliter Kejahatan Terorganisir Transnasional Peredaran Gelap Narkoba di Kalimantan Barat Untuk Pertahanan Negara. *Jurnal Ilmiah Kajian Keimigrasian* , 99.

¹⁷ Fadillah, R. S. (2015). Upaya UNODC (United Nations Office on Drugs and Crime) Dalam Menanggulangi Permasalahan Narkoba di Indonesia. *JOM Fisip Volume 2* , 3.

Indonesia telah melakukan kerjasama dengan UNODC pada awal 2007, dimana dalam kerjasama ini bertujuan untuk membantu pemerintah Indonesia dalam menanggulangi isu kejahatan terorganisir salah satunya adalah *Drug Trafficking*. Hal tersebut dapat ditandai dengan kerjasama antara Badan Narkotika Nasional (BNN) yang merupakan sebuah lembaga Pemerintah non Kementrian yang bergerak dalam bidang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) dengan UNODC dalam memerangi kejahatan narkoba di Indonesia dan diharapkan agar membawa dampak yang positif serta jalan yang cerah dalam memberantas narkoba di Indonesia. Di Indonesia sendiri juga pernah menerapkan hukuman mati bagi pelaku narkoba, akan tetapi penerapan hukuman mati tersebut diklaim sama sekali tidak terbukti dalam memberantas peredaran narkoba di Indonesia bahkan penerapan hukuman mati justru pelanggaran atas hak hidup.¹⁸ Pemerintah harus memberlakukan moratorium dalam kebijakan hukuman mati ini, hal tersebut dikarenakan sebelumnya belum terdapat kerjasama antara lembaga internasional dengan lembaga lokal.

UNODC memiliki peran penting dalam penerapan *Alternative Development* di Indonesia, yaitu UNODC melaksanakan program tersebut dengan menunjuk negara Thailand untuk datang ke Indonesia pada tahun 2008 sebagai contoh payung besar bagi Indonesia karena sebelumnya Thailand diklaim

¹⁸ Kristian Erdianto, 2016, Hukuman Mati Tak Turunkan Angka Pengguna Narkoba, Kompas.com, diakses melalui <https://nasional.kompas.com/read/2016/08/01/06050081/Hukuman.Mati.Tak.Turunkan.Angka.Pengguna.Narkoba?page=all> pada 15 Juli 2022.

berhasil dalam pelaksanaan program *Alternative Development*. Dalam hal tersebut, mereka melaksanakan bantuan sarpras pertanian jagung dan pemanenan hingga pada tahun 2012 dan di klaim panen raya tersebut gagal jual, Oleh sebab itu, BNN hadir menyempurnakan dengan membuat desain baru yaitu GDAD yang tetap merujuk pada komponen *Alternative Development* UNODC dengan menggandeng banyak stakeholder yang lebih komprehensif kolaborasinya.¹⁹

Selain itu, UNODC juga memiliki peranan dalam pelaksanaan program *Alternative Development* di Indonesia yaitu pada tahun 2009, Kepala Direktur Eksekutif UNODC datang ke Lamteuba, Aceh Besar untuk meresmikan *Sustainable Alternative Livelihood Development* (SALD)²⁰, yang mana SALD merupakan bagian dari *Alternative Development* yang dirumuskan oleh UNODC. Dalam paradigma pembangunan alternatif, *Alternative Development* dibagi menjadi 2 bagian yaitu *Alternative Development Programme* (ADP) dan *Sustainable Alternative Livelihood Development* (SALD). ADP merupakan tahapan awal yaitu merubah tanaman narkotika menjadi tanaman produktif melalui program alih fungsi lahan dan juga profesi mantan petani obat-obatan terlarang. Sedangkan SALD merupakan proses perbaikan kesejahteraan melalui alternatif pendapatan melalui pertanian/non serta agrowisata.²¹

Pada tahun 2016, Indonesia melalui Organisasi Pemerintah Badan Narkotika Nasional (BNN) mengagas serta menjalankan *Grand Design*

¹⁹ Yudhi Widiarto, 2023, Wawancara BNN oleh Wulan Suci Guritno, pada 04 Januari 2023.

²⁰ Ibid.

²¹ Badan Narkotika Nasional (BNN), 2016, GRAND DESIGN *Alternative Development* Dalam Rangka Pengentasan Produksi Ganja dan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat di Provinsi Aceh (Tahun 2016-2025), 26.

Alternative Development (GDAD) yang dimana GDAD tersebut merupakan program imitasi dari program *Alternative Development* UNODC. Arah GDAD tersebut juga sejalan dengan arah kebijakan UNODC yang dimana arah tersebut berupaya memperlambat laju penyalahgunaan narkoba di seluruh dunia, dimana mana negara yang memiliki atau sebagai produsen tanaman narkoba harus diterapkan program *Alternative Development*.²² Hal tersebut menarik untuk dibahas dikarenakan GDAD merupakan tersebut juga merujuk pada komponen atau target dari UNODC sendiri atau *sustainable alternative development* (SAD) yang meliputi *Agricultural Development, Basic Infrastructure, Community Development, Enviromental Protection, Gender Equality, Health, dan Improved Markets*.²³ Namun SAD tersebut juga tidak semua tercapai dalam GDAD BNN sendiri. Pengalihan fungsikan lahan petani ganja menjadi ke pertanian yang lebih alternatif adalah salah satu bentuk dari pengimplementasian dari program *Alternative Development* sendiri. dengan menggunakan program *Alternative Development* oleh Badan Narkotika Nasional (BNN) dan diharapkan program tersebut membawa kemajuan bebas narkoba di negara Indonesia.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan paparan latar belakang, maka penulis dapat merumuskan pokok permasalahan yaitu “ Bagaimanakah peran Badan Narkotika Nasional

²² Badan Narkotika Nasional (BNN), 2016, GRAND DESIGN *Alternative Development* Dalam Rangka Pengentasan Produksi Ganja dan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat di Provinsi Aceh (Tahun 2016-2025).

²³ United Nations Office on Drugs and Crime, *Alternative Development*, diakses melalui <https://www.unodc.org/unodc/es/alternative-development/our-work.html> pada 29 September 2022.

(BNN) dalam menjalankan Program “*Alternative Development*” *United Nations Office on Drugs and Crime* (UNODC) di Indonesia pada tahun 2019-2022?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pokok rumusan masalah yang telah peneliti uraikan, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana peran Badan Narkotika Nasional (BNN) dalam menjalankan Program “*Alternative Development*” *United Nations Office on Drugs and Crime* (UNODC) di Indonesia pada tahun 2019-2022.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Akademis

Melalui penelitian ini, peneliti berharap agar dapat memberikan dedikasi serta manfaat dalam Ilmu Hubungan Internasional. Terlebih juga berharap penelitian ini dapat menambah wawasan, sumber referensi bagi peneliti lain terkait peran Badan Narkotika Nasional (BNN) dalam menjalankan Program “*Alternative Development*” *United Nations Office on Drugs and Crime* (UNODC) di Indonesia pada tahun 2019-2022.

2. Manfaat Praktis

Dalam penelitian ini, peneliti berharap dapat memberikan manfaat serta masukan yang dapat membantu praktik penyelesaian isu bagi semua pihak baik para akademisi, maupun masyarakat luas terkait penjelasan peran Badan Narkotika Nasional (BNN) dalam menjalankan

Program “*Alternative Development*” *United Nations Office on Drugs and Crime* (UNODC) di Indonesia pada tahun 2019-2022.

E. Tinjauan Pustaka

Penelitian ini berjudul Peran Badan Narkotika Nasional (BNN) dalam menjalankan Program “*Alternative Development*” *United Nations Office on Drugs and Crime* (UNODC) di Indonesia pada tahun 2019-2022. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan penelitian terdahulu yang dibagi kedalam 3 kategori yaitu penelitian terdahulu terkait strategi pencegahan *Drugs Trafficking*, penelitian terdahulu terkait implementasi *Alternative Development* di Negara yang terdampak narkoba, serta penelitian terdahulu terkait implementasi *Alternative Development* di Indonesia.

Dalam kategori pertama yaitu Penelitian terdahulu terkait strategi pencegahan *Drugs Trafficking*.

Skripsi yang berjudul Upaya Pemerintah Indonesia Dalam Menangani Kejahatan Transnasional (Penyelundupan Narkoba) di Daerah Perbatasan Indonesia-Malaysia di Kalimantan oleh M. Gagah Dirgantara. Dijelaskan dalam jurnal tersebut bahwa *United Nations Office on Drugs and Crime* (UNODC) membantu permasalahan kejahatan narkoba di Indonesia adalah melalui *Country Programme*. *Country Programme* merupakan program kerja oleh UNODC dimana program tersebut dibagi menjadi lima sub program kerja. Yang *pertama*, Kejahatan Transnasional dan perdagangan gelap, *kedua*, anti korupsi, *ketiga*, anti terorisme, *keempat* keadilan, dan kelima, adalah masalah penanganan narkoba dan

permasalahan HIV AIDS dengan nilai program yang mencapai lebih dari US \$ 27 juta. Dari kelima sub program kerja tersebut yang bersangkutan dalam isu kejahatan narkoba adalah sub program kerja pertama dan kelima.²⁴ Adapun persamaan dengan skripsi ini adalah sama-sama membahas upaya UNODC dalam menangani *Drugs Trafficking* di Indonesia, dan perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian ini adalah penelitian tersebut fokus pada *Country Programme*, namun pada skripsi ini lebih berfokus pada program *Alternative Development*.

Skripsi yang ditulis oleh Cerry Praningsih dengan judul Politik Keamanan Pemerintah Dalam Menangani Drug Trafficking di Indonesia 2012-2016. Dalam penelitian tersebut bahwasanya berisi tentang masalah *Drug Trafficking* yang terbagi menjadi tiga kategori yang saling berkaitan yaitu masalah produksi obat secara ilegal, perdagangan secara ilegal serta penggunaan yang secara ilegal juga. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, menjelaskan serta mendeskripsikan tentang apa saja politik keamanan yang telah dilakukan pemerintah Indonesia dalam menangani *Drug Trafficking* selama tahun 2012 sampai 2016. Dari penelitian ini juga menyimpulkan bahwasanya politik keamanan Pemerintah Indonesia dalam menangani *Drug Trafficking* adalah melalui peningkatan kerja BNN, *Prevention* atau Pencegahan, Penegakan Hukum, dan Kerjasama Internasional.²⁵ Berbeda pada skripsi ini yang menitikberatkan mengenai apa saja bentuk pengimplementasian program *Alternative Development* sebagai program

²⁴ Gagah Dirgantara, "Upaya Pemerintah Indonesia Dalam Menangani Kejahatan Transnasional (Penyelundupan Narkoba) di Daerah Perbatasan Indonesia-Malaysia di Kalimantan" (Hubungan Internasional, FISIP Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2017).

²⁵ Cerry Praningsih, "Politik Keamanan Pemerintah Dalam Menangani Drug Trafficking di Indonesia Tahun 2012-2016" (Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Sumatera Utara, 2018).

yang dijalankan untuk menanggulangi *Drug Trafficking* di Indonesia pada tahun 2019-2022.

Skripsi yang berjudul Implementasi Kerjasama Penanganan Kasus Penyelundupan Narkotika Antara Pemerintah Indonesia dan Malaysia di Provinsi Jawa Timur Tahun 2015-2017 yang ditulis oleh Fathimah Ma'rufah. Dalam skripsi tersebut dijelaskan bahwasanya berfokus pada kerjasama yang dilakukan antara Indonesia dengan Malaysia, dimana kerjasama antara kedua negara tersebut sangatlah penting dalam menangani kasus penyelundupan narkotika terutama pada daerah Jawa Timur. Karena, dalam peredaranya, provinsi Jawa Timur merupakan salah satu lokasi pemasaran yang sangat strategis dikarenakan wilayah Jawa Timur sendiri merupakan wilayah yang terdiri dari 29 kabupaten, 9 kota pada tahun 2015 yang tercatat 39,29 juta penduduk pada tahun 2017 dimana dari 2,20 persen penduduk tersebut adalah pengguna narkotika. Pada tahun 2015 provinsi Jawa Timur menduduki peringkat pertama dengan jumlah pengguna narkoba dibandingkan provinsi lain yang berada di Jawa Timur serta didukung pula oleh gaya hidup masyarakat yang sebagian besar tinggal di daerah perkotaan sehingga menyebabkan permintaan narkotika akan terus meningkat setiap tahunnya.²⁶ Berbeda pada skripsi ini, skripsi ini berfokus pada peran BNN dalam menjalankan program *Alternative Development* dari UNODC, serta juga terdapat kesamaan pada penelitian tersebut dengan skripsi ini yaitu sama-sama menggunakan metode kualitatif deskriptif sebagai metode penelitian.

²⁶ Fathimah Ma'rufah, "Implementasi Kerjasama Penanganan Kasus Penyelundupan Narkotika Antara Pemerintah Indonesia dan Malaysia di Provinsi Jawa Timur Tahun 2015-2017" (FISIP UIN Sunan Ampel Surabaya, 2019).

Artikel yang berjudul Kerjasama Indonesia-Interpol Dalam Menangani Isu Penyelundupan Narkoba di Wilayah Perbatasan Indonesia oleh Sara Gabriella. Dalam jurnal tersebut menganalisis bagaimana bentuk upaya Interpol dalam pemberantasan isu penyelundupan narkoba di Indonesia dengan melakukan kerjasama. Kepentingan Indonesia dapat ditelaah melalui beberapa kebijakan yang dipilih dan telah dijalankan oleh pihak pemerintah dalam menangani isu penyelundupan narkoba. Dalam pasal 80 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika di Indonesia, tertulis bahwa BNN melalui penyidik dapat meminta bantuan Interpol Indonesia (NCB-Interpol) atau juga disebut dengan instansi penegak hukum negara lain untuk melakukan pencarian, penangkapan, dan penyitaan barang bukti luar negeri. Kebijakan ini diaplikasikan oleh NCB-Indonesia dengan BNN melalui MoU antara Polri dengan BNN terkait bentuk kerjasama dalam mewujudkan Indonesia bebas narkoba. Penelitian ini menggunakan konsep Rezim Internasional dalam melihat bagaimana Rezim membentuk usaha serta mengupayakan Indonesia dalam menangani kasus penyelundupan narkoba.²⁷ Dari keterangan tersebut, dapat ditarik perbedaan antara penelitian tersebut dengan skripsi ini, yaitu terletak pada objek penelitian dan konsepnya.

Skripsi yang berjudul Kebijakan ASEAN Dalam Penanganan *Drugs Trafficking* di Kawasan Segitiga Emas (Myanmar, Thailand, Laos) Periode 2013-2016 yang ditulis oleh Nurul Isnaini. Dalam skripsi tersebut dijelaskan bahwa

²⁷ Sara Gabriella, "Kerjasama Indonesia-Interpol Dalam Menangani Isu Penyelundupan Narkoba di Wilayah Perbatasan Indonesia," *Journal of International Studies*, Hubungan Internasional Universitas Indonesia (2019), doi: 10.24198/intermestic.v3n2.4

ASEAN sebagai organisasi kawasan dianggap memiliki peran yang sangat penting dalam menyelesaikan masalah kejahatan narkoba di kawasan. Tujuan dalam skripsi tersebut adalah untuk mengetahui kira-kira bagaimana kebijakan ASEAN dalam menangani *Drugs Trafficking* pada kawasan segitiga emas dan juga untuk mengetahui hambatan-hambatan yang ada, berbeda dengan skripsi yang saat ini yang hanya berfokus pada salah satu negara kawasan segitiga emas yaitu Indonesia dimana obyek penelitian juga berfokus pada UNODC, salah satu Organisasi Internasional yang dibawah oleh PBB yang bergerak pada bidang kejahatan transnasional. Skripsi tersebut juga menggunakan konsep Neoliberal Institusionalisme dan Organisasi Internasional.²⁸ Berbeda dengan skripsi ini yang menggunakan konsep *Alternative Development* sebagai konsep dalam penelitian.

Pada tinjauan pustaka kategori strategi pencegahan *Drug Trafficking* diatas dapat disimpulkan bahwasanya terdapat cara yang berbeda-beda dalam menyikapi pencegahan narkoba, dan pada kategori diatas belum terdapat strategi program *Alternative Development* dalam menaggulangi isu narkoba khususnya di Indonesia, maka dari itu skripsi ini menitik beratkan Program *Alternative Development* sebagai salah satu program UNODC dalam menanggulangi problem narkoba di Indonesia.

Kategori kedua, penelitian terdahulu terkait Implementasi *Alternative Development* di Negara yang terdampak Narkoba.

²⁸ Nurul Isnaini, "Kebijakan ASEAN Dalam Penanganan Drugs Trafficing di Kawasan Segitiga Emas (Myanmar, Thailand, Laos) Periode 2013-2016" (Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2019).

Artikel yang berjudul *Development Not Drug Control: The Evolution of Counter Narcotic Efforts in Thailand*, yang ditulis oleh M.L Dispanadda Diskul dkk dijelaskan bahwasanya Thailand merupakan negara penghasil opium terbesar di dunia. Dalam jurnal ini menjelaskan tentang strategi yang berkembang di Thailand dalam memecahkan budidaya opium ilegal dengan cara pengentasan kemiskinan dan pembangunan nasional dengan jangka panjang. Pada tahun 2011, Thailand bersama dengan pemerintah Peru dan UNODC menjadi tuan rumah lokakarya Internasional dan konferensi *Alternative Development* (ICAD) yang berkontribusi pada pembentukan prinsip-prinsip panduan PBB tentang *Alternative Development*. Dalam hal ini, upaya Thailand dalam melawan budidaya opium berlangsung selama tiga dekade, melibatkan perencanaan jangka panjang dan investasi skala besar dalam pengembangan dataran tinggi, membutuhkan komitmen yang kuat dari lembaga pemerintah lokal maupun Internasional. Prinsip yang dilakukan oleh Thailand melalui implementasi proyek pengembangan mata pencaharian alternatif yang berkelanjutan diharapkan mampu mengentaskan kemiskinan dan memberikan solusi untuk membudidayakan obat untuk negara lain.²⁹ Berbeda pada skripsi ini, yang membahas mengenai strategi Indonesia yang bekerjasama dengan UNODC hingga pada lembaga pemerintah Indonesia Badan Narkotika Nasional meluncurkan *Grand Design Alternative Development* (GDAD) sebagai strategi untuk menuju Indonesia bersih narkoba.

²⁹ M.L. Dispanadda Diskul Dkk, "Policy Commentary, Development Not Drug Control: The Evolution of Counter Narcotic Efforts in Thailand," *Journal of Illicit Economies and Development* 1 (1), pp. (2019): 80-88, DOI: <https://doi.org/10/31389/jied.16>.

Skripsi yang ditulis oleh Rm Wahyu Ramadhan Indroputro yang berjudul *Peran United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC) dalam Menurunkan Produksi Opium di Myanmar pada Tahun 2014-2017* dijelaskan bahwa dalam problem narkotika di Myanmar, UNODC juga menggunakan metode *Alternative Development* dengan cara mengenalkan tanaman kopi kepada para petani di Negara Myanmar bagian Shan dengan tujuan mengurangi kecenderungan mereka dalam menanam opium ilegal yang diklaim mereka sebagai mata pencaharian. UNODC dengan cepat dalam mendorong para petani Myanmar di bagian Shan dimana pada kawasan tersebut adalah kawasan dengan jumlah produksi terbesar penghasil opium. Substansi tanaman kopi ini bertujuan agar mengubah perilaku ekonomi para petani karena tanaman kopi dianggap lebih menjamin perekonomian. Respon masyarakat mengenai mata pencaharian alternatif ini juga sangat positif. UNODC tetap menjamin pendapatan masyarakat Myanmar akan meningkat dan bertahan.³⁰ Pada keterangan penelitian tersebut bisa ditarik perbedaan dengan skripsi ini, jika penelitian tersebut berfokus strategi Myanmar dalam menggunakan metode *Alternative Development* dengan cara mengenalkan tanaman kopi pada petani Myanmar agar mengurangi kecenderungan mereka dalam budidaya tanaman opium, maka pada skripsi ini lebih membahas mengenai pada lembaga pemerintah Indonesia yang meluncurkan GDAD dengan cara mengalih profesikan para petani ganja pada usaha yang legal dan lebih produktif, namun juga terdapat persamaan pada penelitian tersebut dengan skripsi ini, yaitu sama sama membahas mengenai program *Alternative Development*.

³⁰ Rm Wahyu Ramadhan Indroputro, "Peran United Nations Office on Drugs and Crime (Unodc) dalam Menurunkan Produksi Opium di Myanmar pada Tahun 2014-2017" (2018)

Skripsi yang berjudul Peranan *The United Nations Office on Drugs and Crime* (UNODC) Dalam Menangani Budidaya Opium di Laos, ditulis oleh Muhammad Ismail Ash Shiddiq dijelaskan bahwasanya pihak UNODC telah memberikan proyek alternatif yang bernama *Phongsaly Alternative Development Find Project* (PADF) dimana proyek tersebut merupakan proyek yang berlangsung lama dan diklaim berhasil. Keberhasilan proyek dari UNODC ini terbukti pada pendapatan rumah tangga masyarakat yang terus meningkat melalui kegiatan *Income Generation & Marketing* (IGM) yaitu kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan penggunaan pribadi menjadi barang yang bernilai jual tinggi. Keberhasilan dari kegiatan ini berdampak bagi masyarakat terkhusus para petani opium yang sebelumnya mereka bergantung pada tanaman opium dalam mata pencahariannya yang pada akhirnya para petani tersebut memiliki kemampuan dalam membuat kerajinan tangan seperti tas tradisional, pakaian dan lain sebagainya yang bernilai jual tinggi.³¹ Hal tersebut bisa dikatakan merupakan bentuk dari proyek yang dirilis oleh UNODC tersebut. Berbeda dengan skripsi, pada skripsi ini lebih berbeda pada negara yang menerapkan program *Alternative Development*, pada skripsi ini memilih negara Indonesia sebagai negara yang menerapkan program *Alternative Development* yang dimana program tersebut banyak di implementasikan salah satunya adalah mengalihkan petani obat-obatan narkotika ke pertanian yang lebih alternatif.

³¹ Muhammd Ismail Ash Shiddiq, "Peranan The United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC) Dalam Menangani Budidaya Opium di Laos" (Departemen Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Hasannudin, 2015)

Pada tinjauan pustaka kategori Implementasi *Alternative Development* di Negara yang terdampak Narkotika dipaparkan bahwasanya peneliti mengacu pada penelitian terdahulu mengenai implementasi program *Alternative Development*. Perbedaan pada skripsi ini, peneliti memilih negara Indonesia sebagai objek diterapkannya program *Alternative Development* tersebut.

Kategori ketiga, penelitian terdahulu terkait implementasi *Alternative Development* di Indonesia.

Tesis yang berjudul Evaluasi Perencanaan Program *Alternative Development* Alih Fungsi Lahan Ganja di Mukim Lamteuba, Kec. Seulimeum, Kab. Aceh Besar, NAD oleh Agung Suseno. Dalam penelitian tersebut, peneliti menitikberatkan tentang evaluasi perencanaan program *Alternative Development* alih fungsi lahan ganja dimana evaluasi tersebut bertujuan untuk mengetahui apakah yang ingin dicapai bahwa program tersebut dapat mencapai tujuan yang dimana pada tahun 2012, program *Alternative Development* dilaksanakan di Mukim Lamteuba, NAD. Program ini direncanakan dengan mengalihfungsikan lahan petani ganja menjadi lahan nilam dan jabon dimana nilam dan jabon tersebut ditetapkan sebagai tanaman pengganti tanaman ganja yang ditanam oleh petani di Mukim Lamteuba, NAD. Nilam dan jabon tersebut dijadikan sebagai tanaman pengganti alternative oleh BNN karena mampu memberikan keuntungan bagi warga Mukim Lamteuba.³² Pada skripsi ini terdapat persamaan yaitu sama-sama meneliti mengenai pengimplementasian program *Alternative Development*,

³² Agung Suseno, "Evaluasi Perencanaan Program *Alternative Development* Alih Fungsi Lahan Ganja di Mukim Lamteuba, Kec. Seulimeum, Kab. Aceh Besar" (NAD. FISIP UI, 2012)

namun juga terdapat perbedaan pada skripsi ini, pada skripsi ini, peneliti membahas program *Alternative Development* yang dimana program tersebut dijalankan oleh Lembaga Pemerintah BNN yang bertujuan untuk menanggulangi narkoba pada tahun 2019-2022.

Artikel yang berjudul Kerjasama Badan Narkotika Nasional dengan *United Nations Office on Drugs and Crime* dalam Menanggulangi Penyalahgunaan Narkoba di Indonesia yang ditulis oleh Stella Simiwijaya dijelaskan bahwasanya Badan Narkotika Nasional (BNN) melakukan kerjasama dengan UNODC yang bertujuan memberantas penyalahgunaan narkoba dimana dalam kerjasama tersebut terdapat banyak permasalahan terutama karena adanya perbedaan pendapat serta kepentingan dari masing-masing pihak. Juga dijelaskan dalam jurnal tersebut terdapat bentuk-bentuk kerjasama yang dilakukan oleh BNN dengan UNODC antara lain, dengan mengadakan program pelatihan yang ditunjukkan bagi para aparat penegak hukum di Indonesia, mengadakan program Intervensi Ketahanan Keluarga Anti Narkoba, BNN bekerjasama dengan UNODC dengan mengambil inisiatif pada bidang pencegahan berbasis ilmu pengetahuan yang menjadi fokus utama BNN pada upaya pencegahan. Dalam jurnal penelitian tersebut bertujuan agar dapat mendapatkan gambaran mengenai bagaimana proses dan program kerjasama yang dilakukan oleh BNN dan UNODC dalam menanggulangi narkoba.³³ Pada jurnal tersebut memiliki persamaan dengan

³³ Stella Simiwijaya, "Kerjasama Badan Narkotika Nasional Dengan United Nations Office on Drugs and Crime Dalam Menanggulangi Penyalahgunaan Narkoba di Indonesia," *Journal of International Relations*, Faculty of Social and Political Science Pelita Harapan University (2019), https://ojs.uph.edu/index.php/JHIV/article/view/2450/pdf_2

skripsi ini, yaitu sama-sama membahas mengenai kerjasama BNN dengan UNODC, namun pada skripsi ini juga terdapat perbedaan, yaitu skripsi ini lebih menitikberatkan bahwa BNN lebih terbantu dengan adanya program *Alternative Development* dengan melihat bahwa program tersebut telah berhasil menanggulangi *Drug Trafficking* di beberapa negara yang dimana hingga pihak BNN membuat program imitasi guna menanggulangi *Drug Trafficking* di Indonesia yaitu *Grand Design Alternative Development*.

Skripsi yang berjudul Kerjasama Bilateral Badan Narkotika Republik Indonesia (BNN RI)-*Office Narcotics Control Board of Thailand* (ONCB) Dalam Program *Alternative Development* di Aceh, yang ditulis oleh Raja Arya Anugra Pratama dijelaskan, bahwasanya Indonesia dan Thailand melakukan kerjasama mengenai *Alternative Development* yang dibangun atas dasar melihat Thailand pernah melaksanakan program yang sama pada Provinsi Chiang Rai, Doi Tung, dimana Provinsi tersebut merupakan daerah yang dahulunya merupakan daerah perbukitan yang tanahnya tandus, sehingga masyarakat disana hidup dalam kemiskinan dan jauh dari pembangunan serta mereka bertahan hidup dengan budidaya opium. Oleh karena itu, dalam menyelesaikan permasalahan tersebut, Thailand menggelar project yang bernama *Doi Tung Development Project* (DSDP) yang berjalan selama 30 tahun dari tahun 1988-2017. UNODC sendiri mengakui bahwa project yang dibuat Thailand adalah sebagai wujud percontohan dalam program *Alternative Development*. Di Indonesia sendiri mengaca pada project yang dibuat oleh Thailand, Indonesia membuat sebuah konsep yaitu *Grand Design Alternative Development*, dimana konsep tersebut disusun oleh

BNN dalam upaya pengentasan Indonesia dari narkoba.³⁴ Pada penelitian tersebut memiliki persamaan yaitu sama-sama membahas mengenai program *Alternative Development* yang dijalankan oleh BNN namun juga terdapat perbedaan, penelitian tersebut lebih membahas mengenai kerjasama antara BNN RI dengan ONCB Thailand dalam program *Alternative Development* di Aceh, namun pada skripsi ini peneliti lebih membahas mengenai peran BNN dalam menjalankan program *Alternative Development* di Indonesia pada tahun 2019-2022.

Pada tinjauan pustaka kategori implementasi *Alternative Development* di Indonesia bisa disimpulkan bahwasanya terdapat waktu yang berbeda dalam mengimplementasikan program tersebut dengan tujuan penanggulangan narkoba serta juga terdapat kerjasama dengan negara lain dalam mensukseskan program tersebut. Pada skripsi ini, peneliti lebih membahas program *Alternative Development* yang mana dijalankan oleh BNN dengan tujuan penanggulangan narkoba di Indonesia pada tahun 2019-2022 serta lebih menitikberatkan kerjasama nya antara Indonesia dengan Organisasi Internasional UNODC.

Dari ketiga kategori pada tinjauan pustaka, dapat ditarik kesimpulan bahwasanya pada tinjauan pustaka, peneliti terdahulu banyak menjelaskan terkait narkoba, mulai dari upaya pencegahan, implementasi program pada negara yang terdampak dan implementasi program di negara Indonesia sendiri. Peneliti memiliki pembeda dengan peneliti terdahulu, peneliti memilih program

³⁴ Raja Arya Anugra Pratama, “Kerjasama Bilateral Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia (BNN RI)-Office Narcotics Control Board of Thailand (ONCB) dalam Program Alternative Development di Aceh” (Program Studi Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Sriwijaya, 2021)

Alternative Development sebagai upaya dalam penanggulangan narkoba dan memilih negara Indonesia sebagai negara diterapkannya program *Alternative Development*, memilih jangka waktu 2019-2022 sebagai tahun diterapkannya program serta menitik beratkan kerjasama antara Indonesia dengan Organisasi Internasional UNODC. Pembaca tersebut diharapkan mampu menjadi penyempurna pada penelitian terdahulu serta dapat menjadi bahan referensi untuk ke depannya.

F. Argumentasi Utama

Penulis berargumen bahwa Badan Narkotika Nasional (BNN) Dalam Menjalankan Program “*Alternative Development*” *United Nations Office on Drugs and Crime* (UNODC) di Indonesia Pada tahun 2019-2022 dengan membuat desain program baru yaitu GDAD yang merujuk pada komponen *Alternative Development* UNODC. BNN mengimplementasikan GDAD dalam 8 target yaitu *Agricultural Development, Basic Infrastructure, Community Development, Education, Environmental Protection, Health, Improved Markets, dan Security of Law*.

G. Sistematika Penulisan Laporan Penelitian

Sistematika penulisan laporan dalam penelitian ini adalah sesuai dengan pedoman skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Sunan Ampel Surabaya. Dalam penelitian yang berbentuk kualitatif deskriptif ini, laporan penelitian disusun dengan bentuk naratif yang bersifat mendalam dengan sistematika penulisan berikut ini:

BAB I: PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Latar belakang masalah dalam penelitian kualitatif deskriptif menjelaskan kesenjangan dalam bentuk logika eksploratif mengenai fokus penelitian sehingga diperlukan penelitian lebih lanjut tentang bagaimana menggambarkan fokus penelitian secara deskriptif. Selain itu, penulis menyatakan alasan mengapa penulis melakukan penelitian pada fokus penelitian yang akan diteliti.

B. Fokus Penelitian

Fokus penelitian ini berisi tentang fokus isu yang akan diteliti serta pertanyaan-pertanyaan yang harus dijawab dalam laporan penelitian.

C. Tujuan Penelitian

Pada tujuan penelitian adalah memuat tentang tujuan atau sasaran yang ingin dicapai oleh penulis dalam menyelesaikan penelitian. Penulisan tujuan penelitian mengacu pada fokus penelitian yang ditulis dalam bentuk kalimat pernyataan.

D. Manfaat Penelitian

Pada manfaat penelitian memuat terkait manfaat yang akan diambil oleh penulis, menjelaskan mengenai untuk apa hasil penelitian yang telah dilakukan. Pada manfaat penelitian ini sendiri dibagi menjadi 2 yakni manfaat akademis dan manfaat praktis, dimana pada

manfaat akademis sendiri bermanfaat agar penulisan penelitian ini menjadi wawasan baru dalam mencari sebuah karya ilmiah. Sedangkan pada manfaat praktis memuat manfaat dalam referensi dalam pengembangan karya ilmiah kedepannya.

E. Tinjauan Pustaka

Pada Tinjauan Pustaka memuat beberapa penelitian terdahulu atau literatur yang mendukung gambaran umum mengenai penelitian ini serta yang digunakan peneliti dalam mencari referensi dan pengembangan dari penelitian sebelumnya yang telah dilakukan.

F. Argumentasi Utama

Argumentasi Utama memuat terkait serangkaian ide serta pendapat penulis terkait isu yang digunakan dalam penelitian dengan dasar kajian yang sudah dilakukan oleh penulis.

G. Sistematika Pembahasan

Dalam Sistematika Pembahasan memuat rangkaian pembahasan atau garis besar pokok pembahasan dalam setiap bab penelitian.

BAB II: LANDASAN KONSEPTUAL

A. Landasan Konseptual

Kerangka Konseptual memuat konsep penelitian yang dilakukan oleh peneliti dalam mengerjakan penelitian ini. Kerangka

konseptual merupakan suatu konsep yang menjelaskan mengenai konsep yang berhubungan dengan faktor-faktor yang telah diidentifikasi sebagai fokus penelitian

BAB III: METODE PENELITIAN

Pada bab ini menjelaskan tentang metode penelitian yang digunakan dan dilakukan oleh peneliti dengan urutan pembahasan sebagai berikut:

a. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis dan pendekatan penelitian ini berisi mengenai jenis apa yang dilakukan oleh peneliti dalam menjelaskan isu penelitian tersebut serta dengan menjelaskan mengapa memilih jenis pendekatan tersebut.

b. Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi dan waktu penelitian memuat tentang uraian dimana lokasi dan kapan waktu penelitian dilakukan dengan mengidentifikasi lokasi serta alasan mengapa peneliti memilih lokasi tersebut.

c. Tahap-Tahap Penelitian

Menjelaskan tentang tahap-tahap yang dilakukan oleh peneliti dalam melakukan penelitian.

d. Teknik Pengumpulan Data

Dalam teknik pengumpulan data adalah memuat tentang teknik apa yang digunakan oleh peneliti dalam mengumpulkan data-data penelitian.

e. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data adalah memuat tentang teknik yang digunakan oleh peneliti dalam mengolah data hingga mencapai kesimpulan di akhir penelitian.

f. Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data

Dalam teknik ini, memuat mengenai usaha serta upaya peneliti dalam memperoleh keabsahan data sehingga hasil data yang digunakan dalam penelitian dapat bersifat valid atau benar.

BAB IV: PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS DATA

a. Deskripsi Umum Subjek Penelitian

Dalam bagian ini memuat tentang gambaran umum subjek penelitian yang digunakan oleh peneliti, misalnya gambaran organisasi peristiwa dan lain sebagainya.

b. Deskripsi Hasil Penelitian

Dalam bagian ini menyajikan tentang data dan fakta terkait topik penelitian yang diperoleh selama proses penelitian yang dilakukan oleh peneliti, terutama data dan fakta yang dapat menjawab fokus penelitian.

c. Analisa Data

Pada bagian ini berisi mengenai data yang diperoleh dan diolah dengan menggunakan teknik analisis data yang telah dijelaskan sebelumnya, dan kegiatan analisis data ini seringkali juga

melibatkan teori yang relevan dengan fokus penelitian guna menemukan penjelasan teoritis atas fenomena sosial.

BAB V: PENUTUP

a. Kesimpulan

Pada bagian kesimpulan ini berisi tentang temuan konseptual dan akhir yang relevan dengan fokus penelitian yang telah diteliti.

b. Saran atau Rekomendasi

Dalam bagian ini berisi mengenai saran atau rekomendasi yang dibuat oleh peneliti setelah mendapatkan hasil akhir penelitian untuk digunakan oleh pihak-pihak yang berkepentingan terkait dengan topik penelitian.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB II

LANDASAN KONSEPTUAL

A. *Alternative Development*

Konsep *Alternative Development* merupakan konsep yang digagas dan dirumuskan oleh *United Nations Office on Drugs and Crime* (UNODC) yang diperuntukkan untuk negara-negara dalam upaya penanganan penanaman obat terlarang. Pada tahun 1998 Perserikatan Bangsa Bangsa atau PBB melaksanakan sidang umum yang mana menjelaskan bahwa *Alternatrive Development* adalah suatu konsep sebagai proses pencegahan serta penghapusan budidaya tanaman narkotika dan psikotropika melalui langkah-langkah seperti pembangunan desa pada wilayah dalam tujuan pertumbuhan nasional yang berkelanjutan yang juga disertai upaya perlawanan terhadap penyalahgunaan dan peredaran narkotika dengan melalui pendekatan sosial serta peningkatan kesejahteraan dengan cara mengenali sifat dan karakter nsosial serta budaya pada wilayah tersebut.

The United Nations General Assembly, in its twentieth special session on September 1998, recognized alternative development as: "A process to prevent and eliminate the illicit cultivation of plants containing narcotics and psychotropic substances through specifically designed rular development measures in the context of sustained national growth and sustainable development efforts in countries taking action against drugs, recognizing the particular socio-economic characteristics of the target communities and

groups, within trhe framework of a comprehensive and permanent solution to the problem of illicit drugs.”³⁵

Konsep dasar UNODC terkait *Alternative Development* tentang pembangunan alternatif berakar pada pengetahuan dan analisis mendalam tentang daerah-daerah dimana tanaman obat tumbuh di daerah-daerah yang sebagian besar terisolasi dan sulit dijangkau. Kendalanya, mungkin karena konflik, marginalisasi atau kurangnya pembangunan infrastruktur yang ada. Pendekatan konsep *Alternative Development* UNODC didasarkan pada gagasan bahwa pasokan obat-obatan terlarang hanya dapat berhasil dikurangi apabila budidaya tanaman obat ditangani melalui pengurangan kemiskinan dalam kerangka pembangunan berkelanjutan. Ketika mengukur dampak intervensi pembangunan yang relevan, UNODC tidak hanya mempertimbangkan pengurangan budidaya tanaman obat dan penyalahgunaan tanaman obat tersebut, akan tetapi juga sangat bergantung pada indikator pembangunan manusia. Pengembangan alternatif artinya memberikan cara-cara baru para petani agar tidak kembali menanam tanaman seperti kokain, opium, ganja atau tanaman ilegal lainnya. Hal ini merupakan inti dari sebagian besar kegiatan operasional UNODC pada tingkat nasional, regional dan sub-regional.

³⁵ United Nations Office on Drugs and Crime, *Alternative Development*, Diakses 02 Agustus 2022, <https://www.unodc.org/unodc/es/alternative-development/overview.html>.

Gambar 2.1
Sustainable Alternative Developmnet



(Sumber: <https://www.unodc.org/unodc/en/alternative-development/our-work.html>)

Pada **gambar 2.1** dijelaskan bahwasanya pengembangan alternatif berfokus pada penyediaan kegiatan-kegiatan peningkatan yang sah bagi para petani untuk mengurangi ketergantungan mereka pada pendapatan yang berasal dari menanam opium. Upaya ini juga difokuskan pada kesehatan, pendidikan, infrastruktur dasar, pengembangan masyarakat dan ketahanan pangan, perhatian khusus yang diberikan pada perlindungan lingkungan dan peningkatan pasar untuk produk pengembangan alternatif. Dalam memberdayakan masyarakat, pembangunan alternatif UNODC juga memastikan bahwa laki-laki dan perempuan mendapat manfaat yang sama dari intervensi pembangunan.³⁶ Berikut merupakan indikator dari

³⁶ United Nations Office on Drugs and Crime, Alternative Development, Diakses 02 Agustus 2022, <https://www.unodc.org/unodc/es/alternative-development/our-work.html>.

setiap komponen atau *Sustainable Alternative Development* dari UNODC sendiri:

1. *Agricultural Development*

Agricultural Development merupakan salah satu komponen atau SAD dari UNODC dimana *Agricultural Development* diterapkan di beberapa negara yang terdampak masalah narkoba. Misalnya negara Myanmar, UNODC dalam bekerjasama dengan *Central Committee for Drug Abuse Control* (CCDAC) berupaya mengurangi jumlah obat-obatan yang diproduksi oleh negara Myanmar, hal ini diterapkan dengan memberikan mata pencaharian alternatif yang berkelanjutan bagi komunitas petani opium. Di negara Peru juga diterapkan *Alternative Development* dengan membuat program substansi tanaman yang menggantikan tanaman budidaya semak koka dengan tanaman kakao, kopi, serta kelapa sawit.³⁷

2. *Basic Infrastructure*

Basic Infrastructure merupakan komponen atau SAD dari UNODC yang merupakan upaya sangat penting untuk mendukung negara-negara dalam mengentaskan masalah narkoba. Misalnya di negara Myanmar UNODC membangun rumah kaca di desa-desa

³⁷ Wolfgang Biersack, "Opium Reduction in Myanmar: An Analysis of UNODC's Alternative Development For Rural Communities in Shan State, M. Sc" (Thesis in Development and International Relations, Aalborg Universitet, 2015)

untuk mendukung penanaman bibit agar menghasilkan bibit yang unggul untuk plot, serta membuat irigasi air dan pelebaran jalan.³⁸

3. *Community Development*

Community Development yang merupakan komponen atau SAD dari UNODC juga cara yang efektif dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Seperti contoh pada negara Myanmar, UNODC memberi dukungan dengan pembuatan sertifikat tanah yang dimana sebelumnya para petani di Myanmar tidak memiliki sertifikat tanah, hal ini dilakukan dengan tujuan memberikan para petani keamanan investasi mereka agropforestio berbasis kopi dan memberikan kepastian hukum kepada petani bahwa kalau mereka memiliki tanah yang dimana membuat perampasan tanah tidak lagi dilakukan.³⁹

4. *Education*

Education merupakan salah satu target SAD dari UNODC yang juga sangat penting dalam upaya penanggulangan narkoba. Seperti contoh pada negara Bolivia, UNODC bekerja sama dengan Organisasi Perburuhan Internasional untuk mendukung edukasi pelatihan kejuruan serta dukungan untuk usaha kecil. Hal ini dibuktikan dengan adanya pelatihan kejuruan bagi kaum muda dan meningkatkan prospek kerja mereka yang hingga pada saat ini, lebih

³⁸ Ibid, hal 59.

³⁹ Ibid, hal 56-57.

dari 1000 kursus pelatihan kejuruan mulai dari pelatihan pertanian hingga ilmu komputer dan administrasi bisnis. Hal ini telah memberi manfaat bagi 23.000 anak muda disana. Proyek ini juga telah mendukung dalam pendirian 90 usaha mikro dan penguatan 122 usaha mikro yang sudah ada serta dapat memperkerjakan lebih dari 2000 orang.⁴⁰

5. *Environmental Protection*

Environmental Protection merupakan suatu upaya yang perlu dilakukan untuk suatu negara yang terdapat masalah narkoba. Pada negara Kolumbia terdapat upaya *Environmental Protection* yaitu dengan cara pengelolaan hutan. Pada tahun 2004-2006, UNODC meningkatkan taraf hidup 433 keluarga melalui kegiatan pengelolaan hutan dan agroforesti atau wanatani serta ketahanan pangan. Dalam 3 rencana pengelolaan hutan memastikan lebih dari 22.000 hektar bebas dari perkebunan koka dan direhabilitasi lebih dari 390 hektar oleh tanaman kakao.⁴¹

6. *Gender Equality*

Gender Equality atau kesetaraan gender juga sangat berpengaruh pada negara yang berupaya mengentaskan negara dari permasalahan narkoba. Seperti contoh di negara Laos, wanita sangat diuntungkan dari penghapusan opium karena mereka biasa

⁴⁰ United Nations Office on Drugs and Crime, *Making a Different Through Sustainable Alternative Development*. Hal 5-6.

⁴¹ Ibid. Hal 4.

melakukan sebagian besar tugas yang padat terkait budidaya opium. Pada saat program *Alternative Development* diluncurkan, para wanita terlibat dalam kegiatan yang menghasilkan pendapatan resmi seperti produksi beras, jagung serta memelihara ternak. Selain itu, masyarakat juga melaporkan peningkatan pendaftaran anak perempuan di sekolah.⁴²

7. *Health*

Pada komponen ini, UNODC memiliki target sektor kesehatan (*Health*) dalam penanggulangan narkoba. Misalnya di negara Laos pendekatan pengobatan terbukti berhasil dalam menurunkan angka penyalahgunaan opium serta terbukti berhasil dalam mengurangi permintaan opium lokal di negara Laos. UNODC dan pemerintah Laos berkolaborasi dalam mendukung program pengobatan dan rehabilitasi pada sepuluh provinsi utara di Laos dimana dalam dukungan tersebut lebih dari 8.000 penyalahguna opium telah menerima pengobatan dan hasil dari program ini lebih dari 8.000 penyalahguna opium memiliki tingkat kekambuhan yang relatif rendah.⁴³

8. *Improve Markets*

Improve markets yang merupakan salah satu target SAD UNODC ini adalah suatu upaya bagaimana agar pemasaran produk

⁴² Ibid. Hal 3.

⁴³ Ibid. hal 3-4

bisa optimal yang dimana sebelumnya para masyarakat membudidayakan tanaman narkoba beralih pada produk yang lebih alternatif. Seperti contoh di negara Kolumbia, pemerintah dan UNODC mendukung asosiasi petani yang terlibat dalam produk pengembangan alternatif termasuk kacang-kacangan, kakao, kopi, madu, kelapa, dan lain sebagainya. Banyak dari perusahaan yang menghasilkan produk organik dalam sistem ramah lingkungan yang sehingga dapat menguntungkan dan kompetitif di pasar domestik serta internasional termasuk jaringan supermarket dan industri. UNODC juga mempromosikan produk pengembangan alternatif dengan mengenalkan serta menjual kopi dari lima daerah di tanah air.⁴⁴

9. *Security Role of Law*

Pada target SAD UNODC *Security Role of Law* sangat dibutuhkan, hal tersebut merupakan upaya agar masyarakat sadar hukum terkait narkoba. seperti pada negara Thailand, bersama penegak hukum, pemerintah melakukan operasi pengurangan serta penghapusan produksi dan perdagangan gelap narkoba serta obat-obatan terlarang. Penyitaan dan penangkapan terus dilakukan untuk

⁴⁴ Ibid. hal 3.

menekan jumlah peredaran narkoba serta obat-obatan terlarang yang masuk maupun keluar Thailand.⁴⁵

Program *Alternative Development* merupakan suatu program yang berfungsi menghilangkan atau mencegah produksi tanaman terlarang melalui metodologi yang mencakup konsepsi yang lebih luas dari pembangunan pedesaan yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup populasi sasaran secara keseluruhan dengan menangani yang tidak hanya pada ranah pendapatan akan tetapi juga agrikultur, infrastruktur dan layanan sosial, pengembangan masyarakat, edukasi, perlindungan lingkungan, kesetaraan gender, kesehatan, strategi pemasaran serta aturan pada hukum. Program *Alternative Development* disebut juga program yang didesain dengan metode mengganti tanaman narkoba menjadi tanaman komoditi unggulan dan program ini telah berhasil menurunkan angka narkoba di beberapa negara.

Dalam skripsi ini, peneliti menggunakan konsep *Alternative Development* untuk membantu menganalisis fenomena yang terjadi yakni kira-kira seperti apa program *Alternative Development* yang dijalankan oleh Badan Narkoba Nasional Republik Indonesia (BNN RI) dan mengukur sejauh mana GDAD BNN telah mengimplementasikan *Sustainable Alternative Development* dari UNODC sendiri dalam menanggulangi Peredaran narkoba di Indonesia yang mana pada bab

⁴⁵ Anggia Wulansari, "Upaya dan Tantangan Thailand dalam Penanggulangan Narkoba dan Obat Terlarang Menuju Drug-Free ASEAN 2015," *journal.unair.ac.id* Volume : 2 - No. 4 Terbit : 7—2013.

selanjutnya akan dibahas program *Alternative Development* serta bentuk pengimplementasiannya sesuai dengan SAD UNODC.

B. Konsep Peran

Peran dalam Ilmu Hubungan Internasional dapat diartikan sebagai suatu tindakan atau perilaku seorang aktor yang dituntut untuk menjalankan perilaku politiknya yang bertujuan untuk mencapai kepentingan negaranya.⁴⁶

Menurut K.J Holsti dalam bukunya “Politik Internasional Suatu Kerangka Analisis” Peranan merupakan:

*“The concept of role can be considered as the definition put forward by decision makers on general forms, decisions, rules, and functions of the state in one or several international issues. Roles also reflect key trends, concerns, and attitudes toward the external environment and the systematic variables of geography and the economy”*⁴⁷

Menurut K.J Holsti tersebut adalah Konsep peran dapat dianggap sebagai definisi yang diusulkan oleh pembuat kebijakan untuk bentuk umum, keputusan, aturan, dan fungsi negara dalam satu atau lebih urusan internasional. Peran juga mencerminkan tren utama, perhatian dan sikap terhadap lingkungan eksternal dan variabel sistem geografis dan ekonomi.

⁴⁶ Rusadi Kantaprawira, 1987, Aplikasi Pendekatan Sistem dalam Ilmu-Ilmu Sosial Tinjauan terhadap Kehidupan Politik, Jawa Barat: Bunda Karya, hal 32.

⁴⁷ KJ Holsti (terj), “*Politik Internasional: Suatu Kerangka Analisis*”, (Bandung: Binacipta, 1992), hlm.159

Dalam buku yang sama, KJ. Holsti mengemukakan bahwasanya terdapat paling sedikit 16 tipe peranan nasional yang merupakan komponen kebijakan luar negeri Negara, yaitu:

1. *Bastion of the Revolution, Liberator*

Beberapa pemerintah mempunyai tugas yang berguna untuk mengorganisasikan atau memimpin berbagai gerakan revolusi di luar negeri.

2. *Regional Leader*

Dalam peranan ini merujuk pada tugas atau tanggung jawab khusus berdasarkan oleh sebuah negara dalam hubungannya dengan negara-negara lain di kawasan yang sama.

3. *Regional Protector*

Peranan ini menekankan pentingnya pemberian perlindungan bagi kawasan sekitarnya, meskipun nampaknya peran ini mengimplikasikan tanggung jawab kepemimpinan tertentu dalam sebuah kawasan.

4. *Active Independent*

Dalam peran ini menekankan pentingnya peningkatan keterlibatan mengenai hubungan diplomatik dengan negara-negara lain sebanyak mungkin dan biasanya bertindak sebagai penengah dalam konflik.

5. *Liberation Supporter*

Dalam peran ini tidak mengindikasikan tanggung jawab formal untuk mengorganisasi, memimpin atau mendukung secara fisik gerakan kemerdekaan di luar negeri.

6. *Anti-imperialist Agent*

Imperialisme dilihat sebagai ancaman yang serius, banyak negara yang memandang dirinya sebagai “agen” dalam perjuangan melawan imperialism.

7. *Defender of the Faith*

Dalam konsep ini, pemerintah memandang kebijakan luar negerinya dalam term nilai-nilai pelindung dari serangan, akan tetapi tidak dalam batas wilayah tertentu.

8. *Mediator-integrator*

Beberapa pemerintahan memandang dirinya mampu atau dapat bertanggung jawab untuk memenuhi atau menjalankan tugas sebagai penengah untuk menyelesaikan permasalahan di negara lain. Mereka menganggap dirinya sebagai peleraian dan penyelesaian masalah di kawasan regional maupun global.

9. *Regional-subsystem collaboration*

Peranan ini tidak menghadapi konflik yang sama. Peran ini mengindikasikan komitmen yang lebih jauh terhadap kerjasama dengan negara lain untuk membangun masyarakat luas yang

bersatu, bekerjasama, serta berintegrasi dengan unit politik lainnya.

10. Developer

Dalam peranan ini mengindikasikan tugas dan kewajiban tertentu dengan tujuan membantu negara-negara berkembang.

11. Bridge

Peran ini biasanya muncul dalam bentuk yang unik, dan nampaknya tidak menstimulir tindakan tertentu.

12. Faithful ally

Dalam hal ini, yang dimaksud adalah apabila pembuat kebijakan suatu negara menyatakan bahwa mereka akan mendukung sekutu mereka dengan segala cara. Mereka tidak terlalu mengharapkan bantuan dari luar seperti yang mereka berikan kepada pihak lain.

13. Independent

Peran ini dijalankan oleh sebagian besar para pemimpin negara di dunia. Peran ini berisi mengenai suatu negara atau pemerintahan akan mengeluarkan kebijakan sesuai dengan kepentingan nasionalnya sendiri dan peran ini menekankan suatu negara atau pemerintahan yang bebas untuk menentukan kebijakannya sendiri.

14. *Example (Keteladanan)*

Dalam peran ini condong pada pentingnya hal promosi prestise dan mempunyai pengaruh dalam sistem internasional dengan cara menjalankan kebijakan dalam negara tertentu, yang mana dia menjadi contoh bagi negara-negara lain.

15. *Internal Development.*

Dalam konsep peran ini tidak merujuk pada tugas atau fungsi tertentu dalam sistem internasional, dalam peran ini menyarankan untuk tidak ikut terlibat dalam politik internasional, akan tetapi tidak menutup kemungkinan diadakanya beberapa bentuk kerjasama internasional.

16. *Other role*

Dalam peran ini mengimplikasikan adanya sumber-sumber lain yang menjadi latar belakang tindakan suatu negara dalam politik luar negerinya.⁴⁸

Dalam hal ini, peranan nasional akan terlihat sebagai kebijakan luar negeri suatu negara pada saat ia terlibat dalam suatu masalah regional maupun internasional. Peranan nasional terdapat ciri-ciri yang mengarah pada tindakan yang lebih konkrit.⁴⁹

Dalam penelitian ini berfokus pada BNN sebagai aktor utama yang berperan dalam Hubungan Internasional, sangat memungkinkan bagi aktor

⁴⁸ K.J Holsti, "National Role Conception in the study of Foreign Policy," *International Studies Quarterly*, 14 (1970), hlm. 233-309.

⁴⁹ Ibid.

non-negara untuk berperan dalam Hubungan Internasional. Dalam Hubungan Internasional, aktor dikelompokkan menjadi 2 bagian yaitu aktor negara dan non-negara.⁵⁰ BNN termasuk aktor non-negara dari *National Agency*, yang mana *National Agency* memiliki arti Lembaga Pemerintah Non Kementerian, ia bertugas untuk melaksanakan tugas tertentu dari presiden.⁵¹ Dalam pokok bahasan yang dikemukakan oleh KJ. Holsti, dapat diidentifikasi bahwa suatu negara atau pemerintahan memiliki tujuan untuk mencapai kepentingan negaranya dengan membangun negaranya sendiri untuk menjadikan negara semakin baik.

Dalam hal ini, penulis menggunakan salah satu dari 16 tipe peranan nasional yang menjadi komponen luar negeri suatu negara menurut KJ. Holsti, yang menggambarkan peran *National Agency* untuk mencapai kepentingan suatu negara agar negara menjadi lebih baik lagi yang dikemukakan Holsti dengan sebutan “*Independent*”.

C. Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia (BNN RI)

Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia atau BNN RI merupakan lembaga pemerintah non kementerian yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada presiden. BNN sebagai sebuah lembaga forum juga memiliki tugas dan fungsinya sendiri yaitu, mengkoordinasikan instansi terkait dalam perumusan dan pelaksanaan

⁵⁰ Margono, “Aktor Non-Negara dalam Hubungan Internasional.” Jurnal Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Th. 28, Nomor 2 (2015), <http://dx.doi.org/10.17977/jppkn.v28i2.5450>

⁵¹ Kompas.com, Daftar Lembaga NonKementerian, diakses 08 Januari 2023, <https://nasional.kompas.com/read/2022/02/12/00000051/daftar-lembaga-pemerintah-nonkementerian>

kebijakan nasional penanggulangan narkoba serta mengkoordinasi pelaksanaan kebijakan nasional penanggulangan narkoba. BNN RI bekedudukan di daerah ibu kota negara dengan wilayah kerja meliputi seluruh wilayah negara Republik Indonesia. Sesuai Surat Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: B/1068/M.PAN-RB/5/2010 tanggal 12 mei 2010 terkait Pembentukan Kelembagaan Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Kabupaten atau Kota yang untuk selanjutnya secara bertahap akan dibentuk lagi BNNK atau BNN Kota lainnya sesuai tingkat kerawanan masing-masing daerah.⁵² Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia (BNN RI) memiliki Visi dan Misi. Visi dari BNN yakni “Menjadi Lembaga Pemerintah Non Kementrian yang profesional dan mampu menggerakkan seluruh komponen masyarakat, bangsa dan negara Indonesia dalam melaksanakan Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Bahan Adiktif lainnya”. Sedangkan Misi dari BNN adalah “Bersama instansi pemerintah terkait dan komponen masyarakat, bangsa, dan negara melaksanakan pencegahan, pemberdayaan masyarakat, pemberantasan, rehabilitasi, hukum dan kerjasama di bidang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Bahan Adiktif lainnya”.⁵³

⁵² Ibid, hlm 17.

⁵³ Ibid.

Dalam misi pemberantasan penyalahgunaan dan perdagangan gelap narkoba, Badan Narkotika Nasional (BNN) melakukan penyidikan serta penyelidikan terkait penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba serta prekursor narkoba. Selain strategi peningkatan pengendalian serta pengawasan, terdapat juga strategi lain yang dilakukan oleh BNN yang merupakan bagian dari tugas dan fungsi pokok dari BNN sendiri. Melalui strategi-strategi tersebut, BNN bersama masyarakat melaksanakan langkah-langkah seperti melaksanakan pencegahan primer, yaitu seperti mengadakan penyuluhan-penyuluhan mengenai bahaya narkoba, penerangan melalui informasi media cetak, televisi, maupun berbagai media online, serta melakukan pendidikan mengenai pengetahuan narkoba dan bahayanya. BNN juga melakukan pencegahan sekunder yaitu seperti dengan mendeteksi dini bagi anak yang melakukan penyalahgunaan narkoba, konseling serta melakukan bimbingan sosial. Program-program tersebut merupakan suatu upaya BNN dalam melaksanakan pencegahan penyalahgunaan peredaran gelap narkoba (P4GN). Selain BNN terjun dalam memberantas penyalahgunaan narkoba dan peredaran gelap narkoba, BNN juga ikut serta mengajak masyarakat dalam turut ikut andil dalam membantu kinerja BNN dalam memberantas narkoba. Untuk memperkuat jaringan, BNN mengajak lembaga swadaya masyarakat, pemuda-pemuda, organisasi mahasiswa dan lain sebagainya untuk

membantu mensosialisasikan mengenai bahaya penyalahgunaan narkoba dan peredaranya.⁵⁴

Indonesia telah melakukan kerjasama dengan UNODC sejak awal 2007, salah satunya adalah adanya hubungan kerjasama antara Badan Narkotika Nasional (BNN) dengan UNODC. BNN berhubungan baik dengan UNODC dalam rangka memerangi narkoba di Indonesia, dalam hal ini dibuktikan dengan adanya program pelatihan yang ditujukan bagi aparat penegak hukum di Indonesia, BNN dan UNODC mengadakan program Intervensi Ketahanan Keluarga Anti Narkoba, BNN dan UNODC mengambil langkah inisiatif pada bidang pencegahan berbasis ilmu pengetahuan serta juga terdapat adanya kantor UNODC sebagai tempat dalam segi teknis dan saran. Kerjasama antara BNN dan UNODC menghasilkan keuntungan bagi kedua belah pihak atau bersifat win-win solution. Keuntungan yang didapatkan oleh BNN merasa terbantu dengan hadirnya UNODC dimana hal tersebut dapat memudahkan serta memaksimalkan efektivitas kerja BNN. UNODC sebagai organisasi internasional yang bertugas dalam memelihara perdamaian dunia mengenai isu *transnational crime* membantu serta mendorong pemerintah Indonesia dan BNN dengan membuat rancangan kerja yang berpedoman pada *United Nations Convention on Transnational Organized Crime* (UNTOC) yang mengatur terkait isu narkoba. Badan Narkotika Nasional

⁵⁴ BNN Provinsi Kepulauan Riau. "Peran Strategis BNN Dalam Memperkuat Kesatuan Bangsa Untuk Melawan Narkoba." Diakses 26 September 2022. <https://kepri.bnn.go.id/peran-strategis-bnn-dalam-menguatkan-kesatuan-bangsa-untuk/>.

(BNN) dalam implementasinya dapat dikatakan telah sejalan sesuai fungsi serta tanggung jawabnya dalam memberantas narkoba di Indonesia. Pembentukan kerjasama serta adanya implemntasi dari kerjasama antara BNN dan UNODC juga menunjukkan adanya peran serta keterlibatan langsung dalam upaya mengatasi kejahatan lintas negara khususnya pada kejahatan narkoba.⁵⁵

D. *Grand Design Alternative Development (GDAD)*

Dalam mengatasi isu tingginya angka narkoba di Indonesia juga diperlukan adanya pendekatan program *Alternative Development* yang disusun dalam sebuah kerangka yang disebut *Grand Design Alternative Development (GDAG)*. *Grand Design* tersebut berfokus mengentaskan produksi ganja di provinsi Aceh terutama pada di 3 kabupaten, yaitu: Kabupaten Aceh Besar, Kabupaten Gayo Lues dan Kabupaten Bireuen. Tak lepas dari itu, *Grand Design Alternative Development* memiliki visi tersendiri yaitu terwujudnya masyarakat Indonesia yang Sehat dan Bebas dari produksi ganja, visi tersebut diimplementasikan dengan beberapa misi, yaitu:⁵⁶

⁵⁵ Stella Simiwijaya, "Kerjasama Badan Narkotika Nasional Dengan United Nations Office on Drugs and Crime Dalam Menanggulangi Penyalahgunaan Narkoba di Indonesia," *Journal of International Relations*, Faculty of Social and Political Science Pelita Harapan University (2019), https://ojs.uph.edu/index.php/JHIV/article/view/2450/pdf_2

⁵⁶ Badan Narkotika Nasional (BNN), 2016, *GRAND DESIGN Alternative Development Dalam Rangka Pengentasan Produksi Ganja dan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat di Provinsi Aceh (Tahun 2016-2025)*.

1. Menggantikan tanaman ganja menjadi komoditi unggulan daerah.
2. Mengalihprofesikan penanaman ganja menjadi petani komoditi unggulan.
3. Meningkatkan kesejahteraan dan karakter budaya masyarakat.
4. Mengembangkan ekonomi dan peningkatan pendapatan.
5. Meningkatkan kesadaran hidup sehat dan sadar hukum.
6. Menyatukan dan menggerakkan potensi masyarakat melalui kemitraan dan sinergi.

Grand Design Alternative Development di desain pada tahun 2016-2025 dan ini sesuai dengan kebijakan program *Alternative Development* dari Badan Dunia PBB dan ASEAN yaitu berupaya memperlambat laju angka penyalahgunaan narkoba. Sehingga dalam hal ini juga sesuai dalam amanah UUD 1945 yaitu berperan aktif dalam melaksanakan ketertiban dunia. Arah kebijakan GDAD 2016-2025 ini dengan jangka panjang diharapkan mampu mengubah kondisi permasalahan darurat narkoba di Indonesia pada saat ini, terutama apabila melihat kondisi gambaran produksi ganja di Provinsi Aceh yang semakin tidak bisa dikendalikan. Program *Alternative Development* didesain menjadi 6 kemitraan dan sinergi yaitu pengembangan sosial budaya, mewujudkan keamanan dan ketertiban, menjaga lingkungan hidup dan kelestarian hutan, pengembangan ekonomi, menciptakan ketahanan pangan serta pembangunan agrowisata. Grand Design ini dirancang dalam 10 tahun dan 3 tahapan atau periode sebagai berikut:

1. Periode Pertama: membangun kepercayaan (2016-2018)
2. Periode Kedua : Implementasi Program (2019-2024)
3. Periode Ketiga : Membangun Agrowisata (2025)

Dengan adanya GDAD tersebut, diharapkan angka narkoba di Indonesia semakin menurun, jaringan peredaran gelap ganja terungkap dan terputus, masyarakat dapat terbangun karakternya melalui pola hidup sehat dan sadar hukum serta dapat mengangkat citra Indonesia sebagai kawasan negara yang berhasil mengentaskan produksi dan meningkatkan kesejahteraan petani melalui pembangunan agrowisata seperti halnya di Doi Tung Thailand.⁵⁷

Berikut merupakan tabel mengenai *Grand Design* dari Badan Narkotika Nasional (BNN) yang sesuai dengan komponen *Alternative Development* (*Sustainable Alternative Development*) UNODC yang dijelaskan pada gambar 2.1:

Tabel 2.1 GDAD BNN dan *Alternative Development*

<i>Sustainable Alternative Development</i> UNODC	Grand Design BNN
<i>Agricultural Development</i>	-Mengalihprofesikan penanaman ganja ke petani komoditi unggulan.
<i>Basic Infrastructure</i>	-Membangun infrastruktur 3 lokasi <i>pilot project</i> GDAD di provinsi

⁵⁷ Ibid.

	Aceh.
<i>Community Development</i>	-Menggantikan tanaman ganja menjadi komoditi unggulan.
<i>Education</i>	<p>-Melakukan sosialisasi dan advokasi.</p> <p>-Pelatihan <i>life skill</i> dan pola hidup sehat tanpa Narkotika melalui pembinaan karakter.</p> <p>-Pembinaan hukum masyarakat melalui program kadarkum (keluarga sadar hukum) dan pengembangan kapasitas lingkungan kerja.</p> <p>-Pembinaan petani dan keluarga tani dalam budidaya tanaman komoditi, ketrampilan non pertanian, serta peternakan dan perikanan.</p> <p>-Pelatihan petani dalam pengolahan dan pengelolaan komoditi pertanian dan perkebunan, pendayagunaan teknologi, dan pemanfaatan energi alternatif serta pupuk organik.</p>
<i>Environmental Protection</i>	-Program peningkatan sanitasi lingkungan.
<i>Gender Equality</i>	-
<i>Health</i>	-Meningkatkan kesadaran hidup sehat.

	<ul style="list-style-type: none"> -Adanya pelayanan kesehatan. -Pembinaan petani dalam budidaya, pengolahan dan pengelolaan tanaman obat.
<i>Improved Markets</i>	<ul style="list-style-type: none"> -Pembinaan petani dalam kewirausahaan, <i>networking</i>, dan pemasaran hasil produksi. -Pembinaan petani dalam permodalan dan perkoperasian, -Pembinaan petani dalam pemanfaatan internet promosi <i>online</i>.
<i>Security Rule of Law</i>	<ul style="list-style-type: none"> -Meningkatkan masyarakat akan sadar hukum.

(Sumber: <https://bnn.go.id/grand-design-alternative-development-gdad/>, diolah oleh peneliti.)

Pada tabel 2.1 dijelaskan bahwa terdapat 9 *Target Sustainable Alternative Development* UNODC yang mana juga diterapkan oleh BNN Melalui rencana pengimplementasian program *Alternative Development* atau GDAD, Mengaca pada tabel tersebut bahwasanya seluruh *Grand Design Alternative Development* BNN telah sesuai dengan target SAD UNODC kecuali pada target *Gender Equality*.

BAB III

METODE PENELITIAN

Penelitian yang berjudul “Peran Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia (BNN RI) Dalam Menjalankan Program “*Alternative Development*” *United Nations Offcice on Drugs And Crimes* di Indonesia Pada Tahun 2019-2022” akan menggunakan metode penelitian sebagaimana berikut ini:

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan jenis penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif pada dasarnya merupakan proses mengeksplorasi suatu masalah. Menurut Jhon W. Cresswell, penelitian kualitatif merupakan suatu metode dalam penelitian dalam memahami dan mengeksplorasi masalah yang didalamnya melibatkan upaya-upaya yang dapat menjawab suatu masalah seperti dalam pengumpulan data harus mencakup tujuan pendekatan pengambilan sampel dan bentuk data yang akan dikumpulkan, misalnya dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan, melakukan observasi, wawancara, hingga melakukan analisis terkait tema-tema secara induktif.⁵⁸ Penelitian yang digunakan peneliti adalah bersifat deskriptif dimana penelitian kualitatif deskriptif berfungsi menggambarkan, mencatat, menganalisis serta menjabarkan masalah yang akan diteliti.

Penelitian kualitatif deskriptif bertujuan untuk mempromosikan pembaca dalam memahami isi suatu penelitian melalui deskripsi dengan

⁵⁸ John W. Creswell. *Research Design, Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*. Second Editons, SAGE Publications, Inc, 2002.

menggunakan pertanyaan kata seperti siapa, kapan, dimana dan bagaimana.⁵⁹ Penelitian ini menggambarkan bagaimana peran Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia (BNN RI) dalam menjalankan program *Alternative Development United Nations Office on Drugs and Crime* (UNODC) di Indonesia pada tahun 2019-2022 dengan menggunakan konsep *Alternative Development*. Dengan menggunakan data-data yang berasal dari beberapa sumber yang valid seperti dari Badan Narkotika Nasional serta sejumlah sumber lainnya, maka dapat dipastikan penelitian ini bersifat kualitatif seperti dengan penjelasan di atas.

B. Batasan Masalah

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan batasan masalah di tahun 2019-2022 karena di tahun tersebut merupakan periode kedua atau tahun pengimplementasian *Grand Design Alternative Development* di Indonesia. Peneliti tidak menggunakan periode pertama atau di tahun 2016- 2018 karena di periode tersebut hanya berupa *Trust Building* atau pada tahap membangun kepercayaan masyarakat, sedangkan peneliti berfokus pada tahap pengimplementasian program. Namun, dalam praktiknya, setelah penelitian berlangsung ternyata agenda pengimplementasian tersebut baru pada tahun 2019 yang menghasilkan laporan, sedangkan agenda implementasi tahun 2020-2022 masih dalam rencana tindak lanjut.

⁵⁹ William Lawwence Neumen, *Metodologi Penelitian Sosial: Kualitatif dan Kuantitatif* (Jakarta: PT. Indeks, 2015), 44.

C. Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi pelaksanaan penelitian dalam penelitian ini dilaksanakan di Perpustakaan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Sunan Ampel Surabaya. Untuk beberapa proses proses pengumpulan data juga dilakukan secara *daring* maupun *luring*, dengan memanfaatkan fitur media sosial sebagai cara dalam pengumpulan data, serta menghubungi, dan melaksanakan wawancara dengan narasumber yaitu dari pihak Badan Narkotika Nasional (BNN) pusat. Selain itu, peneliti juga memanfaatkan Perpustakaan seperti perpustakaan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Sunan Ampel Surabaya untuk menggali data yang diperlukan. Lamanya penelitian ini dilakukan sekitar 8 bulan terhitung setelah pelaksanaan seminar proposal.

D. Subjek Penelitian dan Tingkat Analisis

Dalam suatu penelitian yang menggunakan metode kualitatif tidak disebut populasi dan sampel seperti dalam penelitian metode kuantitatif, karena penelitian berangkat dari kasus kehadiran individu atau kelompok dalam situasi sosial tertentu dimana hasilnya hanya berlaku untuk situasi sosial tersebut. merujuk pada Arikunto, subjek penelitian merupakan pemberian batasan penelitian sebagai benda atau orang yang dilampirkan data variabel penelitian, dan sesuatu yang dipermasalahkan.⁶⁰ Mengaca pada paragraf sebelumnya, subjek penelitian dalam penelitian ini adalah perwakilan

⁶⁰ Suharismi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2016), 26.

dari pihak Badan Narkotika Nasional (BNN) pusat yang faham dalam isu yang diperlukan.

Dalam buku yang berjudul *Ilmu Hubungan Internasional Disiplin dan Metodologi* oleh Mohtar Mas'ood dijelaskan bahwasanya dalam melakukan penelitian hubungan internasional terdapat lima tingkat analisis yang dipaparkan, antara lain Individu, Kelompok Individu, Negara-Bangsa, Kelompok Negara-Negara dalam satu *Region* dan Sistem Global.⁶¹ Subjek dari penelitian ini yaitu BNN sebagai salah satu lembaga di Indonesia, oleh karena itu Mengaca dari fokus penelitian, tingkat analisis dalam penelitian ini adalah level negara yakni Indonesia, dimana tingkat analisis negara akan menghasilkan penjelasan mengenai perilaku pemerintah tentang bagaimana menghadapi suatu problematika yang ada. Pada level negara, peneliti memfokuskan penelitian pada pemerintah atau instansi yang turut serta dalam pembuatan suatu upaya penting dalam memecahkan suatu masalah. Penelitian ini membahas tentang peran Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia (BNN RI) dalam menjalankan program *Alternative Development* UNODC di Indonesia pada tahun 2019-2022.

E. Teknik Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data penelitian ini, peneliti mengumpulkan data dengan teknik antara lain, wawancara, kajian dokumen maupun penelusuran online. Dalam penelitian ini, peneliti tentunya menggunakan data primer dan

⁶¹ Mohtar Mas'ood, *Ilmu Hubungan Internasional: disiplin dan metodologi*, Penerbit PT Pustaka LP3ES (1994):46

data skunder. Data primer didapat melalui wawancara. Menurut Kristin Esterbag wawancara merupakan pertemuan dua orang atau lebih guna bertukar informasi dan ide dengan Tanya jawab untuk membahas makna dalam topik yang dibahas. Berdasarkan dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik wawancara dengan perwakilan pihak Badan Narkotika Nasional (BNN) untuk menggali informasi yang menurut peneliti relevan dengan topik penelitian mulai dari mengirim surat penelitian, menghubungi pihak terkait hingga melaksanakan wawancara pada waktu yang sudah ditentukan. Selain data primer peneliti juga membutuhkan data sekunder. Data sekunder diperoleh dengan teknik kajian dokumen yang berkaitan dengan topik yang diteliti atau bisa disebut juga dengan *Library Research*. Peneliti menggunakan data sekunder dengan teknik mengumpulkan jurnal, buku, foto, artikel, berita, skripsi, dokumen pemerintah, Undang-Undang dan lain sebagainya.

F. Teknik Analisis Data

Secara umum teknik analisis data dapat diartikan sebagai sebuah cara untuk menganalisis data yang telah terkumpulkan guna menemukan makna. Analisa Data yang digunakan oleh peneliti adalah Analisis Data dengan model Miles dan Huberman, Miles dan Huberman mengemukakan bahwasanya aktivitas dalam analisis data kualitatif dilaksanakan secara interaktif dan juga berlangsung secara terus-menerus sampai tuntas. Terdapat tiga aktivitas dalam

analisa tersebut antara lain, reduksi data, penyajian data serta kesimpulan atau *conclusion*.⁶²

G. Reduksi data

Reduksi data merupakan teknik analisis yang merangkum, memfokuskan, memilah, menyisihkan serta menyusun data agar dapat menarik kesimpulan. Hal ini dilakukan peneliti agar mempermudah peneliti dalam mencari dan menemukan ide atau gagasan selanjutnya serta dapat mengurangi data yang sekiranya tidak diperlukan dalam penelitian. Dengan cara memilah data yang sesuai dengan judul yang diangkat oleh peneliti seperti halnya data awal terkait dengan program *Alternative Development* yang dijalankan oleh BNN, akan tetapi disini peneliti menyederhanakan data tersebut sehingga bisa mudah untuk difahami. Dalam penelitian ini, peneliti memilih data yang benar-benar dibutuhkan dalam penelitian ini, dengan cara meringkas data yang telah diperoleh dari wawancara maupun sumber informasi lainya sesuai dengan bahasa peneliti sendiri agar memudahkan peneliti dalam menganalisis lebih lanjut penelitian ini.

H. Penyajian Data

Dalam menyajikan data, peneliti akan mengembangkan beberapa hipotesis, definisi, konsep serta deskripsi dari informasi yang telah diklarifikasikan, diolah, dianalisis, yang kemudian disajikan dalam teks

⁶² Sukardi, *Metodologi Penelitian Pendidikan Kompetensi dan Praktiknya*, (Jakarta:Bumi Aksara, 2005), 88

naratif. Peneliti mengolah data dengan menggunakan konsep yang berhubungan dengan penelitian.

I. Kesimpulan atau *Conclusion*

Dalam tahap kesimpulan, peneliti akan menarik kesimpulan atau *Conclusion* yang telah diperoleh peneliti serta telah dikaji dan ditelaah sebelumnya yang berguna untuk menjawab dari rumusan masalah.

J. Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data

Menurut Sugiyono, terdapat beberapa tahap dalam pemeriksaan keabsahan data. Antara lain, *Uji Credibility*, *Uji Transferability*, *Uji Dependability*, dan *Uji Confirmability*. Dalam penelitian ini, peneliti melakukan uji keabsahan data dengan menggunakan teknik *Uji Credibility*. *Uji Credibility* dilakukan peneliti dengan tujuan agar tidak meninggalkan keraguan tentang hasil penelitian yang telah dilakukan. *Uji Credibility* sendiri terdiri dari perpanjangan proses pengamatan, meningkatkan ketekunan, triangulasi, serta kecukupan referensi.

K. Alur Penelitian

Alur penelitian dalam buku *RESEARCH DESIGN, Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches* menurut John W. Creswell adalah sebagai berikut:

1. Memilih Rancangan Penelitian

Proses pemilihan desain penelitian dilakukan dengan mengidentifikasi jenis dan metode penelitian. Baik metode kualitatif, kuantitatif maupun campuran. Kemudian fokus dan topik penelitian.

Dalam hal ini Peneliti telah mengambil metode penelitian yakni dengan metode kualitatif deskriptif dengan cara mengumpulkan data-data yang sesuai kemudian dipilih sesuai dengan topik penelitian tersebut dan merangkum hasil dari pemilihan data tersebut.

2. Melakukan Tinjauan Pustaka

Setelah mengidentifikasi topik penelitian yang perlu untuk diteliti, kemudian dilakukan tinjauan pustaka atau studi literatur terkait topik tersebut. tinjauan pustaka ini bertujuan untuk memberikan pembaca informasi tentang penelitian lain yang relevan dengan topik penelitian yang dilakukan, dan untuk melengkapi kesenjangan yang ada pada penelitian sebelumnya. Dalam penelitian kualitatif ini, peneliti memilih untuk menggunakan literatur yang selalu mengacu pada asumsi partisipan dengan tanpa meninggalkan ruang untuk opini pribadi. Hal ini juga akan dijadikan peneliti sebagai bahan untuk wawancara kepada publik untuk mendengarkan asumsi dari partisipan tersebut.

3. Penerapan Teori atau Konsep

Dalam penelitian kualitatif, teori atau konsep sering digunakan sebagai alat untuk membaca tentang perilaku atau sikap tertentu. Teori akan disempurnakan sebagai variabel, konstruksi dan hipotesis penelitian. Dalam penelitian ini peneliti mengambil konsep *Alternative Development* sebagai bahan acuan dalam menganalisis isu yang diangkat.

4. Menetapkan Strategi Menulis dan Pertimbangan Etis

Pada tahap ini, peneliti menyusun penelitian berdasarkan format yang telah ditentukan sebelumnya, menyisipkan gagasan-gagasan yang hendak diajukan dalam melaksanakan penelitian. Selain itu, peneliti juga mempertimbangkan masalah etika yang perlu diantisipasi. Masalah-masalah tersebut berkaitan dengan masalah sebelum penelitian, pada awal penelitian, saat menganalisis data dan saat melaporkan atau mendistribusikan data. Dalam hal ini peneliti mengambil langkah strategis dalam menulis yakni dengan cara menuliskan apa yang menjadi poin penting dalam penelitian tersebut sesuai dengan metode penelitian yang telah diambil.

5. Melakukan Pengumpulan Data serta Perekaman Data

Dalam tahap ini, peneliti melakukan pengumpulan data sebagaimana pengumpulan data pada metode penelitian kualitatif yaitu dengan melakukan observasi, wawancara, penelusuran dokumen hingga pengumpulan materi audio serta dokumentasi peneliti dalam melakukan pengumpulan data tersebut supaya hal ini dapat menjadi bukti atau jejak digital peneliti dalam melakukan pengumpulan data. dalam hal ini peneliti melakukan wawancara dengan perwakilan pihak Badan Narkotika Nasional (BNN).

6. Analisis dan Interpretasi Data

Dalam penelitian kualitatif pada umumnya diperlukan tahap untuk memaknai data berupa teks atau gambar, dalam tahap ini, peneliti

melakukan usaha memilah data-data yang telah didapatkan, baik dari wawancara maupun melalui media informasi seperti jurnal ilmiah, skripsi dan juga artikel yang berasal dari website resmi instansi yang membahas terkait program *Alternative Development*. Pada tahap ini, peneliti sudah mulai memilih dan memilah data mana yang diperlukan dan mana yang tidak diperlukan.

7. Validitas dan Rehabilitas

Validitas merupakan kekuatan dari penelitian kualitatif, dimana validitas ini didasarkan pada penentuan keakuratan temuan.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB IV

PENYAJIAN DAN ANALISIS DATA

Pada bab ini, penulis akan memaparkan Sembilan sub bab, dimana sub bab tersebut akan membantu penulis dalam menjawab rumusan masalah, yakni mengetahui peran BNN dalam menjalankan program *Alternative Development* UNODC, sebagai aktor non-negara dalam Hubungan Internasional, BNN yang termasuk dalam *National Agency* memiliki peran sendiri untuk mencapai kepentingan negara agar negara menjadi lebih baik lagi. Seperti negara Indonesia yang memiliki permasalahan narkoba, dimana dulunya hanya sebagai *Demand* atau peminta pemasokan obat terlarang, saat ini menjadi *Supplier* obat-obatan terlarang.⁶³ Dalam hal ini terdapat kepentingan yang harus diperbaiki di negara Indonesia untuk mengembangkan negara agar semakin baik lagi dengan mengurangi jumlah angka narkoba. BNN sebagai badan penanggulangan narkoba memiliki peran tersendiri untuk mencapai kepentingan tersebut, salah satunya dengan membuat desain program *Alternative Development* yaitu GDAD yang searah dan sesuai dengan komponen *Alternative Development* dari UNODC yang kemudian diterapkan pada *pilot project* atau wilayah yang memiliki permasalahan narkoba.

Peran BNN dalam menerapkan komponen SAD UNODC Terdapat 9 target yang harus dilaksanakan, 9 target tersebut meliputi: Peran BNN dalam

⁶³ Badan Narkotika Nasional (BNN), Survei Nasional Penyalahgunaan Narkoba Tahun 2021, Pusat Penelitian, Data, dan Informasi Badan Narkotika Nasional 2022, Hal 67.

Menerapkan *Agriculture Development* SAD UNODC melalui GDAD di Indonesia, Peran BNN dalam Menerapkan *Basic Infrastructure* SAD UNODC Melalui GDAD di Indonesia, Peran BNN dalam Menerapkan *Community Development* SAD UNODC Melalui GDAD di Indonesia, Peran BNN dalam Menerapkan *Education* SAD UNODC Melalui GDAD di Indonesia, Peran BNN dalam Menerapkan *Environmental Protection* SAD UNODC Melalui GDAD di Indonesia, Peran BNN dalam Menerapkan *Gender Equality* SAD UNODC Melalui GDAD di Indonesia, Peran BNN dalam Menerapkan *Health* SAD UNODC Melalui GDAD di Indonesia, Peran BNN dalam Menerapkan *Improve Markets* SAD UNODC Melalui GDAD di Indonesia, Peran BNN dalam Menerapkan *Security Role of Law* SAD UNODC Melalui GDAD di Indonesia. Dalam Sembilan sub bab tersebut akan dijelaskan lebih rinci oleh peneliti mengenai capaian peran serta rencana tindak lanjut.

A. Peran BNN dalam Menerapkan *Agriculture Development* SAD UNODC melalui GDAD di Indonesia

Dalam rangka mengentaskan Indonesia sebagai negara produsen narkoba, terdapat peran BNN dalam menerapkan pembangunan pertanian (*Agriculture Development*), pada target ini dinilai sangat efektif dibuktikan dengan adanya panen raya tanaman komoditi pengganti tanaman narkoba di lokasi *pilot project* yang sesuai dengan Inpres No. 6 tahun 2018 tentang P4GN dalam pengembangan potensi masyarakat kawasan rawan narkoba melalui *Alternative*

Development.⁶⁴ dalam rangka pengimplementasikan GDAD BNN pada target *Agriculture Development* SAD UNODC. Mengaca pada negara Thailand yang mana negara Thailand juga telah menerapkan program *Alternative Development* yang pada dalam sektor *Agriculture Development*, Thailand mengganti yang awalnya masyarakat mayoritas menanam tanaman opium dengan tanaman yang legal, dalam sektor tersebut, Thailand juga melaksanakan penyuluhan pertanian yang meliputi penyediaan bibit, penyediaan pupuk, pelatihan dan juga didukung dengan sektor-sektor lain seperti pembangunan infrastruktur dan lain sebagainya.⁶⁵ Begitupun dengan Indonesia, Indonesia juga memiliki capaian tersendiri dalam mengimplementasikan GDAD target *Agriculture Development* SAD UNODC dalam rangka penanggulangan narkoba di Indonesia sendiri dan pada setiap GDAD terus dimonitor serta di evaluasi mengenai sejauhmana tahapan *trust building* yang memberikan dampak bagi implementasi GDAD pada tahap berikutnya. Berikut merupakan capaian implementasi dalam menerapkan target pembangunan pertanian (*Agriculture Development*) SAD UNODC :

Penanaman Tanaman Komoditi Unggulan.

Melalui Kementerian Pertanian dan Dinas Pertanian Provinsi Aceh serta Pemerintah Kabupaten, terdapat aktivitas pengembangan budaya

⁶⁴ Humas BNN. "Panen Raya Bukti Keberhasilan Program Grand Design Alternative Development." Diakses 06 Januari 2023. <https://bandaacehkota.bnn.go.id/panen-raya-bukti-keberhasilan-program-grand-design-alternative-development/>.

⁶⁵ Bobby Anderson, "People, Land and Poppy: the Political Ecology of Opium and the Historical Impact of Alternative Development in Northwest Thailand," University of London, Forest and Society. Vol.1 (1): 48-59, ISSN:2549-4724, E-ISSN:2549-4333. <https://doi.org/10.24259/fs.v1i1.1495>.

menanam jagung dan diversifikasi pangan dengan mengganti tanaman ganja ke pertanian jagung se aceh yang dimulai dengan penanaman jagung di lokasi Bireun seluas 12.820 hektar, di Gayo Lues seluas 30 hektar serta di Lamteuba seluas 30 hektar.⁶⁶ Pada tahun 2018 Kementerian Pertanian melaksanakan penanaman perdana tanaman alternatif. Untuk tahun anggaran 2018, Kementerian Pertanian telah mengalokasikan kegiatan pada wilayah Gayo Lues berupa jagung hibrida, padi gogo, tanaman kopi, cabai merah serta bawang putih. Kementerian Pertanian sangat mendukung adanya program *Alternative Development* yang diadakan di Aceh. Oleh karena itu, Kementerian Pertanian mengalokasikan penyediaan alat mesin pertanian sebagai bentuk dukungan, diantaranya dengan memberikan bantuan berupa traktor roda 2 sebanyak 25 unit, alat tanam jagung sebanyak 30 unit dan cultivator sebanyak 15 unit. Dalam kesempatan tersebut, Bupati Gayo Lues menyampaikan terimakasih kepada pihak BNN dengan diadakanya program *Alternative Development* yang dipusatkan di Gayo Lues. Wilayah tersebut memang salah satu daerah produksi ganja. Terdapat sekitar 900 masyarakat Gayo Lues yang ditahan karena kasus narkoba, dan 1800 orang masih menjadi buronan.⁶⁷

⁶⁶ Badan Narkotika Nasional, 2019, Petunjuk Teknis Implementasi GDAD di Provinsi Aceh, Direktorat Pemberdayaan Alternatif Deputy Bidang Pemberdayaan Masyarakat Badan Narkotika Nasional RI Tahun 2019, 45-46.

⁶⁷ Kementerian Pertanian. "Kementan Dukung Pengembangan Alternative Development Aceh Bebas Narkoba." Diakses 02 Oktober 2022.
<https://www.pertanian.go.id/home/?show=news&act=view&id=2559>

Pada tahun 2019, program *Alternative Development* bergulir di Kabupaten Bireuen sebagai *pilot project* pengganti tanaman narkotika di Indonesia. Penanaman perdana komoditas unggulan di kawasan Bireuen tersebut sekaligus menandai implementasi GDAD pada areal seluas 12 ha pada kawasan Bireuen tahun ini. Dalam kegiatan tersebut dirasa program *Alternative Development* sangat bermanfaat, khususnya bagi para petani jagung yang dapat memanfaatkan potensi lahan pertanian produktif, untuk meningkatkan pendapatan ekonomi dan menciptakan kesejahteraan para petani yang menjadi sasaran GDAD tersebut. Bireuen memiliki potensi lahan yang luas untuk pengembangan jagung hibrida yang dimana Bireuen diharapkan dapat menjadi salah satu daerah pengembangan jagung hibrida, sehingga kelak bisa menjadi daerah penyumbang swasembada jagung di Indonesia, terkhusus pada provinsi Aceh. Dan pada penanaman jagung hibrida pada kawasan Bireuen diklaim sudah terlihat memberi hasil yang optimal. Kualitas bibit jagung yang ditanam juga dinilai sangat bagus yang dimana dalam kurun waktu 90 hari, jagung sudah dapat dipanen.⁶⁸

Diujung tahun 2019 BNN mengimplementasikan GDAD tanam jagung di kabupaten Aceh besar yang dilakukan dengan penanaman jagung di luas lahan 30 hektar yang mana area tersebut terdiri dari 5 hektar di kawasan Lamteuba, 5 hektar di Lamteuy, serta 20 hektar di

⁶⁸ Redaksi Metro Aceh. "GDAD 2019 Diluncurkan, BNN Aceh Mulai Penanaman Jagung di Bireuen." Diakses 02 Oktober 2022. <https://www.metroaceh.com/gdad-2019-diluncurkan-bnnp-aceh-mulai-penanaman-jagung-di-bireuen/>.

Lampakuk. Dengan dilaksanakan gerakan menanam jagung ini maka secara perlahan akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat hingga akhirnya keinginan untuk menanam ganja atau tanaman yang dilarang dapat berkurang dan hilang. Program pertanian komoditi jagung sudah masuk pada RPJMD Aceh dan untuk tahun 2020 juga sudah tercantum alokasi penanaman jagung dari pusat seluas 4000 hektar dan APBA 5000 hektar. Diharapkan dari program tanam jagung tersebut dapat terus dikembangkan di tahun tahun mendatang. Sementara itu, terdapat juga beberapa perusahaan yang menampung komoditi jagung yakni PT Japfa Comfeed Indonesia dan PT Blang Bintang yang dimana kedua perusahaan tersebut telah berkomitmen untuk menerima hasil produksi dari pertanian petani jagung. Dengan diadakanya penanaman komoditi jagung pada wilayah *pilot project* GDAD tersebut, sudah dapat dinyatakan terealisasi dalam mengimplementasikan GDAD pada tahun 2019 tersebut.⁶⁹ Di tahun 2019 juga terlaksana penanaman tanaman komoditi kopi yang telah tercapai sekitar 2.100 hingga di tahun 2022. Kopi gayo merupakan salah satu hasil dari tanaman komoditi unggulan program *Alternative Development* yang telah dikenal luas dalam dunia internasional. Di tahun 2019 juga dilaksanakan pengembangan kopi gayo di Aceh Tengah seluas 300 Ha dan program yang sama juga dilaksanakan di *pilot project* Gayo Lues seluas 400 Ha. Dengan berbagai

⁶⁹ Bidang Pemberdayaan Masyarakat Badan Narkotika Nasional RI. "Implementasi Program GDAD di Aceh Besar Tahun 2019." Diakses 02 Oktober 2022. <https://bnn.go.id/implementasi-program-gdad-aceh-besar-tahun-2019/>.

program, kolaborasi dan sinergi seluruh pihak, produksi kopi gayo akan lebih meningkat dan mampu memenuhi permintaan pasar dunia di masa mendatang. Berdasarkan data dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Aceh, setiap tahunnya Tanah Gayo mampu mengekspor biji kopi ke 18 Negara, seperti, Korea, China, Jepang, Hongkong, Malaysia, Singapura, Amerika serta Australia.⁷⁰

Dengan adanya peran BNN dalam menerapkan target *agriculture*, tentunya juga mendapati tantangan tersendiri dalam pengimplementasiannya, seperti, opini negatif dari masyarakat yang terpengaruh manfaat legalisasi ganja harus disikapi dengan penjelasan mengenai bahayanya penyalahgunaan tanaman narkotika serta peredarannya bagi sendi-sendi kehidupan.⁷¹ Capaian dari hasil *agriculture* tentu juga dirasakan oleh masyarakat, namun jika dibandingkan dengan hasil penanaman tanaman narkotika, tentu sangat jauh berbeda, sehingga kekhawatiran masyarakat akan kembali menanam tanaman narkotika akan kambuh dan terjadi lagi.⁷² Budaya bertani masyarakat yang masih bermental pedagang, yang artinya masyarakat masih membiasakan menjual seluruh hasil panen dan tidak menyisihkan sebagian untuk ditanam lagi atau juga membelanjakan semua uang hasil panen dengan

⁷⁰ Jamaan. "Menjaga Kualitas Kopi Gayo, Pemerintah Aceh, Sekretariat Daerah Aceh." diakses pada 11 Desember 2022.

<https://setda.acehprov.go.id/index.php/news/read/2019/06/29/487/menjaga-kualitas-kopi-gayo.html>.

⁷¹ Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, 2019, Petunjuk Teknis Implementasi GDAD di Provinsi Aceh, Direktorat Pemberdayaan Alternatif Deputi Bidang Pemberdayaan Masyarakat, 48.

⁷² Ibid. hal 56.

tujuan konsumtif serta kurang berfikir secara produktif. Minimnya lahan untuk petani berproduksi menjadikan semangat kerja para petani yang sudah terbangun terkendala akibat minimnya lahan.⁷³

Pada tahun 2020-2022 terdapat rencana tindak lanjut dari peran tersebut, seperti bekerja sama dengan PT. Ujang Internasional dan PT. Starbucks terkait adanya penanaman komoditi unggulan kopi yang mana para pekerjanya juga mayoritas wanita atau Wanatani. Yang mana kedua Perusahaan internasional tersebut juga melakukan kolaborasi dalam bekerjasama, seperti PT. Ujang yang menjadi supplier atau yang membeli kopi hasil dari penanaman komoditi alternatif dan akan dijual lagi ke PT. Starbucks. Dan kedua perusahaan internasional tersebut juga sudah hadir pada lokasi *pilot project Alternative Development* guna verifikasi lahan dengan tujuan agar harga kopi tidak turun serta agar kopi yang dijual standart dengan yang diminta oleh PT. Ujang Internasional dan PT. Starbucks. Dalam hal ini PT. Ujang Internasional juga memberi bantuan berupa mesin roasting kopi agar masyarakat di lokasi *pilot project* juga dapat menikmati hasilnya. Dengan data yang ada, tertulis bahwasanya pada tahun 2017-2022 pada daerah Aceh Besar terdapat 125 orang petani yang diberdayakan melalui penanaman jagung dengan luas lahan 150 Ha, daerah Bireuen terdapat 8.183.000 orang petani yang diberdayakan melalui penanaman jagung, sedangkan di wilayah Gayo Lues terdapat 4.240 orang petani yang diberdayakan melalui penanaman jagung dengan luas lahan 5.143 Ha. Lalu untuk penanaman kopi di wilayah Gayo Lues terdapat 2.100 orang

⁷³ Ibid. hal 57-58.

petani yang diberdayakan dengan luas lahan 2.100 juga. Dan jika ditotal keseluruhan pada tahun 2017-2022 terdapat 14.648 orang petani yang diberdayakan dengan luas lahan 20.493 Ha.⁷⁴

B. Peran BNN dalam Menerapkan *Basic Infrastructure* SAD UNODC Melalui GDAD di Indonesia

Dalam upaya penanggulangan narkoba, salah satunya dengan menerapkan program *Alternative Development* di negara-negara produsen narkoba yang bertujuan dalam membantu para petani-petani dengan adanya kegiatan yang dapat menghasilkan pendapatan yang cukup untuk mengurangi ketergantungan mereka pada pendapatan dari hasil penanaman tanaman narkoba, perlu adanya pembangunan infrastruktur yang bertujuan untuk membangun kepercayaan dan menjamin akses barang maupun jasa bagi para penduduk.⁷⁵ Maka dengan adanya pembangunan infrastruktur yang mapan, penerapan program *Alternative Development* sendiri akan berdampak positif dan dapat dikatakan pengurangan jumlah budidaya tanaman narkoba pada negara-negara produsen narkoba itu berhasil. Di Indonesia sendiri, BNN sebagai badan penanggulangan narkoba, dalam penerapan program *Alternative Development* nya juga melihat pada target-target yang dicanangkan oleh UNODC sendiri salah satunya pada target pembangunan infrastruktur (*basic infrastructure*). Berikut bentuk peran BNN dalam menerapkan target pembangunan infrastruktur dari UNODC melalui GDAD:

⁷⁴ Yudhi Widiarto, 2022, Wawancara BNN oleh Wulan Suci Guritno, pada 10 Desember 2022.

⁷⁵ United Nations Office on Drugs and Crime, *Making Difference Through Sustainable Alternative Development*, 1.

1. Berdirinya pabrik penetasan telur di Seuliemeum, Aceh Besar.⁷⁶

PT. Japfa Comfeed Indonesia Tbk melalui anak perusahaanya, PT Indojoya Agrinusa meresmikan sebuah Pabrik Penetasan Telur (*Hatchery*) dan *Teaching Farm* di Desa Seulimeum, Kabupaten Aceh Aceh Besar, Provinsi Aceh. Hal ini dilaksanakan dalam rangka mendukung adanya program *Alternative Development* yang digagas oleh BNN. Peresmian pabrik menghabiskan lahan seluas 6,2 hektar, dalam hal ini juga merupakan salah satu upaya PT. Japfa dalam mengembangkan serta mendekatkan usaha dengan para pelangganya di Provinsi Aceh. Selain hal tersebut pembangunan pabrik ini juga bertujuan untuk memenuhi kebutuhan pasar domestik yang terus meningkat di wilayah Aceh, serta membantu peternak lokal dalam menyediakan anak ayam broiler yang berkualitas.⁷⁷

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

⁷⁶ Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, 2019, Petunjuk Teknis Implementasi GDAD di Provinsi Aceh, Direktorat Pemberdayaan Alternatif Deputi Bidang Pemberdayaan Masyarakat, 53.

⁷⁷ Redaksi AB. "Bantu Peternak Lokal, JAPFA Resmikan Pabrik Penetasan Telur di Aceh Besar."Diakses pada 19 November 2022. <https://www.acehbisnis.com/news/bantu-peternak-lokal-japfa-resmikan-pabrik-penetasan-telur-di-aceh-besar/index.html>.

Gambar 4. 1 (Pabrik Penetasan Ayam di Seuliemeum, Aceh Besar)



(Sumber: <https://www.acehbisnis.com/news/bantu-peternak-lokal-japfa-resmikan-pabrik-penetasan-telur-di-aceh-besar/index.html>)

Pada gambar 4.1 terlihat berdirinya pabrik penetasan ayam di Seuliemeum, Aceh Besar. Dalam kesempatan terdapatnya pabrik yang dibangun tersebut, diharapkan fasilitas *Hatchery* dapat membantu menyediakan lapangan pekerjaan baru bagi masyarakat sekitar Seuliemeum, khususnya Aceh Besar. Fasilitas yang dibangun oleh PT. Japfa terdiri dari 3 unit kandang, yaitu *Commercial Farmn Closed House* yang berkapasitas 10.000 ekor, *Commercial Farm Open House* panggung yang berkapasitas 5.500 ekor serta *Commercial Farm Open House Postal* yang berkapasitas 4.500 ekor yang mana masing-masing kandang juga dilengkapi dengan fasilitas yang sama. PT. Japfa Comfeed Indonesia Tbk melalui anak usahanya, PT. Indojava Agrinusa yang bergerak dalam

bidang agribisnis akan terus berupaya untuk memberikan kontribusi yang positif serta berkelanjutan bagi masyarakat Aceh.⁷⁸

2. Pembangunan akses jalan dan sarana prasarana.⁷⁹

Dalam hal ini BNN membangun akses jalan dengan tujuan memudahkan akses transportasi umum serta perbaikan pasar di desa Lamteuba yang berguna untuk memberikan peluang usaha para pedagang.

3. Pembangunan Program Cetak Sawah.⁸⁰

Dalam hal ini, BNN melalui Tentara Nasional Indonesia (TNI) melakukan pembangunan infrastruktur berupa program cetak sawah guna membuka peluang usaha bagi buruh bangunan yang mana buruh bangunan serta penaggguran di lokasi program *Alternative Development* di terapkan agar mendapatkan penghasilan tambahan serta peningkatan pendapatan yang berkelanjutan.

4. Pengembangan Kawasan *Pilot Project* untuk Agrowisata.⁸¹

Dalam hal ini, BNN melalui Dinas Pariwisata mengembangkan *Pilot Project Alternative Development* untuk agrowisata. wilayah agrowisata tersebut berada di wilayah desa Agusen sebagai lokasi wisata alam di sungai Agusen. Selain itu kolaborasi antara Bappenas dan BNN melalui program *Alterenative Development* juga menyusun rencana

⁷⁸ Ibid.

⁷⁹ Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, 2019, Petunjuk Teknis Implementasi GDAD di Provinsi Aceh, Direktorat Pemberdayaan Alternatif Deputi Bidang Pemberdayaan Masyarakat, 55.

⁸⁰ Ibid.

⁸¹ Ibid, Hal 58.

pengembangan kawasan agrowisata dalam FGD di Kabupaten Gayo Lues. Hal tersebut diwujudkan dalam bentuk koordinasi bersama pengembangan kawasan antar stakeholder antara Kementerian atau Lembaga, Pemerintah Daerah, Dinas terkait serta masyarakat di kawasan, wilayah kawasan tersebut dipilih karena telah menjadi 3 kawasan *pilot project* GDAD BNN. Kegiatan FGD tersebut dilaksanakan pada tahun 2019 yang bertempat di kantor Bappeda Kabupaten Gayo Lues dengan peserta meliputi dari pihak Bappenas, BNN, BNNK Gayo Lues dan Task Force GDAD yang dibentuk khusus oleh Bupati Gayo Lues. Dalam hal tersebut dinyatakan bahwasanya seluruh pihak terkait menyatakan dukungannya terhadap GDAD dalam menjadikan agrowisata serta berharap seluruh SKPK dapat berperan dan bersinergi dalam mendukung GDAD.⁸²

5. Pembangunan Menara Pandang dan Akses Jalan.

Dalam hal ini BNN, melalui Dinas Bina Marga kabupaten Gayo Lues membangun menara pandang sebagai destinasi wisata. selain itu juga membangun akses jalan ke desa Papela yang menjadi salah satu destinasi wisata dalam menuju air terjun pada desa tersebut yang dulunya merupakan daerah yang dikenal sebagai basis penanaman tanaman ganja di Gayo Lues.⁸³

⁸² Dayamas. "Perkuatan GDAD Melalui Pengembangan Kawasan Agrowisata di Gayo Lues, Bidang Pemberdayaan Masyarakat BNN RI." Diakses pada 20 November 2022. <https://bnn.go.id/perkuatan-gdad-melalui-pengembangan-kawasan-agrowisata-gayo-lues/>.

⁸³ Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, 2019, Petunjuk Teknis Implementasi GDAD di Provinsi Aceh, Direktorat Pemberdayaan Alternatif Deputy Bidang Pemberdayaan Masyarakat, 59.

Dengan adanya peran BNN dalam menerapkan target pembangunan infrastruktur (*basic infrastructure*) melalui GDAD tentunya juga terdapat tantangan dalam menerapkan target tersebut seperti, dalam pembangunan infrastruktur yang berpengaruh pada perekonomian masyarakat di lokasi *pilot project*, dapat dikatakan skala ekonomi masih terlihat kecil, akan tetapi perubahan dan geliat pada lokasi *pilot project* mendapatkan simpati dan dapat membuka peluang berusaha yang lebih besar. Oleh karena itu, diharapkan semua seluruh pihak harus tetap merawat capaian-capaian pembangunan infrastruktur yang sudah ada dan berkelanjutan tersebut guna pengembangan ekonomi.⁸⁴ Dalam pengembangan agrowisata di lokasi *pilot project* yang salah satunya adalah capaian dalam penerapan *basic infrastructure*, perlu menjadi kalangan akademisi, peneliti serta praktisi untuk terus dieksplorasi, namun beberapa fakta ditemukan bahwasanya hal tersebut kurang mendapat perhatian dari pemerintah pusat, adanya pengembangan wisata pesisir di Aceh Besar dan Bireun menjadi strategi sekaligus tantangan bagi pemerintah agar menjadikan kawasan pesisir sebagai benteng dalam mencegah penyelundupan narkoba.⁸⁵

Pada tahun 2020-2022 terdapat rencana tindak lanjut dari peran tersebut, pada tahun tersebut akan terus ditindak lanjuti dalam bentuk peran di tahun 2019 untuk mengajak lebih banyak dunia usaha yang bertujuan membangun jejaring kerja dengan pemerintah daerah dalam

⁸⁴ Ibid, hal 56.

⁸⁵ Ibid, hal 59-60.

rangka pembangunan berkelanjutan GDAD BNN. Hal ini tentunya menguntungkan kedua belah pihak yang mana dunua usaha diberikan peluang dalam berusaha dan mengembangkan bisnisnya.⁸⁶

C. Peran BNN dalam Menerapkan *Community Development* SAD UNODC Melalui GDAD di Indonesia

BNN berperan menerapkan target pengembangan masyarakat (*Community Development*) melalui GDAD yang bertujuan mengantaskan Indonesia sebagai produsen narkoba, BNN tentunya juga bekerjasama dengan instansi, atau perusahaan guna mensukseskan target tersebut, diantaranya adalah sebagai berikut:

Kerjasama BNN dan PT. Japfa Comfeed Indonesia dalam memberdayakan masyarakat.

BNN bekerja sama dengan PT Japfa Comfeed Indonesia Tbk dan keduanya sepakat bekerjasama dengan ditandainya dengan nota kesepahaman pada tanggal 22 Juli 2019 di Banda Aceh. Kerjasama keduanya adalah mengenai dukungan pelatihan, kemitraan, pemasaran bagi program pemberdayaan alternatif, dan pascarehabilitasi yang meliputi dukungan pelaksanaan program informasi dan edukasi mengenai P4GN, pembentukan relawan anti narkoba, pembinaan dan peningkatan peran serta PT.Japfa Comfeed Indonesia adalah sebagai penggiat anti narkoba yang ditandai dengan adanya pelaksanaan tes atau uji narkoba pada

⁸⁶ Ibid, hal 63.

lingkungan PT.Japfa Comfeed Indonesia.⁸⁷ Melalui BNN yang bekerja sama dengan PT Japfa, BNN berperan menerapkan SAD UNODC pada target pembangunan infrastruktur (*Basic Infrastructure*) melalui GDAD. PT Japfa mendirikan pabrik penetasan ayam guna membangun kewirausahaan ternak ayam dengan masa panen 21 hari bagi masyarakat Lamteuba, khususnya di lokasi GDAD di Aceh Besar. Sementara itu, masyarakat binaan BNN diberdayakan melalui pemeliharaan ayam dengan pola kemitraan yang dilakukan di kandang-kandang milik masyarakat sesuai dengan persyaratan dan ketentuan yang dibutuhkan oleh PT.Japfa Comfeed Indonesia ataupun anak perusahaannya.⁸⁸

Selain itu, Kerjasama antara BNN dengan PT. Japfa Comfeed Indonesia adalah bertujuan memberdayakan perekonomian masyarakat Aceh Besar yang ditandai dengan PT. Japfa Comfeed Indonesia menerima hasil panen dari warga binaan yang berada dibawah Deputi Bidang Pemberdayaan Masyarakat BNN, hasil panen tersebut berupa jagung yang dihasilkan dari pengalih fungsikan lahan ganja menjadi lahan komoditi unggulan yang dikelola oleh masyarakat di Aceh. Dengan adanya kerjasama ini, diharapkan dapat mendorong dan menginspirasi pihak-pihak lain dalam mendukung dan berpartisipasi dalam program *Alternative*

⁸⁷ Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia. "BNN Gandeng PT. Japfa Comfeed Indonesia Sukseskan Alternative Development, Bidang Pemberdayaan Masyarakat." Diakses pada 15 Oktober 2022. <https://bnn.go.id/bnn-gandeng-pt-japfa-comfeed-indonesia-sukseskan-alternatif-development/>.

⁸⁸ Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, 2019, Petunjuk Teknis Implementasi GDAD Di Provinsi Aceh, Direktorat Pemberdayaan Alternatif Deputi Bidang Pemberdayaan Masyarakat BNN RI, 47.

Development tersebut.⁸⁹ Hal tersebut merupakan upaya pemberdayaan yang diperuntukkan masyarakat kawasan *Pilot Project GDAD* dengan tujuan agar masyarakat mencapai perubahan sosial yang lebih baik dan lebih berdaya serta memiliki kekuasaan, pengetahuan dan kemampuan agar dapat memenuhi hidup yang lebih baik lagi.

Gambar 4. 2 (Penandatanganan kerjasama BNN dan PT. Japfa Comfeed Indonesia)



(Sumber: <https://bnn.go.id/bnn-gandeng-pt-japfa-comfeed-indonesia-sukseskan-alternatif-development/>)

Pada gambar 4.2 terlihat bahwa PT. Japfa Comfeed Indonesia menandatangani nota kesepahaman dengan pihak BNN yang merupakan bentuk dari upaya mendukung upaya pemerintah dalam memberantas narkoba terutama pada program *Alternative Development* yang dicanangkan oleh BNN.

⁸⁹ Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia. "BNN Gandeng PT. Japfa Comfeed Indonesia Sukseskan Alternative Development, Bidang Pemberdayaan Masyarakat." Diakses pada 17 Oktober 2022. <https://bnn.go.id/bnn-gandeng-pt-japfa-comfeed-indonesia-sukseskan-alternatif-development/>.

Diharapkan dengan adanya kerjasama ini, peran PT. Japfa Comfeed Indonesia memberikan manfaat yang luas bagi masyarakat pada wilayah diberlakukanya program *Alternative Development*, terkhusus pada pengembangan masyarakat atau *Human Development*.

Dalam menerapkan target *Community Development*, tentunya juga terdapat suatu tantangan tersendiri dalam penerapanya, seperti banyak Kementerian atau Lembaga yang belum terlibat dalam pengembangan sosial budaya masyarakat sendiri di wilayah *Pilot Project*, banyak dunia usaha yang belum digandeng dan diajak melakukan investasi, banyak komoditi unggulan daerah yang belum terus dikembangkan sebagai asset unggulan daerah dalam rangka pengembangan masyarakat itu sendiri dan lain sebagainya.⁹⁰

Pada tahun 2020-2022 terdapat rencana tindak lanjut dari peran yang dilaksanakan BNN dalam menerapkan target SAD UNODC *Community Development* melalui GDAD, pada hal ini rencana tindak lanjut pada target *Community Development* hampir sama dengan target *Infrastructure*, yakni akan mengajak dan menggandeng lebih banyak lagi dunia usaha dalam kesempatan membangun jejaring kerja yang mana rencana tindak lanjut tersebut tentunya menguntungkan kedua belah pihak, dimana dunia usaha diberikan peluang berusaha dan mengembangkan bisnisnya sedangkan disisi lain BNN mempunyai capaian kerja dalam pengimplementasian program *Alternative Development*

⁹⁰ Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, 2019, Petunjuk Teknis Implementasi GDAD Di Provinsi Aceh, Direktorat Pemberdayaan Alternatif Deputy Bidang Pemberdayaan Masyarakat BNN RI, 48.

yang bermanfaat bagi masyarakat di *Pilot Project*.⁹¹ Selain itu, mengaca bahwasanya organisasi kemasyarakatan merupakan salah satu kunci penting dalam membangun modal sosial di masyarakat. Salah satu keberhasilan program adalah tersedianya modal sosial yang memungkinkan masyarakat dapat saling membangun kepercayaan dalam pembangunan. Maka dari itu, pada tahun 2020-2025 juga memiliki rencana tindak lanjut lagi yang terus digalakkan seperti pembentukan relawan, penggiat anti narkoba, agen pemulihan serta agen anti narkoba di semua lingkungan. Diharapkan dengan adanya dukungan moril dan materiil organisasi masyarakat dalam ikut serta menerapkan target *Community Development* melalui GDAD, hal ini semakin meningkatkan kinerja serta capaian kerjanya.⁹²

D. Peran BNN dalam Menerapkan *Education* SAD UNODC Melalui GDAD di Indonesia

BNN dalam mensukseskan GDAD, tentunya juga perlu adanya pengimplementasian standart dari UNODC sendiri, salah satunya adalah pada target Edukasi (*Education*). Yang mana hal tersebut akan membawa manfaat penting untuk masyarakat wilayah yang menjadi sasaran GDAD tersebut. Berikut merupakan bentuk dari peran BNN dalam menerapkan target education SAD UNODC melalui GDAD:

⁹¹ Ibid, Hal 62-63.

⁹² Ibid, hal 64.

1. Pelaksanaan *Life skill* Teknis Keterampilan Hidup.

BNN, BNNP dan BNNK melaksanakan bimbingan teknis ketrampilan hidup (*life skill*) kewirausahaan dengan tujuan meningkatkan produktifitas serta bernilai jual tinggi pada komoditi lokal.⁹³ Dalam hal tersebut terlihat pada BNN Direktorat Pemberdayaan Alternatif Deputy Pemberdayaan Masyarakat bersama BNNK Gayo Lues menggelar kegiatan bimbingan teknis *life skill* pada masyarakat pedesaan pada kabupaten Gayo Lues dengan jumlah peserta sebanyak 48 orang yang terdiri dari camat, Kapolsek, Danramil, Pengulu, Para Petani, Tokoh Masyarakat, Tokoh Pemuda serta Tokoh Agama Kabupaten Gayo Lues. Bimbingan teknis *life skill* tersebut di narasumberi oleh Kasubdit Masyarakat Pedesaan BNN RI dan Kepala BNNK Gayo Lues. Kegiatan ini bertujuan agar masyarakat memiliki keterampilan serta dapat mengembangkan kewirausahaan pada baidang jasa pembuatan kawat bronjong yang memang sebelumnya kegiatan *life skill* adalah mengusung materi pelatihan pembuatan bronjong. Dengan adanya pelatihan pembuatan kawat bronjong tersebut tentunya dapat memberi manfaat bagi masyarakat Gayo Lues yang dapat membantu mencegah hama serta dapat membantu usaha kontruksi lainnya yang masih menggunakan kawat bronjong dan tentunya masih sangat diperlukan di wilayah Gayo Lues. Keahlian yang didapat pada kegiatan *life skill* tersebut dapat dijadikan usaha alternatif selain pada

⁹³ Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, 2019, Petunjuk Teknis Implementasi GDAD Di Provinsi Aceh, Direktorat Pemberdayaan Alternatif Deputy Bidang Pemberdayaan Masyarakat BNN RI, 47.

sektor pertanian, guna meningkatkan pendapatan masyarakat dan berdampak pada berkurangnya aktivitas penanam budidaya ganja.⁹⁴

Gambar 4. 3 (Bimbingan Teknis Life Skill)



(Sumber: <https://gayolueskab.bnn.go.id/bnn-gelar-bimbingan-teknis-life-skill-pada-masyarakat-kawasan-pedesaan-di-kabupaten-gayo-lues/>)

Pada gambar 4.3 terlihat adanya kegiatan bimbingan teknis *life skill* yang diadakan oleh BNN dan BNNK Gayo lues yang dilaksanakan dengan tujuan agar masyarakat sasaran program *Alternative Development* dapat memperoleh pendapatan selain dari segi pertanian dan juga dapat mengurangi aktivitas para petani yang sebelumnya membudidayakan tanaman ganja

⁹⁴ Humas BNN. "BNN Gelar Bimbingan Teknis Life Skill Pada Masyarakat Kawasan Pedesaan di Kabupaten Gayo Lues." Diakses pada 24 Oktober 2022. <https://gayolueskab.bnn.go.id/bnn-gelar-bimbingan-teknis-life-skill-pada-masyarakat-kawasan-pedesaan-di-kabupaten-gayo-lues/>.

2. Pelaksanaan Pembinaan Kelompok Tani.

Dalam hal ini, BNN melalui Kementerian Pertanian serta Dinas Pertanian Provinsi Aceh melaksanakan pembinaan kelompok tani. khususnya para petani mantan penanam tanaman ganja yang telah beralih ke pertanian komoditi. Pembinaan tersebut dengan dilakukannya pembekalan komoditi, pemberian bibit, saprodi, penyuluhan, pendampingan serta solusi pasca panen.⁹⁵ Contohnya terlaksananya bimbingan teknis (BIMTEK) yang mana para petani dibina dalam mengalih tanaman ganja ke tanaman yang memiliki harga jual tinggi di pasar seperti nilam, kunyit, jagung dan lain sebagainya yang sehingga para petani generasi selanjutnya menjadi generasi yang bebas akan narkoba. Selain itu, pemahaman ini juga harus disebar luaskan dan juga memerlukan sosialisasi agar masyarakat terus dapat mencegah serta mengantisipasi gejala narkoba di kalangan masyarakat.

Gambar 4. 4(Pembinaan Masyarakat Petani oleh Dinas Pertanian Aceh)



(Sumber: <http://cybex.pertanian.go.id/mobile/artikel/71106/Dinas-Pertanian-Aceh-Besar-Mendukung-GDAD-BNN/>)

⁹⁵ Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, 2019, Petunjuk Teknis Implementasi GDAD Di Provinsi Aceh, Direktorat Pemberdayaan Alternatif Deputy Bidang Pemberdayaan Masyarakat BNN RI, 53.

Pada gambar 4.4 terlihat bahwasanya Dinas Pertanian Aceh Besar mendukung serta mengapresiasi adanya GDAD BNN yang berkelanjutan hingga tahun 2025 tersebut, bentuk dari dukungan tersebut adalah dengan diadakanya BIMTEK stakeholder pada masyarakat rawan narkoba di kabupaten Aceh Besar tersebut. Diharapkan komitmen dan ikhtiar dapat diimplementasikan hingga mencapai petani yang sejahtera, mandiri juga berkelanjutan sehingga bersih dari narkoba.⁹⁶

3. Pemberian pelatihan kewirausahaan bagi KIPAN.

Dalam hal ini BNN memberikan pelatihan kewirausahaan bagi KIPAN (Kader Inti Pemuda Anti Narkoba) di provinsi Aceh dan diikuti oleh kader pemuda dari 3 lokasi *Pilot Project* oleh Kementerian Pemuda dan Olahraga.⁹⁷

Dengan adanya peran BNN dalam menerapkan target *Education* SAD UNODC melalui GDAD, tentunya juga memiliki tantangan tersendiri dalam pengimplementasiannya, seperti, belum banyak Kementerian atau Lembaga yang terlibat dalam adanya pengedukasian masyarakat di wilayah *Pilot Project* yang harapanya dengan kerangka kerja Inpres 2020-2024 tentang RAN P4GN, diharapkan peran serta aktif dari Kementerian atau Lembaga serta dunia usaha dapat terus ditingkatkan, opini dari masyarakat yang terpengaruh legalisasi

⁹⁶ Afriadi, SP. "Dinas Pertanian Aceh Besar Mendukung GDAD BNN." Diakses pada 23 November 2022. <http://cybex.pertanian.go.id/mobile/artikel/71106/Dinas-Pertanian-Aceh-Besar-Mendukung-GDAD-BNN/>.

⁹⁷ Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, 2019, Petunjuk Teknis Implementasi GDAD Di Provinsi Aceh, Direktorat Pemberdayaan Alternatif Deputy Bidang Pemberdayaan Masyarakat BNN RI, 46.

ganja harus disikapi dengan baik dengan menjelaskan mengenai bahayanya penyalahgunaan tanaman narkotika serta peredaranya.⁹⁸

Pada tahun 2020-2022 terdapat rencana tindak lanjut dari peran BNN dalam menerapkan target *Education* SAD UNODC, seperti yang dijelaskan pada tantangan di target *Education* sendiri, yang mana pada tahun 2020-2022 akan menggandeng lebih aktif lagi Kementerian atau Lembaga yang terlibat seperti yang diharapkan pada kerangka Inpres tahun 2020-2024 tentang RAN P4GN yang diharapkan Kementerian atau Lembaga yang terkait akan berperan lebih aktif lagi seperti mengadakan edukasi penyuluhan pada masyarakat dan lain sebagainya.⁹⁹ Selain itu, mengaca pada peran akademisi serta praktisi sangat diperlukan bagi pengembangan GDAD, yang mana salah satu peran yang sangat penting untuk terus diharapkan adalah kajian serta riset implementasi GDAD yang bertujuan mengembangkan sosial budaya serta sumber daya lainnya. Saat ini perguruan tinggi memiliki peran yang strategis dalam menjembatani program-program pemerintah untuk diterima di masyarakat, melalui riset, pendampingan, kuliah kerja lapangan dan kuliah kerja nyata yang dapat mengedukasi serta memungkinkan tereksplorasinya potensi hasil-hasil kajian dan riset yang berdampak dalam memberikan kemudahan investasi para investor. Salah satu hal yang dapat terus ditindak lanjuti dalam implementasi GDAD target *Education* SAD UNODC adalah dengan adanya pendampingan mahasiswa dalam mendukung gerakan Masyarakat Sehat (Germas), gerakan membangun Generasi Terencana (Genre), mengembangkan desa mandiri, desa

⁹⁸ Ibid, Hal 48.

⁹⁹ Ibid, hal 61.

maritim serta mengedukasi masyarakat agar menjadikan desa melek akan internet atau media sosial dan lain sebagainya.¹⁰⁰

E. Peran BNN dalam Menerapkan *Environmental Protection* SAD UNODC Melalui GDAD di Indonesia

Dalam mengatasi permasalahan narkoba di Indonesia, khususnya di wilayah Aceh, BNN memiliki peran yaitu membuat desain baru yang disebut GDAD, perlindungan lingkungan sangat diperlukan dalam program *Alternative Development* dimana program tersebut berfokus pada pengalihfungsikan para petani ganja ke pertanian komoditi unggulan, karena dampak produksi ganja dan penyalahgunaanya secara multidimensi dapat merugikan bangsa, baik secara fisik, psikis, sosial, ekonomi, budaya, keamanan serta ketahanan bangsa.

Dalam berperan menerapkan target Perlindungan Lingkungan (*Enviromental Protection*) SAD UNODC melalui GDAD, berikut adalah capaiannya:¹⁰¹

1. Pemberian Hutan Produksi.

BNN bekerjasama melalui Dinas Kehutanan dan Perkebunan Provinsi memberikan hutan produksi. dalam jangka waktu 35 tahun kepada masyarakat yang bertinggal di tepi hutan yang digunakan untuk ditanami tanaman pohon produksi yang nantinya tanaman pohon produksi tersebut dapat memberikan manfaat pada masyarakat sekitar hutan dan masyarakat dapat mengambil hasil dari hutan tersebut.

¹⁰⁰ Ibid, hal 63.

¹⁰¹ Ibid, Hal 50-51.

2. Pembinaan Kelompok Guna Peningkatan Kesejahteraan.

BNN bekerjasama melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. membina lebih dari 150 kelompok dalam program perhutanan sosial di Aceh yang mana pembinaan tersebut bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dengan tanpa merusak hutan serta meningkatkan penjagaan ekosistem hutan.

3. Penanaman Kembali Hutan Pada Wilayah Bantaran Sungai Agusen.

Dalam hal ini, BNN melalui Pemerintah Kabupaten Gayo Lues beserta kuasa pengelola hutan (KPH) 5 melaksanakan penanaman kembali hutan pada wilayah bantaran sungai Agusen.

4. Pendampingan Penyuluh Pertanian.

Dalam hal ini, BNN melaksanakan pendampingan penyuluh pertanian di Kabupaten Aceh Besar dalam rangka penanaman komoditi kunyit sebagai tumpeng sari pohon jabon di wilayah Lamteuba serta memotivasi para petani di wilayah Lamteuba menanam Jabon sebagai tanaman komoditi sekaligus melestarikan hutan.

Dengan adanya capaian-capaian implementasi GDAD BNN dalam menerapkan target perlindungan lingkungan (*Enviromental Protection*) tentunya juga memberikan dampak positif terhadap masyarakat-masyarakat pada wilayah di terapkanya program *Alternative Development* atau di Aceh. Dengan capaian tersebut masyarakat desa Agusen merasakan manfaat yang lebih dengan adanya peremajaan hutan dengan cara merawat kembali kebun kopi yang bertempat di

bantaran sungai Agusen, Gayo Lues dengan berproduksi panen per minggu mencapai 4-5 Kg dengan harga kopi mentah per kilo mencapai 70.000, masyarakat yang bertinggal pada wilayah tepi hutan dapat menyewa hutan produksi guna menanam tanaman komoditi unggulan seperti menjadi kebun buah-buahan yang mana hasil dari menanam tersebut nantinya akan menjadi penghasilan tersendiri bagi masyarakat sebagai menambah pendapatan, melalui pembinaan penanaman tanaman komoditi jernang, masyarakat dapat mengelola serta memasarkan tanaman jernang tersebut yang mana tanaman jernang merupakan tanaman dengan harga pasar yang cukup mahal, masyarakat pada wilayah Lamteuba menunggu hasil panen dari penanaman Kayo Jabon pada *Alternative Development* di tahun 2012 yang mana tanaman tersebut sudah berusia 7 tahun dengan menanam tanaman tumpangsari kunyit per pohon jabon yang pada saat itu telah tertanam kurang lebih 500 pohon di Lamteuba.¹⁰²

Dengan adanya peran BNN dalam Menerapkan Perlindungan Lingkungan (*Environmental Protection*) SAD UNODC melalui GDAD tentunya juga terdapat tantangan ataupun hambatan yang adalah Angka kerusakan hutan di wilayah Aceh terbilang cukup memprihatinkan, oleh karena itu perlu adanya tindakan bersama atau operasi gabungan guna memberantas illegal logging serta eradikasi ganja, Lokasi hutan yang sulit dijangkau oleh pihak yang berwenang dalam operasi pemberantasan ganja telah menyebabkan rencana reboisasi terhambat oleh medan yang sulit serta pola penanaman ganja yang berulang. Oleh karena itu, perlu menghidupkan kembali Polisi Hutan, Kurangnya

¹⁰² Ibid, hal 51-52.

koordinasi antara praktisi reboisasi telah menyebabkan kurang dihargainya hutan gundul yang menyebabkan bekas eradikasi tumbuh tanaman ganja. Oleh karena itu, perlu melibatkan pihak kehutanan dalam setiap operasi pemberantasan ganja.¹⁰³

Pada tahun 2020-2022 terdapat rencana tindak lanjut dari peran BNN dalam menerapkan target SAD UNODC *Environmental Protection* melalui GDAD seperti mengaca pada tantangan yang ada yang mana pada tantangan tersebut terdapat kurangnya koordinasi, antara praktisi maupun instansi, maka di rencana tindak lanjut akan melakukan koordinasi, sinergi, kemitraan serta pelibatan seluruh stakeholder dan komponen masyarakat dengan lebih baik lagi.¹⁰⁴

F. Peran BNN dalam Menerapkan *Gender Equality* SAD UNODC Melalui GDAD di Indonesia

Perspektif Gender merupakan penilaian implikasi dari setiap tindakan yang direncanakan baik bagi perempuan maupun laki-laki. Pendekatan ini bertujuan untuk memastikan bahwasanya laki-laki dan perempuan mendapat manfaat yang sama dalam mengintegrasikan pengalaman serta perhatian dalam rancangan, implementasi, pemantauan dan evaluasi kebijakan pada seluruh bidang baik bidang politik, ekonomi maupun sosial yang tujuannya adalah untuk mencapai kesetaraan gender. Proyek pengembangan alternatif UNODC mulai

¹⁰³ Ibid. hal 52.

¹⁰⁴ Badan Narkotika Nasional RI, 2019, Petunjuk Teknis Implementasi GDAD di Provinsi Aceh, Direktorat Pemberdayaan Alternatif Deputi Bidang Pemberdayaan Masyarakat BNN RI, 61.

secara khusus melibatkan perempuan. Akan tetapi, berjalan dengan seiringnya waktu, memberlakukan perempuan sebagai penerima manfaat khusus dalam proyek-proyek pembangunan alternatif itu menjadi jelas bahwasanya isu-isu perempuan seringkali hanya pelengkap intervensi pembangunan. Walaupun kebijakan menganjurkan keterlibatan perempuan, mereka tidak serta merta mempromosikan pengarusutamaan gender dalam program kebijakan, perencanaan dan implementasi proyek. Sejalan dengan mandat yang diberikan dalam rencana aksi kerjasama internasional pemberantasan tanaman narkotika dan pembangunan alternatif, UNODC berusaha meningkatkan fokus pada gender dari proyek pembangunan alternatif tersebut.¹⁰⁵ dengan adanya fokus gender pada pembangunan alternatif tersebut, UNODC juga menerapkan ke beberapa negara produsen narkoba seperti negara Laos dimana para wanita terlibat dalam kegiatan program pengembanagn alternatif atau *Alternative Development* seperti produksi beras, jagung serta memelihara ternak. Para wanita tersebut sangat diuntungkan dari penghapusan tanaman opium karena mereka biasa melakukan sebagian besar tugas yang padat terkait budidaya opium.¹⁰⁶

Negara indonesia sebagai salah satu produsen tanaman narkotika juga mencanangkan program *Alternative Development* sendiri yang bertarget pada komponen *Alternative Development* dari UNODC, salah satunya adalah pada

¹⁰⁵ United Nations Office on Drugs and Crime. "Alternative Development, Gender Mainstreaming in Alternative Development." Diakses pada 10 Desember 2022. https://www-unodc-org.translate.googleusercontent.com/translate/en/unodc/en/alternative-development/gender-mainstreaming-in-alternative-development.html?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=id&_x_tr_hl=id&_x_tr_pto=sc.

¹⁰⁶ United Nations Office on Drugs and Crime, *Making a Different Through Sustainable Alternative Development*, 3.

target *Gender Equality* atau kesetaraan gender. Di tahun 2019, BNN berperan dalam menerapkan program tersebut melalui GDAD yang berdasar pada komponen *Alternative Development* UNODC, berikut capaian-capaiannya:

1. Pelatihan *Life skill* pada wanita

Dalam hal ini, terlaksana pelatihan *life skill* bidang menjahit yang mayoritas pesertanya adalah wanita. Pada pelatihan *life skill* bidang menjahit tersebut, para wanita diajak serta diajarkan beralih pada profesi menjahit yang mana sebelumnya berprofesi sebagai para penanam ganja serta menyalahgunakan tanaman-tanaman ganja. Bahkan banyak para wanita yang menyalahgunakan tanaman-tanaman ganja yang mereka tanam, seperti dijadikannya sayur atau lauk-pauk keseharian. Oleh karena itu, dengan adanya program *Alternative Development* di *pilot project* yang memberikan program pelatihan *life skill* bidang menjahit pada wanita, diharapkan kebiasaan-kebiasaan sebelumnya akan berkurang.¹⁰⁷

2. Penanaman Komoditi Alternatif.

Dalam hal ini juga terlaksana penanaman komoditi alternatif seperti jagung dan kopi, selain para lelaki, para wanita juga menjadi perhatian akan terlaksananya penanaman komoditi alternatif di wilayah *pilot project* tersebut, bahkan juga dibentuk kelompok para petani wanita yang bekerja

¹⁰⁷ Yudhi Widiarto, 2022, Wawancara BNN oleh Wulan Suci Guritno, pada 10 Desember 2022.

pada penanaman komoditi alternatif yang biasa disebut dengan “Wanatani”¹⁰⁸

Pada tahun 2020-2022 terdapat rencana tindak lanjut dari peran BNN dalam menerapkan target SAD UNODC *Gender Equality* melalui GDAD, seperti akan terus melaksanakan pelatihan-pelatihan *life skill* lagi bagi para wanita, agar keinginan untuk menanam ganja dan menyalahgunakannya tidak lagi terjadi, bekerja sama dengan PT. Ujang Internasional dan PT. Starbucks terkait adanya penanaman komoditi unggulan kopi yang mana para pekerjaanya juga mayoritas wanita atau Wanatani. Yang mana kedua Perusahaan internasional tersebut juga melakukan kolaborasi dalam bekerjasama, seperti PT. Ujang yang menjadi supplier atau yang membeli kopi hasil dari penanaman komoditi alternatif dan akan dijual lagi ke PT. Starbucks. Dan kedua perusahaan internasional tersebut juga sudah hadir pada lokasi *pilot project Alternative Development* guna verifikasi lahan dengan tujuan agar harga kopi tidak turun serta agar kopi yang dijual standart dengan yang diminta oleh PT. Ujang Internasional dan PT. Starbucks. Dalam hal ini PT. Ujang Internasional juga memberi bantuan berupa mesin roasting kopi agar masyarakat di lokasi *pilot project* juga dapat menikmati hasilnya.¹⁰⁹

¹⁰⁸ Ibid.

¹⁰⁹ Ibid.

G. Peran BNN dalam Menerapkan *Health SAD* UNODC Melalui GDAD di Indonesia

Bidang kesehatan dinilai sangat penting dalam upaya pencegahan narkoba, khususnya terhadap adanya program *Alternative Development*, seperti di negara Thailand yang merupakan salah satu negara berhasil dalam menerapkan program *Alternative Development* yang juga melaksanakan target pada bidang kesehatan sesuai komponen *Alternative Development* UNODC, seperti contoh, Thailand mengembangkan tempat-tempat pengobatan dan rehabilitasi guna menyembuhkan pecandu narkoba agar terbebas dari ketergantungan pada penggunaan narkoba.¹¹⁰ Begitupun di Indonesia, BNN berperan dalam menurunkan angka narkoba dengan menerapkan target kesehatan sesuai pada komponen *Alternative Development* UNODC melalui GDAD, berikut capaiannya:

1. Pelaksanaan Rehabilitasi

Dalam hal ini, BNN melalui Rumahsakit umum daerah dan klinik BNNP Aceh melaksanakan rehabilitasi para pecandu narkoba dengan tujuan mengurangi resiko ancaman keamanan dan ketertiban oleh aksi penyalahgunaan serta peredaran gelap para pecandu narkoba.¹¹¹ Adanya pengobatan dan rehabilitasi sangatlah diperlukan bagi para pecandu

¹¹⁰ Riduwan Effendi Siregar, "Upaya Thailand dalam Penanggulangan Drugs Trafficking Menuju Drug-Free ASEAN 2015," Jurnal Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Riau, Jom FISIP Volume 1 No. 2-Okttober 2014. <https://www.neliti.com/publications/31836/upaya-thailand-dalam-penanggulangan-drugs-trafficking-menuju-drug-free-asean-201>.

¹¹¹ Badan Narkotika Nasional RI, 2019, Petunjuk Teknis Implementasi GDAD di Provinsi Aceh, Direktorat Pemberdayaan Alternatif Deputi Bidang Pemberdayaan Masyarakat BNN RI, 49.

narkoba. Upaya ini dilakukan untuk mengurangi permintaan narkoba yang semakin meningkat. Dalam hal ini juga dilakukan penjangkauan, siapa yang merupakan penyalahguna narkoba akan dilakukan rehabilitasi melalui rawat jalan juga.

2. Pelatihan *Life Skill* Gerakan Hidup Sehat

Pada pelatihan *life skill* ini dilaksanakan untuk masyarakat kawasan narkoba atau pada kawasan *pilot project Alternative Development*, pelatihan *life skill* ini terdapat dua materi yang disampaikan yaitu yang pertama, pembinaan pola hidup sehat melalui sosialisasi mengenai Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) atau gerakan masyarakat hidup sehat, yang kedua, Pelatihan *life skill* berdasarkan kearifan lokal masing-masing seperti pelatihan pembuatan pupuk organik. Dalam hal ini BNN menggandeng Kementerian Kesehatan serta dinas terkait.¹¹²

Pada tahun 2020-2022 terdapat rencana tindak lanjut dari peran BNN dalam menerapkan target *Health SAD UNODC* melalui GDAD, yakni dengan berjalan seiring waktu BNN, BNNP, BNNK akan terus melaksanakan penjangkauan pada masyarakat pecandu narkoba, melaksanakan pemeriksaan lebih ketat lagi seperti, tes urine jika

¹¹² Ibid.

dilaksanakannya kegiatan guna menemukan para penyalahguna dan pecandu narkoba.¹¹³

H. Peran BNN dalam Menerapkan *Improve Markets* SAD UNODC Melalui GDAD di Indonesia

Program *Alternative Development* yang mana berfokus pada pengalihfungsikan para petani ganja ke pertanian komoditi unggulan, tentunya juga membutuhkan strategi pemasaran yang bertujuan agar dapat memasarkan produk pengalihfungsikan tanaman ganja dengan tingkat harga pasar yang tinggi. Integrasi ke dalam pasar global menawarkan potensi pertumbuhan ekonomi yang lebih cepat. Meskipun membuka pasar tidak akan berhasil dengan sendirinya, keberhasilan pembangunan selama dekade terakhir umumnya dikaitkan dengan orientasi ke luar, namun banyak negara berkembang mengalami kesulitan untuk memanfaatkan sepenuhnya peluang pasar global. Respons pasokan lemah karena berbagai alasan yang struktural, termasuk kapasitas kelembagaan yang lemah ataupun juga karena kebijakan yang seringkali tidak mendukung.¹¹⁴ Dalam melaksanakan peran pada target penerapan peningkatan pasar (*Improve Markets*), tentunya BNN juga bekerjasama dengan beberapa pihak guna mensukseskan pengimplementasian target tersebut, diantaranya adalah sebagai berikut:

¹¹³ Ibid.

¹¹⁴ IMF Staff. "Improving Market Access: Toward Greater Coherence Between Aid and Trade, International Monetary Fund." Diakses pada 04 November 2022. https://www-imf-org.translate.google/external/np/exr/ib/2002/032102.htm?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=id&_x_tr_hl=id&_x_tr_pto=sc.

1. Kerja sama BNN Melalui Kementerian Luar Negeri dan KBRI serta Kedubes RI untuk Austria.

Dalam hal ini, BNN melalui Kementerian Luar Negeri dan KBRI serta Kedubes RI untuk Austria melaksanakan pameran produk dari program *Alternative Development* yaitu kopi Gayo serta produk hasil binaan masyarakat yang rawan narkoba lainnya di Rotunda tepatnya di Markas UNODC, Vienna yang dilaksanakan pada sidang *Commission on Narcotic Drugs* (CND) ke-43. Pameran ini juga dikunjungi para delegasi dari 172 negara yang mempromosikan mengenai kopi gayo atau hasil dari program *Alternative Development* di Aceh.¹¹⁵

2. Kerja sama BNN melalui Kementerian Luar Negeri, KBRI dan Pemerintah Kabupaten Gayo Lues dalam Promosi Kopi Gayo.

Dalam hal ini, BNN melakukan kerjasama melalui Kementerian Luar Negeri, KBRI dan Pemerintah Kabupaten Gayo Lues dalam mempromosikan kopi gayo yang merupakan salah satu hasil dari program *Alternative Development* di Aceh yang dipromosikan pada ajang *Global Specialty Coffee Expo* (GSCE) di Seattle , Washington Amerika Serikat.¹¹⁶

Acara tersebut juga turut diikuti oleh Pemprov Aceh yang juga ikut mempromosikan potensi alam serta industri pariwisata. Kopi Gayo hasil dari program *Alternative Development* tersebut diklaim sebagai kopi dengan cita rasa yang unik dan telah menjadi primadona setiap

¹¹⁵ Badan Narkotika Nasional RI, 2019, Petunjuk Teknis Implementasi GDAD di Provinsi Aceh, Direktorat Pemberdayaan Alternatif Deputi Bidang Pemberdayaan Masyarakat BNN RI, 46

¹¹⁶ Ibid.

pengunjung yang hadir pada even *Global Specialty Coffee Expo (GSCE)*. Pameran kopi internasional tersebut tidak hanya mengenalkan kopi asal Aceh dengan segala keunggulannya, namun para pengunjung dan peserta juga dapat merasakan langsung kenikmatan Kopi Arabika Gayo.

Gambar 4. 5(Global Specialty Coffee Expo (GSCE))



(Sumber: <https://kumparan.com/kumparannews/kopi-gayo-aceh-jadi-primadona-dalam-ajang-coffee-expo-2018-di-as>)

Pada gambar 4.4 terlihat pada even GSCE, Indonesia memperkenalkan kopi gayo dan hal tersebut disambut baik oleh masyarakat dunia, dikarenakan mereka dapat merasakan langsung citarasa kenikmatan Kopi Arabika Gayo yang diracik khusus oleh barista pada stan kopi Aceh. Dengan adanya even tersebut, kopi asal Aceh dikenal masyarakat internasional dan branding “*Green Mountain Organic Kopi, Aceh-Sumatera*” telah beredar luas di beberapa pusat perbelanjaan atau mall besar di kawasan Amerika Serikat. Hal ini adalah sebagai indikator bahwasanya kopi Gayo dari Aceh telah dikenal dan disukai

oleh masyarakat secara global.¹¹⁷ Selain mempromosikan kopi gayo, Indonesia juga memperkenalkan para investor berbagai peluang investasi di Aceh melalui forum yang dikemas khusus oleh KBRI di Washington DC Indonesia-USA *Business Forum: Aceh Investment Opportunities*.¹¹⁸ Dengan adanya even tersebut yang memperkenalkan Kopi Gayo yang merupakan salah satu produk hasil dari program *Alternative Development*, para pelaku industri kopi Aceh patut berbangga karena kopi asal Aceh sudah banyak dikenal dan beredar luas di kawasan Amerika Serikat.

3. Pemberian Fasilitas Pemasaran Online.

Dalam hal ini, BNN memberi fasilitas pemasaran online. untuk hasil karya masyarakat binaan program *Alternative Development* di kawasan rawan narkoba atau di wilayah Aceh.¹¹⁹

4. Pemberian Pelatihan serta Pembekalan Khusus.

Dalam hal ini, BNN melalui Dinas Koperasi dan UKM, memberikan pelatihan khusus serta pembekalan. mengenai bagaimana cara mengolah hasil panen produk, mengemas serta teknik memasarkan dengan

¹¹⁷ Kumparan News. "Kopi Gayo Aceh Jadi Primadona dalam Ajang Coffee Expo 2018 di AS." Diakses pada 05 November 2022. <https://kumparan.com/kumparannews/kopi-gayo-aceh-jadi-primadona-dalam-ajang-coffee-expo-2018-di-as>.

¹¹⁸ Batampos. "Aceh Promosikan Kopi Gayo Hingga ke Seattle, Amerika Serikat." [batampos.co.id](https://batampos.co.id/2018/04/22/aceh-promosikan-kopi-gayo-hingga-ke-seattle-amerika-serikat/), diakses pada 05 November 2022. <https://batampos.co.id/2018/04/22/aceh-promosikan-kopi-gayo-hingga-ke-seattle-amerika-serikat/>.

¹¹⁹ Badan Narkotika Nasional RI, 2019, Petunjuk Teknis Implementasi GDAD di Provinsi Aceh, Direktorat Pemberdayaan Alternatif Deputi Bidang Pemberdayaan Masyarakat BNN RI, 47.

pendampingan akses mengikuti pameran produk serta pendampingan untuk mendapatkan ijin usaha.¹²⁰

5. Investasi dari PT. Kopi Jenderal.

Dalam hal ini, PT. Kopi Jenderal mendukung adanya program *Alternative Development* dengan berinvestasi yang memberikan peluang pemasaran kopi Gayo pada wilayah Gayo Lues untuk terus menanam karena PT. Kopi Jenderal memberikan jaminan pemasaran kopi dengan harga yang kompetitif.¹²¹

Dengan adanya peran BNN dalam menerapkan peningkatan pasar (*Improve Markets*) SAD UNODC melalui GDAD, tentunya juga memiliki tantangan atau hambatan tersendiri dalam menjalankannya, seperti kurangnya materi pengembangan sosial dan budaya yang harus dilaksanakan dan diimplementasikan GDAD dan hal tersebut harus terlaksana untuk kedepanya seperti: kesadaran akan hukum, deradikalisasi, kredit usaha bagi UMKM, serta pelatihan pentingnya *e-commerce*. Banyak dunia usaha yang harus terus diajak bekerjasama, diajak investasi sambil terus berpromosi fasilitas yang diberikan dan jaminan investasi pemerintah lokal. Tantangan dari opini publik yang terpengaruh manfaat legalisasi ganja harus disikapi dengan menjelaskan mengenai bahaya pada penyalahgunaan ganja serta bahayanya peredaran ganja bagi sendi-sendi kehidupan.¹²² Meskipun dalam pembangunan ekonomi masih terukur kecil, namun perubahan serta perluasan ekonomi di lokasi *Pilot Project*

¹²⁰ Ibid, hal 53.

¹²¹ Ibid, hal 55.

¹²² Ibid, hal 48.

mendapatkan empati dan membuka peluang berusaha yang lebih besar. Oleh karena itu, semua pihak harus merawat capaian pembangunan ekonomi yang sudah ada dan berkelanjutan ini serta tetap menjaga strategi pemasaran agar tetap berjalan dengan lebih baik lagi. Hasil yang dirasakan dari pengembangan ekonomi ataupun dari peningkatan pasar (*Improve Markets*) berbeda dengan hasil dari masyarakat yang dulunya menanam tanaman ganja, sehingga khawatir jika penanaman tanaman ganja akan kambuh dan terjadi lagi.¹²³

Pada tahun 2020-2022 terdapat rencana tindak lanjut dari peran BNN dalam menerapkan target *Improve Markets* SAD UNODC melalui GDAD seperti mengaca pada tantangan yang dihadapi dalam mengimplementasikan target *Improve Markets*, banyak dunia usaha yang harus digandeng dan diajak bekerjasama, maka di pada tahap tindak lanjut akan menggandeng serta mengajak lebih banyak dunia usaha yang nantinya akan memberi kesempatan dalam membangun jejaring kerja dengan pemerintah daerah dalam rangka penyuksesan GDAD BNN, mengembangkan desa yang melek akan internet atau media sosial sebagai alat dalam peningkatan pasar.¹²⁴

I. Peran BNN dalam Menerapkan *Security Role of Law* SAD UNODC Melalui GDAD di Indonesia

Maraknya penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif (NAPZA) telah masuk dalam kota-kota kecil maupun kota-kota besar di Negara Indonesia termasuk di wilayah Aceh. Sebagai kejahatan narkoba yang sudah

¹²³ Ibid, hal 56.

¹²⁴ Ibid, hal 62-63.

berlangsung lama menjadi musuh negara, narkoba sangat mengkhawatirkan pada negara-negara saat ini termasuk Indonesia. Produksi dan distribusi obat-obatan terlarang begitu luas di tengah-tengah masyarakat. Peran dari mafia narkoba seakan seperti tak terbendung lagi. Para mafia narkoba telah meracuni para penegak hukum sebagai pengguna maupun sebagai pengedar di negara Indonesia bahkan di berbagai belahan dunia, meskipun seluruh negara-negara yang memiliki problematika narkoba telah memerangi kejahatan ini. Masyarakat seringkali mendengar pernyataan tentang membangun komitmen ataupun memerangi bersama dalam memberantas narkoba di negara Indonesia maupun di negara-negara lain. Pemberantasan tindak pidana narkoba melibatkan bangsa di seluruh dunia, akan tetapi tingkat perdagangan obat-obatan terlarang terbukti meningkat tinggi dan merajalela. Beberapa indikasi memperlihatkan bahwa kejahatan narkoba merupakan *extraordinary crime*, yang merupakan sebagai suatu kejahatan yang sangat berdampak besar dan multidimensional terhadap sosial, budaya, ekonomi dan politik serta begitu dahsyatnya dampak negatif yang diakibatkan oleh kejahatan ini. Oleh karena itu, *extraordinary punishment* sangat dibutuhkan untuk jenis kejahatan yang dewasa ini telah terjadi di seluruh negara-negara di dunia ini sebagai *transnational crime*.¹²⁵

Ketentuan perundang-undangan yang mengatur mengenai masalah narkoba telah dirancang dan ditegakkan, akan tetapi kejahatan yang

¹²⁵ Anton Sudanto, "Penerapan Hukum Pidana Narkotika di Indonesia," Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta, Hal 139-140. <https://media.neliti.com/media/publications/217402-penerapan-hukum-pidana-narkotika-di-indo.pdf>.

menyangkut narkoba ini belum dapat diredakan. Kasus-kasus baru ini, banyak bandar-bandar dan pengedar narkoba telah ditangkap dan dihukum berat, bahkan hingga dijatuhi hukuman mati, namun pelaku yang lain lebih cenderung mengabaikan bahkan tetap memperluas daerah operasinya. Penegakkan hukum terhadap narkoba, di Indonesia sendiri dalam Undang-Undang No.35 tahun 2009 mengenai narkoba merupakan suatu upaya politik hukum pemerintah Indonesia terhadap penanggulangan tindak pidana narkoba. Pembentukan Undang-Undang narkoba diharapkan dapat menanggulangi peredaran gelap dan penyalahgunaan narkoba dengan menggunakan sarana hukum pidana.¹²⁶ Begitupun dengan pengimplementasian program *Alternative Development* perlu diterapkannya aturan hukum (*Security Role of Law*) sesuai yang tertera pada target SAD UNODC. BNN dalam berperan menerapkan target aturan hukum SAD UNODC melalui GDAD BNN memiliki capaian seperti berikut ini:

1. Pelaksanaan Operasi Eradikasi Ganja.

Dalam hal ini, BNN, BNNP, BNNK, Polri dan TNI melaksanakan Operasi Eradikasi Ganja di Aceh dengan menyasar 24 titik lokasi eradikasi 8 kabupaten se-Aceh yang berhasil menyita 70,5 hektar lahan ganja dengan kapasitas panen ganja sebesar kurang lebih 141.000 ton atau 2 ton per hektar.¹²⁷

¹²⁶ Ibid, Hal 143-145.

¹²⁷ Badan Narkotika Nasional RI, 2019, Petunjuk Teknis Implementasi GDAD di Provinsi Aceh, Direktorat Pemberdayaan Alternatif Deputi Bidang Pemberdayaan Masyarakat BNN RI, 49.

2. Pengungkapan Tersangka Kasus Narkotika.

Dalam hal ini, BNN bersama Polri, TNI, Beacukai dan Imigrasi berfokus pada periode Januari-November mengungkap. sebesar 149 kasus, 238 tersangka, 804 kg Ganja serta lahan Ganja seluas 70,5 Ha yang tertanam 81.500 pohon ganja. untuk bulan Desember 2019 mengungkap penyelundupan Sabu di *Entry Point*, Pesisir serta wilayah perbatasan sebesar 73, 6 kg Sabu.¹²⁸ Selanjutnya, data keseluruhan yang diungkap selama tahun 2019 berhasil mengungkap sebanyak 33.371 kasus narkotika dengan sejumlah barang bukti berupa jenis Ganja dengan total keseluruhan sebanyak 112,2 ton, Sabu dengan berat total 5,01 ton, Ekstasi sebanyak 1,3 juta butir dan PCC sebanyak 1,65 juta butir yang disita dari keseluruhan tempat di Indonesia. Pada tahun 2019, terdapat 42.649 orang pelaku yang ditangkap oleh BNN dan Polri. Disamping itu, di tahun 2019, BNN berhasil memetakan 98 sindikat narkoba dan berhasil dipetakan sebanyak 84 jaringan. 84 jaringan tersebut 27 terdiri dari jaringan sindikat narkoba internasional, 38 jaringan dalam negeri serta 19 jaringan sindikat narkoba yang melibatkan warga binaan atau narapidana yang berperan sebagai pengendali jaringan di 14 lembaga pemasyarakatan.¹²⁹

3. Pemenjaraan Pengedar Narkotika.

Dalam hal ini, BNN melalui pihak yang berwajib melaksanakan pemenjaraan pengedar narkoba di Lapas atau Rutan, dimana hal tersebut

¹²⁸ Ibid.

¹²⁹ Badan Narkotika Nasional RI, 2019, Jadikan Narkoba Musuh Kita Bersama, Press Release Akhir Tahun, 2.

dapat mengekspos jaringan sindikat, memperlambat peredaran narkoba serta dapat mengurangi dampak buruk narkoba bagi masyarakat.¹³⁰

4. Penuntutan Hukuman Mati.

Dalam hal ini BNN melalui Kejaksaan Tinggi Provinsi Aceh menuntut hukuman mati atas 8 tersangka oleh tindak pidana narkoba.¹³¹

Dibalik adanya peran BNN dalam menerapkan aturan hukum (*Security Role of Law*) SAD UNODC tentunya juga terdapat tantangan yang dihadapi tersendiri ketika melaksanakan peran tersebut seperti budidaya ganja di Aceh cenderung menyasar wilayah bekas ladang ganja, sehingga budidaya ganja dan upaya pemberantasannya cenderung pada titik dan koordinat yang sama, oleh karena itu diperlukan pengelolaan lahan bekas ladang ganja secara terpadu di daerah pegunungan yang jauh dari pemukiman masyarakat. Perlu dibentuk dan diciptakannya rapat kerja ataupun rapat koordinasi yang berkala serta berkelanjutan agar koordinasi dan kolaborasi antar lembaga penegakkan hukum memiliki komunikasi serta sinergi dalam mengikis ego sektoral. Diperlukannya upaya mendidik kader-kader penegak hukum yang militan melalui pelatihan atau pendidikan secara khusus di dalam maupun diluar negeri guna mampu mengendalikan jalur perdagangan, sistem hukum, produksi Sabu hingga peredaran Ganja serta Sindikat Narkoba di Rutan atau Lapas. Diperlukannya komunikasi serta koordinasi yang intensif dalam kerjasama penegakan hukum dengan negara anggota ASEAN dalam mengamankan perairan di Aceh,

¹³⁰ Ibid.

¹³¹ Ibid.

mengingat maraknya jenis narkoba yang berbeda antara satu negara dengan negara yang lain seperti kasus, banyaknya pecandu heroin dan kokain negara Malaysia, maka dari itu narkoba jenis Sabu akan masuk ke Indonesia dan sementara itu, narkoba jenis Ganja akan dikirim dengan jumlah yang banyak ke negara Malaysia. Dengan adanya contoh kasus tersebut, forum bilateral harus dimanfaatkan guna membangun komitmen, diskusi, menjaga kerjasama, dan membentuk satuan khusus serta terkoordinasi.¹³²

Pada tahun 2020-2022 terdapat rencana tindak lanjut dari peran BNN dalam menerapkan target *Security Role of Law* SAD UNODC melalui GDAD, melihat pada tantangan yang ada dalam penerapan target *Security of Law*, tentunya rencana tindak lanjut kedepannya adalah melengkapi kelemahan atau tantangan-tantangan yang ada, seperti melakukan langkah-langkah dalam melaksanakan kerjasama serta kolaborasi dalam sinergi, kemitraan, peran serta aktif dan pelibatan untuk mencapai kinerja dalam implementasi GDAD yang lebih baik, meningkatkan kerjasama multilateral dengan tujuan memberikan pemahaman kepada dunia bahwasanya Indonesia masih berkomitmen dalam mengawal serta menjalankan *Single Convention* 1961, dimana salah satu isinya adalah melarang penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, meningkatkan kerjasama bilateral guna membangun komitmen, diskusi, menjaga kerjasama dan membentuk satuan khusus serta terkoordinasi, khususnya kerjasama bilateral dengan pemerintah negara Thailand yang telah dijajagi dalam even kerjasama bilateral antara kedua negara, termasuk pada

¹³² Ibid, Hal 50.

sistensi *Doi Tung Development Project* (DTDP) dalam implementasi GDAD di Aceh.¹³³ Setiap tahun juga akan terus melakukan yang menyangkut pada keamanan serta ketertiban seperti jika terdapat kasus penanaman akan segera diungkap, dimusnahkan kemudian juga akan tetap memenjarakan para pengedar-pengedar narkoba. Dalam hal ini BNN tidak berjalan sendiri, namun juga akan tetap menggandeng para satker keamanan dan ketertiban dan akan terus berjalan hingga tahun ke tahun.

Berikut merupakan tabel capaian peran BNN dalam menerapkan target *Sustainable Alternative Development* (SAD) UNODC melalui GDAD pada tahun 2019:

Tabel 4. 1 Capaian Peran BNN dalam Menerapkan SAD UNODC Melalui GDAD

No.	SAD UNODC	Capaian GDAD BNN
1.	<i>Agriculture Development</i>	a. Penanaman komoditi unggulan.
2.	<i>Infrastructure</i>	a. Pendirian pabrik telur di Seuliemeum, Aceh Besar. b. Pembangunan akses jalan dan sarana prasarana. c. Pembangunan program cetak sawah oleh TNI. d. Pengembangan kawasan <i>Pilot Project Alternative Development</i> untuk agrowisata oleh BNN melalui Dinas Pariwisata.

¹³³ Ibid, hal 64.

		e. Pembangunan menara pandang sebagai destinasi wisata oleh BNN melalui Dinas Bina Marga Kabupaten Gayo Lues.
3.	<i>Community Development</i>	a. Kerjasama BNN dan PT. Japfa Comfeed Indonesia dalam memberdayakan masyarakat.
4.	<i>Education</i>	<p>a. Pelaksanaan bimbingan teknis keterampilan hidup (<i>Life skill</i>).</p> <p>b. Pembinaan kelompok tani oleh BNN melalui Dinas Pertanian Provinsi Aceh.</p> <p>c. Pelatihan kewirausahaan bagi KIPAN di lokasi <i>Pilot Project</i> oleh BNN melalui Kementerian Pemuda dan Olahraga.</p>
5.	<i>Environmental Protection</i>	<p>a. Pemberian hutan produksi kepada masyarakat tepi hutan oleh BNN melalui kerjasama dengan Dinas Kehutanan dan Perkebunan Provinsi.</p> <p>b. Pembinaan lebih dari 150 kelompok dalam program perhutanan oleh BNN yang bekerjasama dengan Kementerian Lingkungan Hidup.</p> <p>c. Pelaksanaan penanaman kembali pada wilayah sungai agusen.</p> <p>d. Pendampingan penyuluh</p>

		pertanian di Kabupaten Aceh Besar.
6.	<i>Gender Equality</i>	<ul style="list-style-type: none"> a. Terlaksana pelatihan <i>life skill</i> pada wanita. b. Bekerjasama dengan PT. Ujang Internasional dan PT. Starbucks.
7.	<i>Health</i>	<ul style="list-style-type: none"> a. Terlaksana pelaksanaan rehabilitasi. b. Pelatihan <i>life skill</i> gerakan hidup sehat.
8.	<i>Improve Markets</i>	<ul style="list-style-type: none"> a. Pameran produk GDAD pada sidang CND ke 43 melalui Kementerian Luar Negeri dan KBRI serta Kedutaan Besar RI untuk Austria. b. Promosi kopi gayo pada ajang GSJE di Seattle, Washington, AS melalui Kementerian Luar Negeri, KBRI dan Pemerintah Kabupaten Gayo Lues. c. Pemberian fasilitas pemasaran online hasil karya binaan program <i>Alternative Development</i> oleh BNN. d. Pelatihan khusus serta pembekalan hingga memasarkan produk oleh BNN melalui Dinas Koperasi dan UKM. e. Investasi dari PT. Kopi Jenderal.

9.	<i>Security of Law</i>	<ul style="list-style-type: none"> a. Pelaksanaan operasi eradikasi ganja di Aceh oleh BNN, BNNP, BNNK, Polri dan TNI. b. Pengungkapan kasus narkoba oleh BNN, Polri, TNI, Beacukai, dan Imigrasi. c. Pelaksanaan pemenjaraan pengedar narkoba di Lapas atau Rutan. d. Penuntutan hukuman mati atas 8 tersangka oleh BNN melalui Kejaksaan tinggi Provinsi Aceh. e. Terlaksananya rehabilitasi pecandu narkoba oleh Rumahsakit Umum Daerah dan Klinik BNNP Aceh.
----	------------------------	---

(Sumber: Diolah oleh Peneliti)

Pada tabel 4.1 dijelaskan bahwa telah tercapai secara keseluruhan mengenai peran BNN dalam Menerapkan SAD UNODC melalui GDAD di tahun 2019. yang awalnya pada *Grand Design*, bagian target *Gender Equality* belum di desain dan bahkan belum direncanakan oleh BNN, namun fakta dilapangan menggambarkan bahwasanya telah tercapai secara keseluruhan di tahun 2019. Dalam hal ini menyimpulkan bahwa peran BNN dalam menerapkan SAD UNODC melalui GDAD dinilai baik dan berhasil seperti adanya panen raya di

lokasi *pilot project*¹³⁴ dan terlaksananya keseluruhan target. Adapun bentuk rencana tindak lanjut peran BNN dalam menerapkan target *Sustainable Alternative Development* (SAD) UNODC melalui GDAD pada tahun 2020-2022. Dalam hal tersebut dijelaskan pada tabel berikut:

Tabel 4.2 Rencana Tindak Lanjut Peran BNN dalam Menerapkan Target SAD UNODC Melalui GDAD Tahun 2020-2022.

No	SAD UNODC	Rencana Tindak Lanjut Tahun 2020-2022
1.	<i>Agriculture Development</i>	a. Bekerja sama dengan PT. Ujang Internasional dan PT. Starbucks.
2.	<i>Basic Infrastructure</i>	a. Mengajak lebih banyak dunia usaha.
3.	<i>Community Development</i>	a. Mengajak dan menggandeng lebih banyak lagi dunia usaha dalam kesempatan membangun jejaring kerja. b. Pembentukan relawan. c. Pembentukan penggiat anti narkoba. d. Pembentukan agen pemulihan. e. Pembentukan agen anti narkoba di semua lingkungan.
4.	<i>Education</i>	a. Menggandeng lebih aktiv

¹³⁴ Humas BNN. "Panen Raya Bukti Keberhasilan Program Grand Design Alternative Development." Dikases pada 05 Januari 2023. <https://bandaacehkota.bnn.go.id/panen-raya-bukti-keberhasilan-program-grand-design-alternative-development/>.

		<p>Kementerian atau Lembaga yang terlibat.</p> <p>b. Pendampingan mahasiswa dalam mendukung Gerakan Masyarakat Sehat (Germas), Gerakan Membangun Generasi Terencana (Genre), mengembangkan desa mandiri, desa 113aritime.</p> <p>c. Mengedukasi masyarakat.</p>
5.	<i>Environmental Protection</i>	a. Melakukan koordinasi sinergi kemitraan pelibatan seluruh stakeholder dan komponen masyarakat.
6.	<i>Gender Equality</i>	<p>a. Melaksanakan pelatihan-pelatihan <i>life skill</i> bagi para wanita.</p> <p>b. Bekerjasama dengan PT. Ujang dan PT. Starbucks.</p>
7.	<i>Health</i>	<p>a. Penjangkauan pada masyarakat pecandu narkoba.</p> <p>b. Melaksanakan tes urine.</p>
8.	<i>Improve Markets</i>	<p>a. Mengajak lebih banyak lagi dunia usaha.</p> <p>b. Mengembangkan desa yang melek akan internet atau media sosial sebagai alat peningkatan pasar.</p>
9.	<i>Security of Law</i>	a. Melaksanakan kerjasama serta kolaborasi dalam sinergi,

		<p>kemitraan, peran aktif dan pelibatan.</p> <p>b. Meningkatkan kerjasama multilateral.</p> <p>c. Meningkatkan kerjasama bilateral.</p> <p>d. Dilakukanya setiap tahun yang menyangkut pada keamanan dan ketertiban.</p>
--	--	--

(Sumber: Diolah oleh Peneliti)

Dijelaskan pada tabel 4.2 bahwa selain terdapat capaian peran BNN dalam menerapkan target *Sustainable Alternative Development* (SAD) UNODC melalui GDAD yang mengarah pada tahun 2019, terdapat juga rencana tindak lanjut dari peran BNN tahun 2019 tersebut di tahun 2020-2022. Hal tersebut juga telah direncanakan secara keseluruhan oleh BNN sesuai dengan SAD UNODC.

Dalam konsep peran yang dikemukakan oleh K.J Holsti, bahwa kebijakan luar negeri yang dilakukan oleh suatu pemerintahan dipengaruhi secara langsung oleh bagaimana para pengambil kebijakan dalam suatu pemerintahan tersebut menentukan peran dari negara atau pemerintahanya walaupun mungkin pada waktu-waktu tertentu kebijakan tersebut dapat dipengaruhi oleh status suatu negara di dunia internasional, yang mana status tersebut juga dapat dipengaruhi oleh peran yang diambil oleh suatu negara. Peran yang diambil oleh suatu pemerintahan negara tadi dipengaruhi secara langsung oleh kondisi internal negaranya. Peran-peran telah diklasifikasikan oleh K.J Holsti dalam 16 macam yaitu: *Bastion of the Revolution-Liberator, Regional Leader, Regional Protector,*

Active Independent, Liberation Supporter, Anti-imperialist Agent, Defender of the Faith, Mediator-integrator, Regional-subsistem collaboration, Developer, Bridge, Faithful ally, Independent, Example, Internal Development, Other role. Dalam hal ini, BNN berperan sebagai *Internal Development*.

Dalam penelitian ini, peneliti tidak menggunakan konsep *Bation of Revolution-Liberator* karena penelitian ini tidak termasuk sebagai suatu tugas negara untuk membebaskan aktor lain untuk bertindak sebagai benteng pertahanan, tidak termasuk juga *Regional Leader* dan *Regional Protector* karena dalam penelitian ini tidak mengacu pada tugas atau tanggung jawab khusus yang dipersepsikan oleh suatu pemerintahan dalam hubungannya dengan negara-negara di regional atau Kawasan tertentu serta penelitian ini tidak menekankan pada fungsi untuk menyediakan perlindungan bagi regional yang berdekatan. Pada konsep *Active Independent* dan *Liberation Supporter* juga tidak digunakan karena dalam penelitian ini tidak menekankan bahwa politik luar negeri suatu negara menjunjung nilai kemerdekaan, kebebasan menentukan kebijakan sendiri, adanya mediasi dan aktif dalam memperluas hubungan diplomatik, serta dalam penelitian ini tidak berisi tentang dukungan Gerakan-gerakan pembebasan. Pada konsep *Anti-imperialist Agent, Defender of the Faith* dan *Mediator-Integrator* tidak dipakai peneliti karena pada penelitian ini, tidak menjelaskan mengenai suatu negara sebagai agen pejuang dalam melawan imperealisme, tidak juga membahas mengenai tanggung jawab khusus suatu negara untuk menjamin kemurnian ideologi serta tidak membahas mengenai negara menjadi meditor suatu konflik antar negara. Pada konsep *Regional-subsistem collaboration, Developer, Bridge*

juga tidak digunakan dalam penelitian ini, karena dalam penelitian ini tidak berisi mengenai indikasi suatu negara dalam bekerjasama dengan negara lain untuk bisa membangun komunitas yang lebih luas, tidak berisi indikasi bahwa suatu negara mempunyai tugas atau kewajiban khusus untuk membantu negara-negara tertinggal, serta dalam penelitian ini tidak juga berfokus pada suatu negara dalam berperan sebagai pembawa pesan dan informasi antara orang-orang dari berbagai macam budaya. Pada peran *Faithful ally*, *Internal Development*, *Example* dan *Other role* juga tidak digunakan dalam penelitian ini, karena pada penelitian ini tidak merujuk pada suatu pemerintahan dalam membuat komitmen yang spesifik untuk mendukung kebijakan dari pemerintahan lainnya, tidak berisi indikasi mengenai suatu negara yang merujuk pada tugas dan fungsi tertentu dalam sistem internasional, tidak menekankan bahwa suatu negara membuat kebijakan-kebijakan domestik tertentu untuk mendapatkan pengaruh dalam sistem internasional, serta tidak juga berisi mengenai adanya sumber-sumber lain yang menjadi latar belakang tindakan suatu negara dalam politik luar negerinya.

Berdasarkan data yang telah dikumpulkan, maka tipe peran yang sesuai dengan fokus penelitian ini adalah *Independent*. Kebijakan BNN untuk mencapai kepentingan negara Indonesia dalam upaya mengurangi angka narkoba merupakan gambaran dari tipe peran *Independent*. Menurut Hoslti, peran *Independent* merupakan peran suatu negara atau pemerintahan akan mengeluarkan kebijakan sesuai dengan kepentingan nasionalnya sendiri dan menekankan bahwa suatu negara atau pemerintahan bebas untuk menentukan sendiri kebijakannya. Kebijakan BNN dalam mengurangi angka narkoba adalah dengan cara

menjalankan 9 komponen program *Alternative Development* UNODC melalui pembuatan desain program baru yaitu GDAD. Dalam hal ini BNN telah berperan menerapkan seluruh komponen tersebut di *pilot project*. 9 komponen yang telah dilaksanakan BNN meliputi: *Agricultural Development, Basic Infrastructure, Community Development, Education, Environmental Protection, Gender Equality, Health, Improve Markets, dan Security Role of Law.*



BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan data yang telah dipaparkan oleh peneliti, peran Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia (BNN RI) sebagai aktor Hubungan Internasional non pemerintah yang termasuk dalam *National Agency* memiliki peran untuk mencapai kepentingan negara agar negara menjadi lebih baik lagi, hal ini sesuai dengan peran *Independent* yang dikemukakan oleh KJ. Holsti, peran *Independent* menurut KJ. Holsti sendiri merupakan peran suatu negara atau pemerintahan akan mengeluarkan kebijakan sesuai dengan kepentingan nasionalnya sendiri dan menekankan bahwa suatu negara atau pemerintahan bebas untuk menentukan sendiri kebijakannya. Dalam hal ini dapat digambarkan pada peran BNN dalam upaya mengurangi angka narkotika di Indonesia salah satunya dengan menjalankan program *Alternative Development United Nations Office on Drugs and Crime* (UNODC) di Indonesia pada tahun 2019-2022 adalah dengan memberikan gambaran baru terhadap penanganan kejahatan narkoba salah satunya adalah mengenai pengentasan ganja melalui program-program yang telah di implementasikan. Dalam hal ini, BNN membuat desain program baru yakni *Grand Design Alternative Development* atau GDAD yang tetap merujuk pada komponen *Alternative Development* UNODC.

Tingginya angka produksi tanaman ganja di Aceh tak lepas dari rendahnya pembangunan serta tingginya angka kemiskinan yang mana Provinsi Aceh merupakan provinsi dataran tinggi dan pegunungan, sehingga para petani disana

memanfaatkan kondisi tersebut untuk menanam ganja yang dilangsir mendapatkan pendapatan yang lebih tinggi. Melihat hal tersebut, BNN mencetuskan desain baru yaitu GDAD yang juga mengacu pada komponen-komponen *Alternative Development* UNODC, dengan melihat program tersebut juga telah berhasil diterapkan di negara Thailand. Pada saat tahap *Grand Design* yang direncanakan oleh BNN, secara keseluruhan komponen-komponen SAD UNODC hampir direncanakan mulai dari target *Agriculture, Basic Infrastructure, Community Development, Education, Environmental Protection, Health, Improve Markets*, dan *Security Role of Law*. Pada tahap *Grand Design* hanya pada target *Gender Equality* yang bahwasanya belum terencanakan. Akan tetapi pada tahap implementasi peran BNN dalam menerapkan program *Alternative Development*, 9 target SAD UNODC telah tercapai secara keseluruhan serta membuahkan hasil yang baik. Terdapat juga rencana tindak lanjut yang direncanakan kedepannya di tahun 2020-2022, rencana tindak lanjut tersebut juga dibuat secara keseluruhan sesuai dengan 9 target SAD UNODC sendiri. Dengan adanya program *Alternative Development* tersebut, secara perlahan masyarakat Aceh sadar dan mulai beralih pada tanaman lain atau tanaman komoditi unggulan yang memiliki nilai jual tinggi. Mengingat program ini adalah program yang berkelanjutan jangka panjang, maka diperlukan komitmen serta kontribusi yang kuat dari setiap elemen masyarakat ataupun pemerintah agar program ini dapat berjalan dengan baik dan benar.

B. Saran

Melalui penelitian ini, dapat dirumuskan apa yang menjadi apa yang menjadi saran kedepannya untuk Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia (BNN RI) serta bagi akademisi. Bagi BNN sendiri, program *Alternative Development* merupakan suatu program yang menarik dan positif sebagai metode pencegahan narkoba, namun program ini juga membutuhkan kontribusi lebih dan kuat pada setiap lapisan masyarakat serta kementerian atau lembaga yang digandeng, sayangnya dilapangan, program ini banyak masyarakat yang belum faham dan alangkah baik jika penyampaian data itu dipublikasikan dengan detail, dengan tujuan agar masyarakat serta akademisi dapat ikut serta membantu dalam upaya pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba (P4GN) di Indonesia khususnya di Aceh, serta kurangnya kontribusi dari Kementerian atau Lembaga dalam bekerjasama menjalankan program ini, dan bagi akademisi sangat disarankan untuk meneliti lebih jauh lagi terkait program *Alternative Development* ini dengan melihat keberhasilan penerapan program ini di negara-negara lain. Karena, ini merupakan program kerja yang bagus secara konsep dan dapat memberikan paradigma baru terkait bagaimana program *Alternative Development* bekerja dalam upaya melawan kejahatan narkoba.

DAFTAR PUSTAKA

- Afriadi, SP., Dinas Pertanian Aceh Besar Mendukung GDAD BNN. 2019. Diakses pada 23 November.
<http://cybex.pertanian.go.id/mobile/artikel/71106/Dinas-Pertanian-Aceh-Besar-Mendukung-GDAD-BNN/>.
- Anderson Bobby. People, Land and Poppy: the Political Ecology of Opium and the Historical Impact of Alternative Development in Northwest Thailand, University of London, Forest and Society. Vol.1 (1): 48-59. ISSN:2549-4724, E-ISSN:2549-4333. 2017.
- Archer Clive, International Organizations; Third Edition (New York: Routledge, 2001).
- Arikunto Suharismi. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik, (Jakarta: Rineka Cipta, 2016).
- Badan Narkotika Nasional. Advokasi Pencegahan. Penyalahgunaan Narkoba Bagi Petugas Lapas/Rutan. Perpustakaan BNN. Jl. MT Haryono No.11 Cawang Jakarta Timur. Indonesia. 2009.
- Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia. BNN Gandeng PT. Japfa Comfeed Indonesia Sukseskan Alternative Development. Bidang Pemberdayaan Masyarakat. 2019. Diakses melalui <https://bnn.go.id/bnn-gandeng-pt-japfa-comfeed-indonesia-sukseskan-alternatif-development/> pada 15 Oktober 2022.
- Badan Narkotika Nasional (BNN) Republik Indonesia. Grand Design Alternative Development Dalam Rangka Pengentasan Produksi Ganja dan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat di Provinsi Aceh (Tahun 2016-2025).
- Badan Narkotika Nasional. Petunjuk Teknis Implementasi GDAD di Provinsi Aceh. Direktorat Pemberdayaan Alternatif Deputi Bidang Pemberdayaan Masyarakat Badan Narkotika Nasional RI Tahun 2019. 2019.

Badan Narkotika Nasional RI. Jadikan Narkoba Musuh Kita Bersama, Press Release Akhir Tahun. 2019.

Badan Narkotika Nasional (BNN). Survei Nasional Penyalahgunaan Narkoba Tahun 2021. Pusat Penelitian, Data, dan Informasi Badan Narkotika Nasional 2022.

Banyu Anak Agung dan Yanyan Mohammad Yani, 2006, Pengantar Ilmu Hubungan Internasional, Bandung : PT REMAJA ROSDAKARYA. Hlm. 12.

Barry Buzan. *People, State, and Fear: an agenda for international Security Studies in the Post Cold War Era.* (Hamstead:Harvester Wheatsheaf, 1991).

Batampos. Aceh Promosikan Kopi Gayo Hingga ke Seattle, Amerika Serikat, batampos.co.id. 2018. Diakses melalui <https://batampos.co.id/2018/04/22/aceh-promosikan-kopi-gayo-hingga-ke-seattle-amerika-serikat/> Pada 05 November 2022.

Budiarti. (2021). BNN: Peredaran Narkoba Meningkat di Masa Pandemi Covid-19. *TEMPO.CO*.

CerryPraningsih, Politik Keamanan Pemerintah Dalam Menangani Drug Trafficking di Indonesia Tahun 2012-2016. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Sumatera Utara, 2018. Bhabagan Behera, Drug Trafficking as a Non-Traditional Security Threat to Central Asian States. Jadavpur Journal of International Relations, SAGE Publications, Jadavpur University. 2013.

Creswell, Jhon. W. *Research Design, Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches.* Second Editons, SAGE Publications, Inc, 2002.

Cimeta Ribka, Upaya UNODC Dalam Menangani Narcoterrism di Afghanistan Periode 2011-2014, *Journal of International Relations, Volume 2, Nomor 4, Tahun 2016, hal. 162-169*, Program Studi Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro. 2016.

Dayamas. Perkuatan GDAD Melalui Pengembangan Kawasan Agrowisata di Gayo Lues, Bidang Pemberdayaan Masyarakat BNN RI. 2019. Diakses melalui <https://bnn.go.id/perkuatan-gdad-melalui-pengembangan-kawasan-agrowisata-gayo-lues/> pada 20 November 2022.

Dirgantara Gagah. Upaya Pemerintah Indonesia Dalam Menangani Kejahatan Transnasional (Penyelundupan Narkoba) di Daerah Perbatasan Indonesia-Malaysia di Kalimantan. Hubungan Internasional, FISIP Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

Fatima, M. S. Sinergitas Badan Narkotika Nasional Dengan Pemerintah Daerah Dalam Menghadapi Ancaman NonMiliter Kejahatan Terorganisir Transnasional Peredaran Gelap Narkoba di Kalimantan Barat Untuk Pertahanan Negara. *Jurnal Ilmiah Kajian Keimigrasian*. 2021.

Fatima, M. S. (2021). Sinergitas Badan Narkotika Nasional Dengan Pemerintah Daerah Dalam Menghadapi Ancaman NonMiliter Kejahatan Terorganisir Transnasional Peredaran Gelap Narkoba di Kalimantan Barat Untuk Pertahanan Negara. *Jurnal Ilmiah Kajian Keimigrasian* , 99.

Fadillah, R. S. Upaya UNODC (United Nations Office on Drugs and Crime) Dalam Menanggulangi Permasalahan Narkoba di Indonesia. *JOM Fisip Volume 2* , 3. 2015.

Gabriella Sara, Kerjasama Indonesia-Interpol Dalam Menangani Isu Penyelundupan Narkoba di Wilayah Perbatasan Indonesia. *Journal of International Studies*, Hubungan Internasional Universitas Indonesia. 2019.

Hardianto, M. K. (Vol.4 No.2 Juli-Desember 2021). Kebijakan Indonesia Dalam Penanganan Peredaran Narkoba di Segitiga Emas Asean Pada Masa Pandemi Covid-19. *MANDALA: Jurnal Hubungan Internasional*.

Hidriyah, S. (Vol. X, No. 05/I/Pulsit/Maret/2018). Mengapa Indonesia Menjadi Sasaran Sindikat Narkoba Internasional. *BIDANG HUBUNGAN*

INRTNASIONAL. INFO Singkat. KAJIAN SINGKAT TERHADAP ISU AKTUAL DAN SRATEGIS.

- Holsti, KJ (terj). *Politik Internasional: Suatu Kerangka Analisis*. Bandung: Binacipta, 1992.
- Holsti, KJ. *National Role Conception in the study of Foreign Policy*. International Studies Quarterly, 14 1970.
- Humas BNN. BNN Gelar Bimbingan Teknis Life Skill Pada Masyarakat Kawasan Pedesaan di Kabupaten Gayo Lues. 2019. Diakses melalui <https://gayolueskab.bnn.go.id/bnn-gelar-bimbingan-teknis-life-skill-pada-masyarakat-kawasan-pedesaan-di-kabupaten-gayo-lues/> Pada 24 Oktober 2022.
- Humas BNN. Panen Raya Bukti Keberhasilan Program Grand Design Alternative Development, diakses. 2020. Diakses melalui <https://bandaacehkota.bnn.go.id/panen-raya-bukti-keberhasilan-program-grand-design-alternative-development/> pada 06 Januari 2023.
- IMF Staff. Improving Market Access: Toward Greater Coherence Between Aid and Trade, International Monetary Fund. 2002. Diakses melalui https://www-imf-org.translate.goog/external/np/exr/ib/2002/032102.htm?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=id&_x_tr_hl=id&_x_tr_pto=sc pada 04 November 2022.
- Indoesia: Indonesia Prosecutors urged to send people who use drugs to rehabilitation, not prison. Diakses melalui <http://unodc.org/indonesia/en2013/10/people-who-use-drugs/story.html>. Pada 14 Juli 2022.
- Indonesia: Promoting Alternative to Imprisonment for Convicted Drug Users in Indonesia. Diakses melalui <http://www.unodc.org/indonesia/en/2015/04/drug-users/story.html>. Pada 14 juli 2022.
- Isnaini Nurul. Kebijakan ASEAN Dalam Penanganan Drugs Trafficking di Kawasan Segitiga Emas (Myanmar, Thailand, Laos) Periode 2013-2016.

- Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Syarif Hidayatullah. Jakarta. 2019.
- Jainah, Z. O. Kejahatan Narkoba Sebagai Fenomena Dari Transnational Organized Crime. *PRANATA HUKUM. Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung*. 2013. hlm 96.
- Joint Statement: Compulsory Drug Detention and Rehabilitation Centres, UNODC. 2012.
- Kantaprawira, Rusadi. Aplikasi Pendekatan Sistem dalam Ilmu-Ilmu Sosial Tinjauan terhadap Kehidupan Politik, Jawa Barat: Bunda Karya, 1987.
- Kementerian Pertanian. Kementan Dukung Pengembangan Alternative Development Aceh Bebas Narkoba. 2018. diakses melalui <https://www.pertanian.go.id/home/?show=news&act=view&id=2559> pada 02 Oktober 2022.
- Kompas.com. “Daftar Lembaga NonKementerian.” diakses 08 Januari 2023, <https://nasional.kompas.com/read/2022/02/12/00000051/daftar-lembaga-pemerintah-nonkementerian>
- Kristian Erdianto, Hukuman Mati Tak Turunkan Angka Pengguna Narkoba, Kompas.com. 2016. Diakses melalui <https://nasional.kompas.com/read/2016/08/01/06050081/Hukuman.Mati.Tak.Turunkan.Angka.Pengguna.Narkoba?page=all> Pada 15 Juli 2022.
- Kumparan News. Kopi Gayo Aceh Jadi Primadona dalam Ajang Coffee Expo 2018 di AS. 2018. Diakses melalui <https://kumparan.com/kumparannews/kopi-gayo-aceh-jadi-primadona-dalam-ajang-coffee-expo-2018-di-as> Pada 05 November 2022.
- Ma'rufah Fathimah. Implementasi Kerjasama Penanganan Kasus Penyelundupan Narkotika Antara Pemerintah Indonesia dan Malaysia di Provinsi Jawa Timur Tahun 2015-2017. FISIP UIN Sunan Ampel Surabaya. 2019.

- Manginwa Merdianto. *Penolakan Iran Atas Perjanjian Perdagangan Senjata Internasional PBB 2013*, eJournal Ilmu Hubungan Internasional. Vol.2 No. 3.2014.
- Margono. "Aktor Non-Negara dalam Hubungan Internasional." Jurnal Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Th. 28, Nomor 2 (2015), <http://dx.doi.org/10.17977/jppkn.v28i2.5450>
- Mas'oed Mohtar. *Ilmu Hubungan International: disiplin dan metodologi*, Penerbit PT Pustaka LP3ES (1994):46.
- Natalia Sheila dan Sahadi Humaedi. Bahaya Peredaran NAPZA Pada Masa Pandemi Covid-19 di Indonesia. Prosiding Penelitian&Pengabdian Masyarakat. FISIP Universitas Padjajaran. 2020.
- Neumen William Lawwence, *Metodologi Penelitian Sosial: Kualitatif dan Kuantitatif* (Jakarta: PT. Indeks, 2015).
- Op.Cit. *Bentuk-bentuk Ancaman Terhadap Negara*.
- Pratama Raja Arya Anugra. 2021. Kerjasama Bilateral Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia (BNN RI)-Office Narcotics Control Board of Thailand (ONCB) dalam Program Alternative Development di Aceh. Program Studi Ilmu Hubungan Internasional. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Universitas Sriwijaya.
- Rachman, F. Implementasi Regulasi ASOD-ASEAN Terhadap Korban di Indonesia. *Universitas Hasanuddin*. 2016.
- Rizki Candra Yanua, Peranan Laos, Myanmar, dan Thailand dalam Menangani Penyalahgunaan Produksi dan Perdagangan Opium di Kawasan Segitiga Emas. *Journal of International Relations, Volume 2, Nomor 2, Tahun 2016, hal. 104-108*. Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Diponegoro. 2016.
- Siregar Riduwan Effendi, Upaya Thailand Dalam Penaggulangan Drugs Trafficking Menuju Drug-Free ASEAN 2015, Jom FISIP Volume 1 No. 2-

- Oktober 2014, Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau. 2014.
- Sudanto Anton. Penerapan Hukum Pidana Narkotika di Indonesia, Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta. 2017.
- Redaksi AB. Bantu Peternak Lokal, JAPFA Resmikan Pabrik Penetasan Telur di Aceh Besar. 2019. diakses melalui <https://www.acehbisnis.com/news/bantu-peternak-lokal-japfa-resmikan-pabrik-penetasan-telur-di-aceh-besar/index.html> pada 19 November 2022.
- Redaksi Metro Aceh. GDAD 2019 Diluncurkan, BNN Aceh Mulai Penanaman Jagung di Bireuen. 2019. Diakses melalui <https://www.metroaceh.com/gdad-2019-diluncurkan-bnnp-aceh-mulai-penanaman-jagung-di-bireuen/> pada 02 Oktober 2022.
- Robert Jackson, Georg Sorensen. *Introductions to International Relations: Theories and Approaches*, Fifth Editions (New York: Oxford University Press).
- Shelley Louise. The Relationship of Drug and Human Trafficking: A Global Perspective. *Eur J Crime Policy Res*, Springer Science+Business Media B.V. 2012.
- Simiwijaya Stella. Kerjasama Badan Narkotika Nasional Dengan United Nations Office on Drugs and Crime Dalam Menanggulangi Penyalahgunaan Narkotika di Indonesia. *Verity-UPH Journal of International Relations*. Faculty of Social and Political Science Pelita Harapan University.
- Sitanggang B.A. Pendidikan Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Jakarta: Karya Utama. 1999.
- Sukardi. Metodologi Penelitian Pendidikan Kompetensi dan Praktiknya, (Jakarta:Bumi Aksara, 2005).

Suseno Agung. Evaluasi Perencanaan Program *Alternative Development* Alih Fungsi Lahan Ganja di Mukim Lamteuba, Kec. Seulimeum, Kab. Aceh Besar, NAD. FISIP UI. 2012.

The Global Synthetics Monitoring: Analyses, Reporting and Trends Programme (Global SMART Programme), diakses melalui <http://www.unodc.org/southeastasiaandpacific/en/smart.html> pada 07 Juli 2022.

Tom Kramer. 201. An Assessment Of The Impact Of The Global Financial Crisis On Sustainable Alternative Development (Key Determinant Factors for Opium Poppy Re-cultivation in Southeast Asia). UNODC Global Partnership on Alternative Development Project.

UNODC Country Programme for Indonesia 2012-2015.

United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC). About the United Nations Office on Drugs and Crime. Diakses melalui <https://www.unodc.org/unodc/en/about-unodc/index.html?ref=menutop> pada 15 Februari 2022.

United Nations Office on Drugs and Crime. Alternative Development. Diakses melalui <https://www.unodc.org/unodc/es/alternative-development/overview.html> pada 02 Agustus 2022.

United Nations Office on Drugs and Crime. Making a Difference Through Sustainable Alternative Development.

Widiarto Yudhi. Wawancara BNN oleh Wulan Suci Guritno, pada 10 Desember 2022.

Wulansari Anggia. Upaya dan Tantangan Thailand dalam Penanggulangan Narkotika dan Obat Terlarang Menuju Drug-Free ASEAN 2015. journal.unair.ac.id.

Yuantisya, M. (2021). Indonesia dalam Pusaran 'Segitiga Emas' Perdagangan Narkoba, Bamsoet Ungkap Fakta Miris Lainnya. *PikiranRakyat*. Diakses melalui <https://www.pikiran-rakyat.com/nasional/pr->

012135197/indonesia-dalam-pusaran-segitiga-emas-perdagangan-narkoba-bamsoet-ungkap-fakta-miris-lainya pada 12 Februari 2022.

Zi Aulia Srifan Dkk. Security Dilemma: Indonesia Dalam Menghadapi Tantangan Kawasan Segitiga Emas (The Golden Triangle) di Asean. Universitas Potensi Utama. PIR Journal Vol. 7 No. 1 Agustus 2022 Hal.31-45, e-ISSN:2721-0510, p-ISSN:2528-719231.

